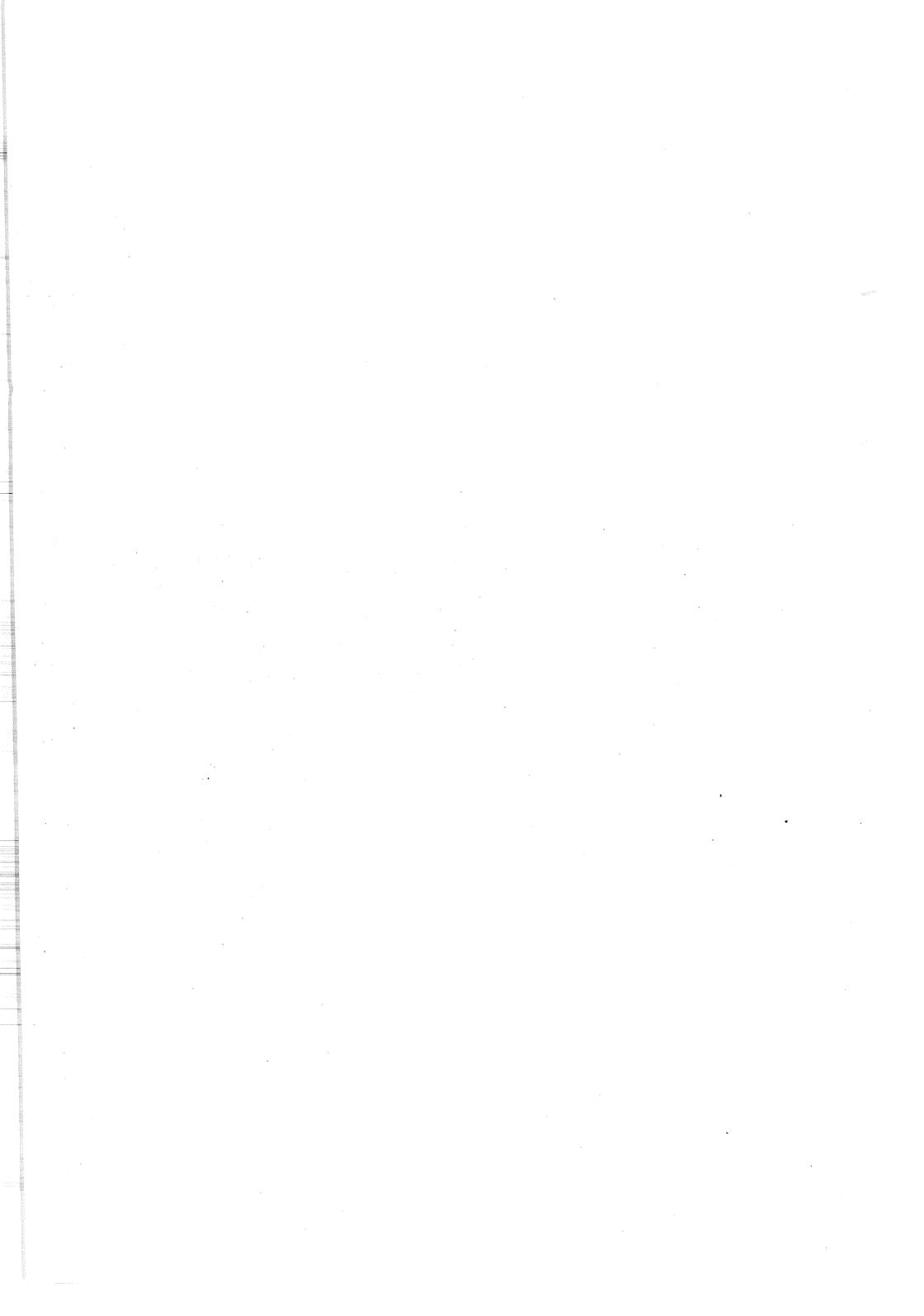


STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN DI DAERAH

Sebuah Bunga Rampai: Studi Ketahanan Pangan di Kabupaten Alor



STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN DI DAERAH

Sebuah Bunga Rampai: Studi Ketahanan Pangan di Kabupaten Alor

● Robert Siburian ● Sudiyono ● Sihol Farida Tambunan ● John Haba

Editor: Robert Siburian



Program Insentif Riset Peneliti dan Perekayasa
2009



©2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian K masyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Daerah (Sebuah Bunga Rampai: Studi Ketahanan Pangan di Kabupaten Alor)/ Robert Siburian, Sudiyono, Sihol Farida Tambunan, John Haba, Jakarta: LIPI Press, 2009

viii + 186 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-979-799-499-0

1. Ketahanan Pangan - Alor

338. 19

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota IKAPI



LIPI

*Pusat Penelitian K masyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai salah satu negara tropis di belahan dunia ini dikenal juga sebagai pemilik tanah yang subur. Tanah subur itu didukung oleh curah hujan yang cukup, sehingga kegiatan pertanian dapat dilakukan sepanjang tahun. Akan tetapi, secara khusus tidak semua daerah di Indonesia tergolong subur ataupun memiliki curah hujan yang cukup. Kabupaten Alor adalah salah satunya. Topografi daerah ini merupakan perbukitan dengan tingkat kemiringan yang tinggi dan curah hujan relatif kurang sepanjang tahun. Kondisi itu menjadi kendala dalam mengembangkan usaha pertanian. Walaupun penduduk di daerah ini pada umumnya hidup dari mata pencaharian pertanian, mau tidak mau, aktivitas pertanian itu harus dilakukan di lereng-lereng perbukitan yang curam. Pilihan itu tidak dapat dielakkan karena kondisi alam yang memang demikian, sementara dataran rendah relatif sedikit terutama yang berada di sekitar daerah pesisir. Dengan pola pertanian yang demikian, tentu saja hasil yang diperoleh tidak memadai apalagi kalau pada waktu pertanian dilakukan ada angin topan dan serangan hama tikus.

Bicara masalah ketahanan pangan secara umum, sistem pertanian yang dilakukan oleh penduduk di Kabupaten Alor masih mencukupi. Sumber pangan itu berasal dari tanaman jagung, umbi-umbian, dan pisang. Kekurangan pangan terutama ada pada penyediaan pangan beras karena produksi beras di Kabupaten Alor relatif sedikit, yang dipengaruhi oleh jenis lahan pertanian yang berada di lahan kering. Produksi padi di lahan kering tidak begitu banyak bila dibandingkan dengan produksi padi di lahan basah (sawah).

Rendahnya produksi lahan kering ini akibat tanaman padi tidak diurus dengan baik ataupun dengan cara modern. Penggunaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan kesuburan tanah masih

belum diterapkan sebab petani Alor masih hidup dengan ekonomi subsisten, sehingga petani belum mampu membeli pupuk dan pestisida.

Mitos dalam melakukan proses pertanian juga masih memengaruhi pola pertanian yang dikenal dengan "tahun genap dan tahun ganjil". Apabila panen jatuh pada tahun ganjil, maka lahan pertanian yang dikelola tidak begitu banyak, bahkan kegiatan pertanian yang dilakukan sekadar untuk mengambil bibit saja. Mitos yang berkembang di tengah-tengah sebagian masyarakat, yaitu pada tahun ganjil serangan tikus sangat luar biasa, sehingga kalau lahan pertanian banyak yang digarap akan menimbulkan kerugian. Hasil pertanian akan habis dimakan tikus. Dengan pola pertanian seperti ini, maka masa tanam sebenarnya berlangsung sekali dalam dua tahun. Oleh karena itu, tidak heran kalau kekurangan pangan, terutama beras dan jagung sering terjadi sebab di samping tanah pertanian tidak subur dan tidak dilakukan upaya pemupukan, masa tanam yang sesungguhnya hanya berlangsung sekali dalam dua tahun yang mengakibatkan tingkat produksi per tahun menjadi rendah.

Upaya untuk merubah pola pikir petani terkait dengan "tahun genap dan tahun ganjil" ini sudah dilakukan berbagai pihak, termasuk menyosialisasikannya, baik melalui mimbar gereja maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun masyarakat yang memercayai mitos ini sudah berkurang, tetapi petani yang memercayainya masih jauh lebih banyak. Kesulitan masyarakat untuk tidak percaya kepada mitos tersebut karena didasarkan kepada pengalaman pertanian yang dilakukan di mana kebenaran dari kepercayaan itu terbukti adanya. Padahal, menurut berbagai pihak, tikus yang begitu banyak akibat pola pertanian yang dilakukan oleh petani belum begitu benar.

Terkait dengan seringnya penduduk di Kabupaten Alor mengalami bencana kelaparan (rawan pangan), terutama beras, penelitian ini mencoba menjelaskan kehidupan masyarakat Alor dikaitkan dengan pola pertanian, kebijakan pangan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Alor, serta filosofi pangan penduduk Alor. Belajar dari pengalaman yang ada pada petani dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah lokal, hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan titik temu dari permasalahan pangan di Kabupaten Alor agar ke depannya, penduduk di Kabupaten Alor terhindar dari masalah kekurangan pangan.

Tentu saja, laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, tim penulis sangat mengharapkan kritik yang membangun, baik dari para pembaca maupun yang berminat dengan studi ketahanan pangan untuk dapat memberikan sesuatu yang terbaik terhadap penyelesaian permasalahan pangan di Kabupaten Alor.

Akhir kata, kegiatan penelitian ini tidak dapat dilakukan kalau hanya mengandalkan kemampuan peneliti semata. Banyak pihak yang sudah membantu tim demi terselenggaranya kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak; Departemen Pendidikan Nasional yang bekerja sama dengan LIPI untuk mendanai kegiatan ini. Berbagai instansi yang membantu peneliti untuk menyediakan data yang dibutuhkan, baik yang ada di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang maupun di Kabupaten Alor, antara lain Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, PIDRA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan lain sebagainya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada informan yang ada di perdesaan. Mereka itu adalah kepala desa dan jajarannya serta penduduk desa yang ada di Kabupaten Alor. Mereka memberikan informasi dengan hati yang tulus tanpa pernah mencurigai peneliti dan tanpa mengerti manfaat informasi itu bagi mereka. Untuk merekalah laporan ini peneliti dedikasikan kendati mereka tidak pernah membacanya.

Jakarta, Desember 2009

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I BERGESERNYA POLA MAKAN DAN DAMPAKNYA PADA KETAHANAN PANGAN: SEBUAH PENGANTAR.....	1
Oleh: <i>Robert Siburian</i>	
BAB II SINERGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN STRATEGI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN.....	21
Oleh: <i>Sudiyono</i>	
2.1 Pendahuluan	21
2.2 Kondisi Daerah Penelitian dan Ketersediaan Pangan	25
2.3 Kebijakan Pemerintah dan Implementasi.....	36
2.4 Strategi Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan.....	51
2.5. Penutup.....	67
Daftar Pustaka	72
BAB III PANDANGAN HIDUP DAN BUDAYA PANGAN MASYARAKAT DESA ALILA	75
Oleh: <i>Sihol Farida Tambunan</i>	
3.1 Pendahuluan.....	75
3.2 Potret Ketahanan Pangan Kabupaten Alor	80
3.3 Ekologi Pertanian Kabupaten Alor Sebagai Penyebab Kemiskinan.....	84

3.4	Potret Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor	89
3.5	Pandangan Hidup dan Budaya Pangan Masyarakat Desa Alila.....	96
3.6	Sumber Pemenuhan Kebutuhan Pangan.....	97
3.7	Budaya Miskin dan Kondisi Pangan	104
3.8	Budaya Konsumtif dan Budaya Pesta	109
3.9	Budaya Bergotong Royong	112
3.10	Makanan Lokal dan Gizi	113
3.11	Penutup.....	116
	Daftar Pustaka	119
BAB IV	MANAJEMEN DAN REVITALISASI PANGAN LOKAL	121
	Oleh: <i>Robert Siburian</i>	
4.1	Pendahuluan.....	121
4.2	Sejarah dan Sumber Pangan Alor.....	123
4.3	Kondisi Perpangan	130
4.4	Revitalisasi Pangan Lokal	141
4.5	Penutup.....	153
	Daftar Pustaka	156
BAB V	KEBIJAKAN PANGAN, KETAHANAN PANGAN, DAN STRATEGI LOKAL DI KABUPATEN ALOR	157
	Oleh: <i>John Haba</i>	
5.1	Pendahuluan.....	159
5.2	Konsep Ketahanan Pangan.....	160
5.3	Keseluruhan Produksi Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	167
5.4	Kabupaten Alor dan Ketahanan Pangan.....	169
5.5	Homogenisasi Kebijakan.....	177
5.6	Kebijakan Nasional	178
5.7	Peranan Kebudayaan Lokal.....	180
5.8	Penutup.....	184
	Daftar Pustaka	186

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Desa dan Jumlah Jiwa Berdasarkan Tingkat Resiko Rawan Pangan di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Keadaan 14 Juni 2005	15
Tabel 2.1	Struktur Tata Guna Lahan di Kabupaten Alor.....	28
Tabel 2.2	Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Alor Tahun 2007.....	29
Tabel 2.3	Tingkat Produktivitas Lahan Pertanian Rata-rata Per Ha.....	30
Tabel 2.4	Hasil Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2006	31
Tabel 2.5	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Alor Tahun 2008.....	32
Tabel 2.6	Banyaknya Keluarga Menurut Klasifikasi Keluarga Sejahtera di Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Alor Barat Laut Tahun 2008	35
Tabel 2.7	Daftar Keluarga Yang Menerima Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Alor 2008	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur	17
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Alor	17
Gambar 4.1	Lahan Pertanian Penduduk yang Berada di Punggung- Punggung Perbukitan.....	131
Gambar 4.2	Bentuk Lumbung Pangan Petani dan Anak-Anak Alor dengan Latar Belakang Lumbung Pangan	142

BAB I

BERGESERNYA POLA MAKAN DAN DAMPAKNYA PADA KETAHANAN PANGAN: SEBUAH PENGANTAR

Oleh: Robert Siburian

I

Indonesia pernah mengalami swasembada pangan era pemerintahan Orde Baru. Namun, masa swasembada itu kini hanya ada dalam pelajaran sejarah sebab Indonesia sudah menjadi salah satu negara pengimpor beras di dunia. Periode 1986--1990 misalnya, Indonesia mengimpor beras sebanyak 105,6 ribu ton, meningkat menjadi 944,6 ribu ton (1991-1995) dan melonjak ke angka 2.426,7 ton pada periode 1996-1998 (Aswatini, *et.al.*, 2004: 28). Seringnya Indonesia mengimpor beras mengakibatkan rasa dan aroma beras Thailand--misalnya--sudah tidak asing lagi di lidah orang Indonesia, padahal negeri Indonesia adalah tanah yang subur, sehingga diharapkan mampu memberi kemakmuran pada warganya. Akan tetapi, kondisi itu ternyata bertolak belakang dengan realitas sesungguhnya menyangkut ketahanan pangan. Kelaparan melanda penduduk di berbagai tempat di negeri ini, dan busung lapar menjadi momok yang membuat negeri subur ini malu.

Tingginya tingkat permintaan beras belakangan ini dengan persentase 97--100% dari penduduk Indonesia adalah karena adanya perubahan bahan makanan pokok dari nonberas menjadi beras di beberapa wilayah di Indonesia. Maluku, misalnya, makanan pokok penduduk di daerah ini dulunya adalah sago, namun belakangan ini, konsumsi beras di daerah itu mencapai 100% (Harianto, dikutip oleh Aswatini, *et.al.*, 2004: 1). Demikian juga dengan penduduk yang tinggal di Kampung Gurusina, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada masa nenek moyang mereka dulu, ubi merupakan bahan makanan pokok dan dianggap sebagai makanan atau sumber kehidupan. Ubi bahkan menjadi simbol keilahian dan menjadi simbol utama dalam pesta adat Reba (*Kompas*, 12/2/2008). Namun, kebiasaan makan ubi sebagai makanan pokok juga terpinggirkan oleh beras. Masyarakat Indonesia sudah terperangkap dalam paradigma "kalau belum makan nasi, itu belum disebut makan". Oleh karena itu, tidak mudah untuk merubah paradigma itu seketika ke arah budaya bukan nasi ataupun kembali ke makanan pokok sebelumnya (Welirang, 2006: 199). Beras tumbuh menjadi makanan bergengsi di seluruh Indonesia, sehingga dengan pendapatan yang meningkat, urbanisasi yang meningkat, dan pemberian bantuan-bantuan pangan beras (*raskin*) pada masyarakat miskin, beras mendesak makanan berkalori lainnya (Birowo, Junghans, dan Scholz, 1993: 86, 92).

Pemerintah pun mendorong peminggiran terhadap bahan pangan lokal itu sebab penghargaan yang diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri terhadap padi (beras) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman pangan lainnya, mengakibatkan perhatian yang diberikan oleh kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini pun terkonsentrasi pada komoditas beras itu. Dalam hal kebijakan pun, pemerintah selalu berupaya agar Indonesia kelak menjadi negara swasembada beras seperti pada dekade 80-an. Peningkatan produksi beras ini menjadi tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa dasawarsa (Birowo, Junghans, dan Scholz, 1993: 83). Oleh karena itu, tidak heran kalau beberapa jenis tanaman pangan lainnya, yang tadinya merupakan makanan pokok masyarakat di beberapa tempat di Indonesia tergusur oleh harumnya wangi beras, baik yang ditanam di dalam maupun yang diimpor dari negeri lain. Akibatnya, bahan pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, sagu kehilangan nilai sebagai pangan karena "orang kecil" pun sudah mengutamakan beras (Birowo, Junghans, dan Scholz, 1993: 92).

Kebijakan untuk mengimpor beras yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pascaswasembada pangan dimaksudkan untuk

memelihara ketersediaan pangan bagi penduduk Indonesia. Ketersediaan pangan itu menjadi penting karena pangan merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Bahkan, salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, sebagaimana tertulis dalam poin a adalah; "Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap masyarakat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional". Oleh karena itu, apabila pangan tidak tersedia berarti terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Ketidaktersediaan pangan selain dapat menimbulkan berbagai penyakit, tingkat produktivitas yang rendah, juga dapat menimbulkan kerawanan sosial. Pemerintahan yang berkuasa pun dapat jatuh hanya karena persoalan pangan rakyat yang tidak tercukupi, sebagaimana pepatah dari negeri Cina berbunyi; "Siapa sanggup memberikan makan bagi rakyatnya akan dapat membangun negara yang kuat. Sebaliknya siapa yang gagal memberikan makan rakyatnya maka ia sementara menebar revolusi." Itu artinya, ketersediaan pangan termasuk gizi buruk sangat menentukan keberlangsungan sebuah pemerintahan karena kedua komponen itu mempunyai arti politis yang negatif bagi penguasa. Sejarah membuktikan bahwa di beberapa negara berkembang, krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa (Hardinsyah, *et.al.*, 1999 dikutip oleh Purwantini, Ariani, dan Marisa, t.t). Berdasarkan kenyataan ini, penentuan daerah rawan pangan sangat penting artinya bagi upaya pencegahan terjadinya beberapa dampak negatif akibat kerawanan pangan, terutama agar berbagai program dengan sumber daya terbatas dapat betul-betul efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam menanggulangi masalah kerawanan pangan (Purwantini, Ariani, dan Marisa, t.t).

Kendatipun kebijakan impor beras dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memenuhi ketercukupan pangan, namun oleh berbagai kalangan hal itu sering ditengarai sebagai kebijakan yang didominasi

oleh kepentingan ekonomi semata. Hal ini dikarenakan, kebijakan pemerintah itu sering dinilai melukai hati petani. Penilaian itu dikuatkan dengan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan peraturan yang masih berlaku, sebagaimana yang pernah terjadi tahun 2005. Kala itu, larangan impor beras sudah diperpanjang hingga akhir Desember 2005, namun pemerintah sudah menyebar isu rencana untuk mengimpor beras sebanyak 250.000 ton yang pengadaannya akan dilaksanakan November 2005 (Kompas, 13/10/2005). Isu ini tidak sekadar membuat petani geram, tetapi telah membuat harga GKG (Gabah Kering Giling) di sentra pertanian yang berada di Pantai Utara Jawa Barat mengalami penurunan sekitar Rp200 per kilogram. Angka penurunan itu sangat berarti bagi petani dibalik membungahnya harga kebutuhan hidup. Agar petani juga bergairah dalam melakukan proses produksi di bidang tanaman pangan, seyogianya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menguntungkan semua pihak.

Di Indonesia, kerawanan pangan sering melanda kelompok petani dan mereka sangat rentan terhadap gejala kemiskinan. Karena faktor kemiskinan itu, banyak di antara petani yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar sekalipun. Beberapa tahun lalu, akibat kemiskinan yang sudah sampai ke titik nadir, satu keluarga miskin di salah satu desa di daerah Kalimantan melakukan aksi bunuh diri. Keluarga ini menganggap sudah tidak ada lagi cara lain untuk mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan, kecuali kematian itu sendiri. Karena persoalan kelaparan juga, seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, bersama janin dalam kandungannya serta anaknya yang berumur 5 tahun harus juga kehilangan nyawanya di awal Maret 2008 lalu.

Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dalam menunjang program ketahanan pangan yang berkelanjutan saat ini masih dihadapkan pada berbagai faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkannya. Salah satunya adalah perjuangan petani untuk mempertahankan hidupnya yang pada dasarnya merupakan upaya untuk menghasilkan bahan pangan yang cukup bagi keluarga untuk

generasi sekarang dan generasi mendatang. Agar perjuangan ini dapat berhasil, maka pengembangan dan introduksi teknologi baru selalu menjadi satu bagian penting dalam usaha taninya. Oleh karena itu, kehadiran tenaga penyuluh lapangan pertanian untuk mendampingi para petani di tingkat lapangan menjadi sebuah keharusan.

Terkait dengan penemuan teknologi dalam bidang pertanian, perubahan iklim, dan tingkat kesuburan tanah yang semakin berkurang mengakibatkan sistem pertanian terus mengalami perubahan. Realitas ini berhubungan dengan pengalaman yang bertambah, jumlah penduduk yang meningkat, aspirasi dan kebutuhan hidup yang bertambah, serta basis sumber daya alam yang mengalami perubahan. Akibat terjadinya perubahan yang mengitari lingkungan petani, maka petani selalu dituntut secara terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Akan tetapi, penyesuaian atau adaptasi yang dilakukan tidak selalu berhasil dan akibatnya budaya dari suatu kelompok masyarakat mengalami disorientasi.

Sebaliknya, banyak juga sistem pertanian tradisional yang berlangsung dan bertahan hidup, dan dalam beberapa kasus dapat berkembang pesat dengan mengeksploitasi basis sumber daya alam yang telah dimanfaatkan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Melalui proses pembaruan dan adaptasi, petani setempat telah mengembangkan sistem pertanian yang adaptif terhadap lingkungan ekologi, ekonomi, dan sosiokultural. Sistem pertanian yang adaptif itu belakangan dilihat sebagai suatu sumber gagasan yang pantas yang bisa mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan dalam membangun pertanian ini ternyata lebih sesuai dengan kebutuhan petani dan sesuai dengan konteks budaya mereka. Hal ini hanya bisa dicapai dengan proses penggabungan pengetahuan dan keterampilan petani setempat dengan materi yang dibawa oleh agen-agen perubahan pertanian guna mengembangkan teknik pertanian yang khas dan sesuai dengan kondisi social, ekonomi, dan budaya setempat. Pendekatan ini lazim disebut sebagai Pengembangan Teknologi Partisipatoris (PTP).

Respons terhadap perubahan sistem pertanian cenderung ke dua arah, yaitu penggunaan input luar secara besar-besaran dan pemanfaatan sumber daya lokal yang semakin intensif dengan sedikit atau sama sekali tanpa input luar. Kedua arah perubahan itu berakhir dengan terjadinya degradasi sumber daya alam. Ke arah mana sistem pertanian yang berlangsung di Alor, apakah berada di salah satu dari dua arah perubahan itu, atau malah mengarah ke suatu sistem pertanian yang adaptif yang secara terus-menerus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang belakangan dilihat sebagai suatu sistem pertanian yang berkelanjutan, akan dijelaskan di bab-bab dalam buku ini.

Sebagaimana diuraikan di awal, seringkali kebijakan pembangunan pertanian dirancang dengan pengetahuan akademik, tanpa memperhatikan sistem pengetahuan masyarakat setempat dan praktik-praktik pertanian tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, terjadi ketidaksambungan antara kebijakan yang dirumuskan dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kebijakan pertanian tidak justru mengatasi masalah yang dihadapi petani, tetapi malah memberi kesulitan baru sebagaimana terjadi pada program revolusi hijau yang pernah diterapkan. Kegagalan pembangunan pertanian sering terjadi akibat pendekatan yang tidak tepat, yang pada ujungnya bisa berakibat fatal, yakni rapuhnya ketahanan pangan masyarakat.

II

Definisi ketahanan pangan menurut FAO adalah suatu situasi di mana semua rumah tangga setiap saat memiliki akses (baik fisik maupun ekonomi) untuk memperoleh pangan yang cukup, aman dan sehat bagi seluruh anggota rumah tangganya (1996 dikutip Aswatini *at.al*, 2004: 25-27). Kemudian definisi itu diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutunya),

aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan isi undang-undang pangan yang dimaksud, maka kerawanan pangan yang terjadi di beberapa tempat merupakan pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri.

Ketercukupan pangan itu sangat penting karena pangan merupakan salah satu hak dasar rakyat, *basic entitlement* (kebutuhan dasar manusia) yang dapat ikut menentukan kualitas hidup suatu bangsa yang dalam perwujudannya memerlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui aksi langsung dan tidak langsung secara bersama. Sebagai hak dasar, maka ketercukupan pangan kemudian dideklarasikan sebagai salah satu hak asasi manusia tahun 1948 artikel 11(1) yang menyatakan bahwa: "setiap orang mempunyai hak atas kehidupan standar yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan....". Artinya, hak asasi ini menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak kelaparan dan mempunyai akses terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan aman bagi tubuhnya. Kekurangan pangan dapat menyebabkan kekurangan gizi dan berakibat buruk bagi kesehatan (Rungkat, 2006: 240).

Sementara itu, kata terjangkau mengandung arti bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut, tidak harus dilakukan dengan memproduksi sendiri, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara membeli sesuai dengan kemampuan daya belinya. Oleh sebab itu, orientasi pada peningkatan pendapatan dan pasar harus menjadi pertimbangan utama dalam membangun sektor pertanian, sesuai dengan tuntutan pasar global dan otonomi daerah, tanpa harus mengesampingkan peningkatan produksi pangan secara kuantitas.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan oleh umat manusia karena dengan ketersediaan pangan manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitasnya. Untuk memperoleh ketercukupan pangan itu, ada beberapa alternatif yang dilakukan; (1) Memproduksinya sendiri, dan (2) Mendapat pasokan dari pihak lain, baik dengan cara membelinya maupun dalam bentuk

bantuan-bantuan seperti yang dilakukan oleh pemerintah melalui program beras untuk keluarga miskin (raskin).

Penyebab terjadinya kerawanan pangan salah satunya diakibatkan oleh faktor kemiskinan. Sebab dengan kemiskinan, seseorang tidak dapat mengakses bahan pangan dengan mudah, baik melalui pembelian maupun dengan produksi sendiri. Kemiskinan menyebabkan seseorang memiliki daya beli rendah, sehingga tidak mampu untuk membeli bahan pangan ataupun membiayai proses produksi yang dilakukannya sendiri agar hasil pertaniannya maksimal. Oleh karena itu, tidak heran kalau di beberapa tempat di daerah pertanian di Indonesia termasuk di Kabupaten Alor, banyak lahan-lahan produktif yang dibiarkan terlantar kendati mereka dihadapkan pada potensi kerawanan pangan yang selalu mengancam.

Terjadinya kerawanan pangan di suatu daerah menjadi indikator gagalnya pembangunan pertanian di wilayah tersebut. Sebab, pembangunan pertanian merupakan pilihan untuk memacu pertumbuhan, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan ketahanan pangan. Pertumbuhan produktivitas pertanian sangat penting untuk merangsang pertumbuhan di sektor-sektor perekonomian yang lain karena yang terjadi kemudian adalah *multiplier effect*. Namun yang terjadi saat ini, pembangunan pertanian tanaman pangan dalam menunjang program ketahanan pangan yang berkelanjutan, masih dihadapkan pada berbagai faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkannya. Faktor-faktor itu antara lain *pertama*, faktor struktural. Hal ini menyangkut sempitnya pemilikan lahan, terjadinya fragmentasi tanah melalui sistem pewarisan dan jual beli tanah, berlangsungnya konsentrasi pemilikan tanah pada segelintir orang, bergesernya orientasi petani padi sawah dari peningkatan produksi ke peningkatan pendapatan yang ditandai oleh munculnya kegiatan agrobisnis, berlangsungnya proses konversi lahan pertanian ke usaha nonpertanian, rusaknya infrastruktur pertanian, stagnasi teknologi revolusi hijau, dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada usaha pengembangan sektor pertanian tanaman pangan.

Kedua, faktor kultural. Kebijakan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dengan program revolusi hijau telah menggeser kearifan lokal berupa sistem pengetahuan dan pola usaha tani yang ramah lingkungan. Sisi lain corak pertanian yang bersifat kapitalistik dan padat modal telah menggeser tatanan sosial dan adat di seputar kegiatan petani yang memungkinkan berjalannya mekanisme ketahanan pangan petani melalui saling berbagi di antara sekelompok petani yang tergolong kaya dengan kelompok petani miskin.

Ketiga, faktor kelembagaan. Hal ini terkait dengan hadirnya kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik, kapitalistik, dan ditunjang oleh kelembagaan yang menyertainya, seperti Bulog, KUD, yang telah menggeser institusi lokal seperti lembaga pedaringan, lumbung padi, lumbung desa, dan hilangnya sifat kegotong-royongan serta solidaritas petani. Akibatnya, petani kecil kehilangan mekanisme penanggulangan risiko krisis pangan akibat gagal panen atau masa paceklik yang sewaktu-waktu menimpanya.

Keempat, faktor lingkungan. Dalam hal ini termasuk program revolusi hijau yang antilingkungan, dan masih diperburuk oleh kegagalan pemerintah dalam melakukan perlindungan lingkungan pada bagian hulu yang ditandai oleh rusaknya sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah berakibat rusaknya jaringan infrastruktur irigasi, sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai pengendali tata air.

Lemahnya pembangunan pertanian bermuara pada terjadinya kelaparan. Paus Benediktus XV dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan yang diselenggarakan oleh FAO (*Food Association Organization*) pada akhir tahun 2009 di Roma, Italia, menyampaikan bahwa “Kelaparan adalah tanda kemiskinan yang konkret dan kejam. Kemewahan tidak bisa diterima lebih lama lagi ketika tragedi kelaparan membutuhkan perhatian yang lebih besar”. Kemiskinan yang terjadi pada petani merupakan muara dari dua konsep kemiskinan yang dikenal dalam dunia akademis, yaitu

kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut (Dillon, 1999: 21). Kemiskinan relatif berarti petani miskin karena kelembagaan pasar gagal dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terdistribusi secara adil. Akses petani terhadap sumber-sumber kekayaan itu sangat rendah, mengakibatkan petani hanya mendapat bagian yang sangat kecil. Untuk mengurangi ketidakadilan itu, Presiden Soesilo Bambang Yudono memberikan subsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp100.000 sebulan. Keluarga miskin yang sudah pernah memperoleh dana BLT ini jumlahnya sekitar 15,5 juta keluarga sebagai kompensasi terhadap berkurangnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sementara kemiskinan absolut muncul karena ketidakmampuan seorang petani untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketidakmampuan itu diakibatkan oleh rendahnya tingkat kepemilikan lahan, tingkat pendidikan dan modal. Dengan demikian, petani tidak dapat memproduksi secara maksimal, termasuk untuk mengembangkan kegiatan pertaniannya melalui kreativitas-kreativitasnya sendiri. Untuk dapat melakukan kreativitas ataupun inovasi di bidang pertanian dibutuhkan investasi yang tidak sedikit, sementara petani tidak memiliki investasi itu. Oleh karena keterbatasan itu, tidak sedikit petani yang juga menjadi buruh tani. Dalam hal ini juga, hak ulayat tidak memperoleh perlindungan hukum. Kelompok masyarakat yang telah mengusahakan sebidang tanah selama beberapa generasi hanya mendapat sedikit hak atasnya dan dapat kehilangan lahan tersebut—katakanlah untuk menyediakan ruang bagi investasi strategis—dengan ganti rugi yang kecil atau bahkan tidak ada ganti rugi sama sekali. Padahal, lahan-lahan komunal dan sumber-sumber kepemilikan yang dimiliki bersama, seperti ladang penggembalaan dan lahan masyarakat asli itu penting sebagai jaring pengaman sosial bagi kaum miskin karena nilai kultural yang terkandung di dalamnya (World Bank, 2008: 199).

Kemiskinan relatif maupun absolut saling terkait. Petani yang tidak mendapat alokasi sumber daya (misalnya lahan pertanian yang memadai) mengakibatkan ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, dan papan, terlebih kesehatan dan pendidikan. Rendahnya bagian sumber daya yang diperoleh mengakibatkan petani tidak sanggup membeli faktor-faktor produksi untuk melakukan aktivitas pertaniannya.

Revolusi hijau di bidang pertanian yang pernah didengungkan oleh pemerintah tahun 70-an juga tidak membuat petani bertambah sejahtera. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh FAO yang menyatakan bahwa revolusi hijau telah mengajarkan kepada petani bagaimana pentingnya inovasi teknologi—benih unggul, pupuk, pestisida, dan mekanisasi pertanian—yang berhasil memberikan keuntungan yang luar biasa bagi si miskin melalui peningkatan efisiensi usaha tani, pendapatan yang meningkat, dan harga pangan yang rendah (Santosa, 2004). Dalam kenyataannya, peningkatan produktivitas, standar kehidupan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akibat revolusi hijau tidak mengangkat jutaan orang petani dari belitan kemiskinan. Justru revolusi hijau telah membawa tingginya biaya produksi di bidang pertanian karena revolusi hijau membutuhkan biaya yang lebih tinggi, seperti menyediakan bibit yang unggul, pestisida, dan inovasi teknologi lainnya di bidang pertanian itu sendiri. Sebaliknya, harga jual produksi dari revolusi hijau itu justru turun. Kini, harga bahan makanan *unorganik* yang notabene tidak menggunakan pupuk ataupun pestisida justru harganya lebih tinggi karena lebih aman untuk kesehatan.

Kualitas petani Indonesia masih relatif rendah dan tidak didukung oleh teknologi yang memadai. Dengan kelemahan itu, nasib petani sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh petani. *Pertama*, sumber ekonomi petani hanya bertumpu pada komoditas gabah. Karena itu, sebelum panen berlangsung, sering petani mencari pinjaman dari para pemilik modal ataupun tengkulak dengan jaminan padi yang masih tertanam di sawah, bahkan harga sudah ditentukan sebelum panen itu

terjadi (sistem ijon). Dengan adanya sistem ijon ini, petani tidak bebas menjual hasil pertaniannya ke pedagang yang memberikan harga yang lebih tinggi. Bahkan, sistem ijon ini berakhir dengan terbentuknya pola hubungan patron-klien, di mana pemilik modal sebagai patron dan petani diposisikan sebagai klien. Walaupun tampak bahwa dalam hubungan patron-klien ini petani seakan terlindungi, namun dalam kondisi sebenarnya petani lebih banyak dirugikan akibat ketidakbebasan untuk menjual hasil pertaniannya.

Kedua, komoditas pertanian sangat tergantung pada iklim. Akibatnya, petani di suatu daerah selalu bersamaan dalam melakukan masa tanam dan masa panen. Dengan demikian, produksi pun melimpah pada suatu kurun waktu tertentu yang berakibat jatuhnya harga gabah ketika panen raya berlangsung. Ketiga, dengan kedua kondisi di atas, posisi tawar petani menjadi rendah. Oleh karena hutang sudah menumpuk sementara produksi gabah petani melimpah, mau tidak mau, gabah pun dilepas kepada para tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). HPP terhadap GKG yang ditentukan oleh pemerintah Rp1.730 per kilogram, namun ketika panen raya berlangsung harga GKG di tingkat petani hanya berkisar Rp1.000 per kilogram. HPP yang ditentukan pemerintah saja masih 50% dari modal yang dikeluarkan, apalagi dengan harga pada saat panen raya berlangsung, perolehan petani jauh lebih rendah lagi.

Selain itu, kebijakan pemerintah di masa lalu juga menjadi pemicu terjadinya kerawanan pangan. Ketika pemerintah Indonesia menerapkan tarif yang rendah terhadap impor komoditas pangan (lebih rendah dari ketentuan WTO), hal tersebut mengakibatkan harga-harga komoditas kebutuhan pangan yang diimpor itu menjadi lebih rendah dari hasil pertanian lokal atau nasional. Realitas itu tidak menguntungkan petani karena dampak dari kebijakan yang demikian menjadikan petani di daerah perdesaan yang berpotensi menjadi lumbung pangan tidak bergairah mengembangkan pertanian karena pendapatan yang akan mereka dapatkan tidak menjanjikan (PPE-LIPI, 2009). Komoditas pertanian yang diproduksi secara lokal itu tidak

mampu bersaing dengan produk impor tersebut. Hal ini mengakibatkan petani mengalami kerugian sebab ongkos produksi yang sudah dikeluarkan oleh petani jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil dari penjualan komoditas pertanian yang dihasilkan tadi.

Berangkat dari uraian-uraian di atas, tampak bahwa dominasi beras yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tidak lagi dapat dipertahankan. Sebab, ketergantungan semata-mata kepada beras membuat banyak penduduk mengalami kelaparan. Hal itu terjadi karena ada kemungkinan tanaman padi tidak dapat tumbuh baik di daerah tertentu ataupun cara mengelola tanaman padi yang belum optimal, sementara masyarakat yang membutuhkannya begitu banyak. Akibatnya, produksi sawah atau ladang yang dikelolanya pun tidak optimal. Oleh karena permintaan beras lebih banyak dibandingkan dengan produksinya, maka yang terjadi adalah jumlah permintaan beras yang tidak terpenuhi. Kekurangan permintaan itu mesti didatangkan dari daerah lain dengan harga yang lebih mahal, padahal daerah lain pun memerlukan beras. Selain itu, para tengkulak sering mempermainkan komoditas beras ini, bahkan yang menentukan harga belinya justru dilakukan oleh para tengkulak itu.

Salah satu daerah yang mengalami kerawanan pangan di Indonesia adalah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kerentanan Kabupaten Alor terhadap kerawanan pangan menjadi alasan untuk memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian. Data Pemerintah Provinsi NTT tahun 2005 mencatat bahwa dari 174 desa yang ada di seluruh Kabupaten Alor, hanya 8 desa (5%) saja yang relatif aman dari risiko rawan pangan (lihat Tabel 1.1). Padahal lahan di Kabupaten Alor ini relatif luas, yaitu 136.237,88 ha lahan kering dan 3.354,5 ha lahan basah. Namun lahan-lahan tersebut tidak seluruhnya dikelola oleh masyarakat sebab data tahun 2003 menunjukkan lahan kering yang dimanfaatkan untuk memproduksi padi ladang, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar hanya 22.439 ha saja. Artinya, sekitar 113.798,88 ha (84%) lahan tidak dimanfaatkan secara maksimal atau ditelantarkan. Demikian halnya dengan lahan basah yang sangat sedikit dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu hanya 183

ha saja. Produksi padi sawah dan lahan kering sekitar 8.752,50 ton (BPS Kab. Alor, 2003). Bila dikonversikan dengan angka 0,6321, maka jumlah padi tersebut setara dengan 5.531,58 ton beras. Kalau konsumsi beras adalah sekitar 148 kilogram per kapita, maka kebutuhan beras untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kabupaten Alor yang jumlahnya 171.187 jiwa (2004) kurang lebih 25.335,68 ton per tahun. Hal itu berarti bahwa produksi beras Kabupaten Alor hanya mampu memenuhi sekitar 22% saja akan kebutuhan beras di kabupaten tersebut. Sisa kebutuhan beras sekitar 78% harus didatangkan dari daerah lain. Kondisi ini mengakibatkan rentannya Kabupaten Alor terhadap kerawanan pangan, terutama ketersediaan beras.

Kerawanan pangan yang terjadi di Alor merupakan satu dari empat kabupaten di NTT sebagai kabupaten yang rawan pangan. Tiga kabupaten lainnya adalah Lembata, Rote Ndao, dan Sumba Barat Daya. Petrus, Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan (P2KP) NTT kepada Suara Pembaruan (11 Juni 2008), berdasarkan survei yang dilakukan menyatakan beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kerawanan pangan adalah panen kurang dan produksi pangan tidak mencukupi (Matias dan Ernanto, 2008).

¹ Setiap satu kilogram padi menghasilkan sekitar 0,632 kilogram beras.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Desa dan Jumlah Jiwa Berdasarkan Tingkat Risiko Rawan Pangan di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Keadaan 14 Juni 2005²

No	Kabupaten	Jml Desa	Risiko Rawan Pangan							
			Aman		Risiko Ringan		Risiko Sedang		Risiko Tinggi	
			Jml Desa	Jml Jiwa	Jml Desa	Jml Jiwa	Jml Desa	Jml Jiwa	Jml Desa	Jml Jiwa
1	Kupang	219	-	-	6	6.108	57	58.026	156	158.808
2	Rote Ndao	75	-	-	41	13.637	34	22.862	-	-
3	TTS	67	18	1.247	20	10.192	7	1.932	22	13.507
4	TTU	14	-	-	5	852	9	1.910	-	-
5	Belu	67	2	1.001	20	31.503	16	21.675	29	54.401
6	Alor	174	8	395	113	8.621	53	9.127	-	-
7	Flotim	108	16	144	49	12.780	18	10.384	25	13.908
8	Lembata	64	-	-	2	221	18	3.438	44	13.480
9	Sikka	73	-	-	22	11.413	16	14.401	35	43.864
10	Ende	43	-	-	2	320	16	7.410	25	17.135
11	Ngada	69	6	1.851	24	13.044	15	9.887	24	24.577
12	Manggarai	63	-	-	-	-	39	31.828	24	26.780
13	Manggarai Barat	19	-	-	18	7.008	1	1.054	-	-
14	Sumba Timur	138	-	-	49	25.977	54	25.604	35	16.875
15	Sumba Barat	138	31	1.240	53	23.210	5	3.550	49	51.525
Jumlah		1.331	81	5.878	424	164.886	358	223.088	468	434.860

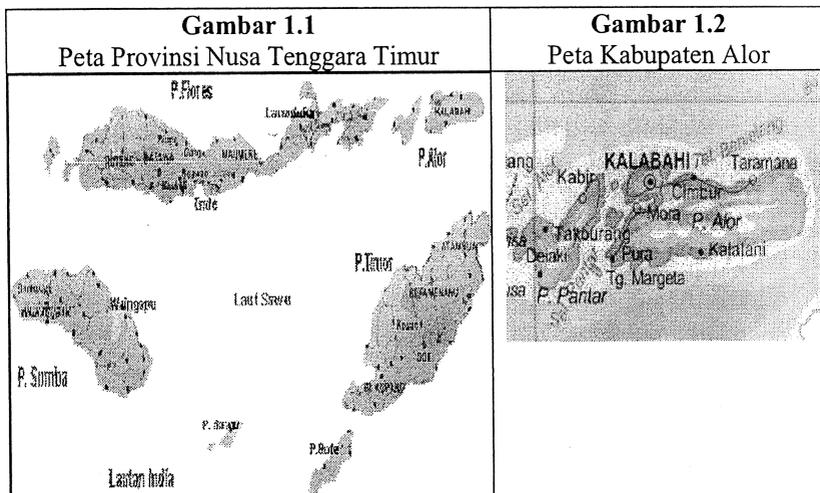
Sumber: Pemerintahan Provinsi NTT, 2005

Kebutuhan pangan yang hanya bersumber dari beras sering mengakibatkan daerah-daerah mengalami kerawanan pangan dan hal ini sudah harus diantisipasi. Penganekaragaman pangan adalah salah satu cara menghindari ketergantungan kepada beras dan melepaskan diri dari permainan para tengkulak, serta termasuk usaha untuk kembali mengonsumsi makanan pokok yang sebelumnya ditinggalkan akibat hegemoni komoditas beras yang menguasai seluruh masyarakat Indonesia. Namun, usaha penganekaragaman pangan itu tidak akan

² Jumlah kabupaten di Provinsi NTT tahun 2005 belum mengalami pemekaran sehingga masih 15 kabupaten. Tahun 2009, jumlah kabupaten dan kota sudah 21.

berhasil tanpa dukungan politik dan sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan elemen-elemen terkait. Untuk itu, tulisan-tulisan dalam buku ini hendak mengkaji beberapa hal: (a) Bagaimana strategi ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Alor dan implementasi kebijakan itu terkait dengan kerawanan pangan yang terjadi di daerah itu? dan (b) Bagaimana strategi masyarakat lokal dalam menghadapi kerawanan pangan yang terjadi di daerahnya dan dukungannya terhadap usaha meningkatkan ketahanan pangan? Untuk itu, tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Alor terkait dengan terjadinya kerawanan pangan di daerah itu dan juga untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah terhadap diversifikasi pangan dalam rangka memperkuat sistem pangan lokal terutama di Kabupaten Alor.

Kabupaten Alor merupakan salah satu dari 21 kabupaten/kota di Provinsi NTT, letaknya bagian utara dan ujung timur NTT. Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 20 pulau, di antaranya 9 pulau yang telah dihuni oleh penduduk, yakni Pulau Alor, Pantar, Pura, Tereweng, Ternate, Kepa, Buaya, Kangge, dan Kura. Sementara 11 pulau lainnya tidak berpenghuni, masing-masing, Pulau Sikka, Kapas, Batang, Lapang, Rusa, Kambing, Watu Manu, Bawa, Batu Ille, Ikan Ruing, dan Nubu. Kabupaten Alor dengan pulau-pulainya itu terletak membujur dari timur ke barat pada posisi 123°48' – 125°8' BT dan 8°6'–8°36' LS. Kabupaten Alor secara wilayah administrasi dibagi menjadi 17 kecamatan, 158 desa, dan 17 kelurahan. Kabupaten Alor sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Maluku Tenggara Barat, sebelah barat berbatasan dengan Selat Lomblen, Kabupaten Lembata, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah selatan berbatasan dengan Selat Ombay dan Timur Leste (http://www.nttprov.go.id/ntt_09/index.php?hal=kabalar).



Sumber: http://www.nttprov.go.id/ntt_09/index.php?hal=kabalar.

Jenis tanah di Kabupaten Alor termasuk vulkanik muda, sehingga kaya unsur hara serta berstruktur tanah gembur dan subur. Solum tanah sedang sampai dalam, sehingga tanah lebih stabil, dengan kemampuan yang tinggi untuk menahan air dan dapat diusahakan berbagai jenis tanaman. Luas wilayah daratan 2.864,64 km², luas perairan 10.773,62 km², dan panjang garis pantai 287,10 km. Kondisi geografi Kabupaten Alor berkonfigurasi bergunung-gunung dan memberikan variasi iklim yang berbeda dan sangat menguntungkan bagi daerah dan rakyat dalam pengembangan tanaman produksi (http://www.nttprov.go.id/ntt_09/index.php?hal=kabalar).

Daftar Pustaka

- Aswatini dkk 2004. *Ketahanan Pangan, Kemiskinan, dan Sosial Demografi Rumah Tangga*. Jakarta: PPK-LIPI.
- BPS Kabupateb Alor 2003. *Statistik Pertanian Kabupaten Alor 2003*. Alor: BPS Kabupaten Alor.

- BPS Kabupateb Alor 2004. *Alor Dalam Angka 2004*. Alor: BPS Kabupaten Alor.
- Birowo, T dkk 1993. "Bentuk-bentuk Pengorganisasian Produksi Pertanian", dalam U. Planck (Ed.), *Sosiologi Pertanian*. Hlm. 68--122 Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..
- Dillon, H.S. 1999. *Pertanian Membangun Bangsa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Iskandar, Johan 2006. "Metodologi Memahami Petani dan Pertanian". Dalam *Jurnal Analisis Sosial*, XI:1. Bandung: AKATIGA.
- Kompas 2007. "Impor Beras Tetap Akan Dipaksakan". 2007. *Kompas*, Kamis, 13 Oktober: 17. Jakarta.
- Kompas 2007. "Tradisi Reba, Bukan Sekadar Reuni". 2007. *Kompas*, 12 Februari: 40. Jakarta.
- Matias, P., dan D. Ernanto 2008. "Empat Kabupaten di NTT Rawan Pangan". *Harian Suara Pembaruan*, 11 Juni. Jakarta.
- PPE-LIPI, 2008. "Membangun Ketahanan Pangan dan Kemandirian Energi: Refleksi Kesiapan Bangsa dalam Menghadapi Krisis", makalah dibacakan pada Refleksi Akhir Tahun Kedeputan IPSK LIPI, 18 Desember 2008.
- Purwantini, Tri B., Ariani, M., dan Marisa, Y., t.t. "Analisa Kerawanan Pangan Wilayah dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur)". (<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/mono26-4.pdf>, diakses 21 April 2009).
- Rungkat-Zakaria, Fransiska 2006. "Ketahanan Pangan sebagai Wujud Hak Asasi Manusia atas Kecukupan Pangan". Dalam B. Krisnamurti dkk (Ed.), *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Hlm. 236--270. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sale, Kirkpatrick tt. "Revolusi Hijau: Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di AS".

(<http://www.usembassyjakarta/rev.hijau.html/>, diakses 14 Oktober 2005).

Santosa, Dwi Andreas 2004. "Bioteknologi Pertanian, Harapan bagi Si Miskin". (<http://www.kompas.com/kompascetak/0408/04/ilpeng/1183488.htm>, 24 Agustus, diakses 14 Oktober 2005).

Welirang, F. 2006. "Jalan Tengah Sempurna Ketahanan Pangan Indonesia Tepung Sebagai Solusi Pangan Masa Depan". Dalam B. Krisnamurti dkk (Ed.), *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Hlm. 182--202. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

World Bank 2008. *Pertanian untuk Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Salemba.

BAB II

SINERGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN STRATEGI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Oleh: Sudyono

2.1 Pendahuluan

Daerah Kabupaten Alor dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki panorama alam yang indah, terutama perairan laut dengan terumbu karang dan biota laut lainnya. Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan yang berbukit-bukit. Pulau-pulau itu berserakan menyembul di permukaan laut, membentuk pemandangan yang indah. Tanah yang berwarna putih, merah, dan kecoklatan berbau dengan tanaman meranggas di musim kemarau, seolah bunga-bunga yang menambah keindahan alam Kepulauan Alor.

Dibalik keindahan alamnya, Alor dikenal juga sebagai salah satu daerah yang mengalami kerawanan pangan di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).¹ Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah desa dan jumlah jiwa berdasarkan tingkat risiko rawan pangan di masing-masing kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan 14 Juni 2005, menyebutkan bahwa Kabupaten Alor yang memiliki 174 desa, sejumlah 8 desa, dinyatakan aman. Sebanyak 113 desa masuk dalam kategori mengalami rawan pangan dalam tingkat rendah dan mengancam sejumlah 8.621 jiwa. Sementara itu, 53 desa berada

¹ Wilayah lain di NTT yang mengalami rawan pangan adalah Kabupaten Lembata, Rote Ndao, dan Sumba Barat Daya. Kepala Bimas Ketahanan Pangan (P2KP) NTT, Petrus, menyebutkan bahwa berdasarkan survei yang telah dilakukan menunjukkan produksi panen menurun. Akibatnya, hasil produksi pangan tidak mencukupi kebutuhan pangan penduduk (Suara Pembaruan, 11 Juni 2008).

dalam ancaman rawan pangan risiko sedang dan mengancam 9.127 jiwa. Artinya, wilayah desa di Kabupaten Alor yang masuk dalam kategori aman dari rawan pangan hanya sebesar 5% selebihnya desa-desa tersebut berpotensi rawan pangan, baik berisiko ringan maupun sedang. Bila kondisi ini tidak ditangani secara serius, maka kerawanan pangan berisiko tinggi bisa saja menimpa penduduk (Matias dan Emanto, 2008).

Tahun 2006 diberitakan bahwa sebanyak 6.000 kepala keluarga (KK) di Alor terancam rawan pangan, dengan korban tersebar di 82 desa pada 17 kecamatan. Terjadinya ancaman rawan pangan karena turunnya produksi pangan pada musim panen tahun 2006. Penurunan produksi itu merupakan dampak dari bencana angin ribut dan kelebihan curah hujan, sehingga merusak semua jenis tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan (*Kompas*, 19 Juni 2006).

Laporan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor tahun 2009, menyebutkan bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Alor, 178.974 jiwa, tahun 2008, sebanyak 31.254 jiwa atau sebesar 17,46% menderita rawan pangan meskipun baru pada tingkat rendah dan sedang. Sebanyak 1.395 KK atau sekitar 4.185 jiwa berada di Kecamatan Alor Barat Laut yang merupakan lokasi penelitian ini, mengalami rawan pangan tingkat rendah. Dari jumlah itu, penduduk di Desa Alila yang menderita kerawanan pangan tingkat rendah berjumlah 77 KK atau sekitar 231 jiwa (Rekapitulasi Data Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Alor, 2008). Akibat rawan pangan di Kecamatan Alor Barat Laut, sebanyak 97 anak usia balita menderita kurang gizi dan 32 anak mengalami gizi buruk (Hasil Rekapitulasi Laporan Balita Tingkat Puskesmas Kokar, Juni 2009).

Kompleksitas masalah ketahanan pangan semakin rumit, bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola makan dari jagung ke beras, padahal daerah ini bukan penghasil padi. Pergeseran pola makan ini akan berakibat vital bagi masyarakat Alor apabila terjadi

krisis pangan karena kesulitan dalam pengadaan beras. Kekhawatiran ini telah mendorong Pemerintah Kabupaten Alor untuk merumuskan kebijakan peningkatan ketahanan pangan. Upaya itu didorong oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah yang menggariskan bahwa ketahanan pangan adalah salah satu strategi pembangunan pertanian daerah, diarahkan pada upaya menjamin tersedianya pangan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat, baik melalui diversifikasi pangan, intensifikasi, pembudidayaan pertanian rakyat, dan kinerja lain yang dapat meningkatkan kinerja produksi pangan di daerah, serta mengakhiri ketergantungan pangan rakyat pada beras.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor telah menggariskan beberapa program kegiatan melalui Gerakan Nasional Kembali ke Desa dan Pertanian (Gerbadestan) yang dicanangkan pada 1 April 1999 oleh Bupati Alor Ans Takalapeta. Beberapa program kegiatan yang harus dijalankan antara lain (1) Peningkatan produksi tani melalui usaha diversifikasi dan intensifikasi usaha tani yang dalam arti luas mencakup peternakan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan; (2) Pengadaan dan peningkatan akses pangan kepada keluarga miskin melalui program pengentasan kemiskinan; (3) Program pemberian makanan tambahan; (4) Pengadaan bantuan pangan dalam situasi darurat, seperti bencana alam dan serangan hama yang dapat mengakibatkan gagal panen; (5) Promosi penganekaragaman pola makan. Dari kelima kegiatan tersebut, program yang akan dikaji dalam tulisan ini dibatasi pada poin 1, 2, dan 3. Pertimbangannya adalah ketiga program tersebut dilakukan secara rutin oleh sejumlah instansi pemerintah terkait, serta implementasi program pengentasan kemiskinan yang sedang digalakkan pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana ketiga program tersebut diimplementasikan, seberapa besar kebijakan tersebut dapat menjawab persoalan kerawanan pangan yang selama ini menjadi persoalan rutin yang dihadapi masyarakat, manfaat apa yang dirasakan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan

peningkatan kemampuan mengakses pangan, serta bagaimana strategi masyarakat sendiri untuk meningkatkan ketahanan pangannya. Kajian ini penting untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan pada tingkat desa serta berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan pangannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan daerah, terutama di Kabupaten Alor.

Daerah penelitian adalah Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Desa Alila dipilih secara purposif berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa instansi terkait, seperti Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Pertanian Provinsi NTT, Dinas Sosial Kabupaten Alor, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor. Sejumlah informasi dan data yang diperoleh menegaskan bahwa Desa Alila ini merupakan daerah miskin dan penduduknya sering dilanda bencana alam, termasuk rawan pangan.²

Menghindari salah persepsi tentang ketahanan pangan, perlu dikemukakan pengertian dan definisi ketahanan pangan itu sendiri. Selama ini, berbicara soal ketahanan pangan sering rancu dengan pengertian swasembada pangan. Umumnya, pangan ditafsirkan secara lebih sempit lagi, yakni beras. Tentu bukan itu yang dimaksud. Dalam dunia perdagangan, pangan meliputi beras, jagung, sagu, kacang-kacangan, umbi-umbian, daging, susu, ikan, telur, buah-buahan, sayuran, minyak goreng, lemak, aneka ragam minuman, bahkan sampai pemenuhan kebutuhan pemuas seperti rokok (Anwar dkk, 1995: 172). Istilah ketahanan pangan (*food security*) mulai populer

² Disadari bahwa penelitian di tingkat desa akan dihadapkan pada keterbatasan data sekunder. Kendatipun demikian, hal ini tidak menghalangi kegiatan penelitian termasuk untuk melihat langsung implementasi program peningkatan ketahanan pangan pada tingkat desa melalui wawancara mendalam kepada penduduk, instansi terkait yang terlibat, dan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

disebut sejak krisis pangan dan kelaparan terjadi pada awal dekade 70-an. Pada awalnya, ketahanan pangan terbatas pada kondisi pemenuhan kebutuhan pangan pokok (Heryana, 2001: 5). Berdasarkan kesepakatan pada *International Food Summit* dan *International Conference of Nutrition* 1992/1993 FAO (1997), pengertian ketahanan pangan diperluas menjadi kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang setiap saat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Pengertian ketahanan pangan yang terakhir ini bersifat holistik dan mengandung makna yang selaras dengan paradigma baru kesehatan. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pangan. Dalam UU tersebut ditekankan bahwa pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga dalam jumlah yang cukup mutu dan gizi yang terjangkau, aman dikonsumsi, merata, serta terjangkau oleh setiap individu.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa makna yang terkandung dalam pengertian ketahanan pangan mencakup dimensi fisik pangan (ketersediaan), dimensi nilai-nilai budaya dan religi (pola pangan yang sesuai untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, serta halal), dimensi keamanan pangan (kesehatan), dan dimensi waktu (tersedia secara berkesinambungan). Di antara dimensi-dimensi itu, hal yang paling penting dalam ketahanan pangan adalah akses memperoleh pangan oleh masyarakat atau rumah tangga secara ekonomi maupun fisik. Akses secara ekonomi berarti bagaimana meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja di luar sektor pertanian pun kalau perlu harus didorong oleh pemerintah (Gafar, 2007: 10–11).

2.2 Kondisi Daerah Penelitian dan Ketersediaan Pangan

Subbab ini membahas lokasi penelitian sebagai wadah yang membongkai masalah kerawanan pangan yang dihadapi oleh masyarakat. Uraianya meliputi kondisi geografi, sosial dan ekonomi masyarakat, serta ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Alor. Seperti telah disebutkan pada uraian yang terdahulu, kondisi daerah

penelitian menyangkut seting wilayah di tingkat desa dan kecamatan yang tidak mungkin diuraikan karena ketiadaan data tertulis. Dengan kendala tersebut, data untuk menggambarkan seting wilayah penelitian menggunakan data tingkat kabupaten dengan asumsi bahwa data itu dianggap dapat mewakili kondisi desa. Pertimbangannya adalah adanya kesamaan kondisi ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Sementara untuk menggambarkan kondisi geografi Desa Alila hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pengamatan.

2.2.1 Kondisi Geografi

Luas wilayah Kabupaten Alor adalah 286.464 ha, terdiri dari 17 kecamatan. Secara geografis, Kabupaten Alor merupakan daerah pegunungan tinggi yang dikelilingi wilayah pesisir berupa tanah datar yang tipis di bibir pantai dan lautan. Tingkat keterlerangan di atas 40% ini seluas 63,34% dari wilayah di Kabupaten Alor (BPS, 2008: 3-5). Sementara itu, Kecamatan Alor Barat Laut memiliki luas wilayah 10.485 ha atau sekitar 3,66% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Alor.

Daerah perbukitan kapur dengan lapisan tanah yang tipis (*top-soil*) merupakan kendala alam dalam pengembangan usaha pertanian. Hal ini masih diperburuk oleh hari hujan yang singkat, yang berlangsung hanya dalam 133,3 hari per tahun, dengan curah hujan yang rendah pula. Curah hujan yang tergolong tinggi jatuh pada bulan Februari sebesar 231,3 mm. Bencana alam yang silih berganti, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, serangan hama, semakin menunjukkan betapa kerasnya kondisi alam di Kabupaten Alor.

Secara hidrologi, daerah Kabupaten Alor tidak memiliki berbagai sumber air tanah yang dapat menunjang kegiatan pertanian, seperti danau, sungai, dan waduk. Kendati demikian, di Dusun Bota pada lokasi Ate, berjarak 15 km dari Dusun Bota, terdapat sumber air tanah yang turun dari perbukitan, namun langsung masuk ke bawah

tanah dan mengalir ke laut. Sumber air ini sudah dicoba dialirkan dengan menggunakan sumur bor, tetapi hingga kini penduduk belum dapat memanfaatkannya. Sumber air tanah yang lain yang terdapat di Dusun Bota berupa empang abadi seluas 50 m x 50 m. Sumber air ini banyak dimanfaatkan penduduk untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Di Dusun Beharuin dan Dusun Tulta, keduanya merupakan permukiman penduduk yang berada di daerah perbukitan tanah kapur yang tandus, tidak ditemukan sumber air tanah. Penduduk membuat sumur galian untuk menampung air hujan. Selain itu, air hujan ditampung dalam bak-bak penampungan air hujan. Hasil dari penampungan air hujan ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti masak, mencuci, dan mandi. Pada saat kemarau panjang, kekurangan air bersih merupakan masalah rutin yang dihadapi penduduk di kedua dusun tersebut. Untuk mengatasi hal itu, penduduk turun ke pantai dengan berjalan kaki sekitar 5–6 km untuk mencari air bersih. Dengan menggunakan jeriken, mereka mengambil air dari rumah-rumah penduduk yang memiliki sumber air tanah yang tidak kering di Dusun Bota atau dapat mengambil air baik di bak penampungan air di Kokar dekat pasar maupun di bak-bak penampungan air bersih di sekitar Puskesmas Kokar. Sumber air yang berada di Kokar ini berasal dari mata air di perbukitan Kokar yang disalurkan menggunakan pipa ke bak-bak penampung yang ada di Kokar.

Kendatipun kedua dusun tersebut merupakan daerah perbukitan, konsentrasi kegiatan pertanian penduduk Desa Alila dilakukan di lokasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan sejarah asal-usul penduduk Desa Alila yang berasal dari Dusun Tulta. Dusun Tulta itu sendiri berstatus sebagai Desa Induk. Dapat dimengerti bila penduduk Dusun Bota yang bermukim di kawasan pesisir pantai masih memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk Dusun Tulta, di samping mereka masih banyak yang memiliki warisan berupa tanah ladang di Dusun Tulta.

2.2.2 Pemanfaatan Lahan

Kendatipun wilayah Kabupaten Alor merupakan daerah kepulauan, orientasi masyarakat masih lebih ke darat. Cerita menyangkut mitologi asal-usul dan perjalanan nenek moyang mereka lebih banyak berhubungan dengan wilayah daratan. Mereka hidup sebagai petani lahan kering. Adapun struktur tata guna lahan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Struktur Tata Guna Lahan di Kabupaten Alor

No.	Jenis Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Sawah berpengairan teknis	186,00	0,07
2.	Sawah berpengairan setengah teknis	232,00	0,08
3.	Sawah berpengairan sederhana	1.514,25	0,53
4.	Sawah berpengairan non-PU	1.407,25	0,49
5.	Tanah pekarangan	4.170,04	1,46
6.	Tegalan/kebun	16.513,20	5,79
7.	Ladang huma	23.513,25	8,24
8.	Padang rumput	21.082,30	7,39
9.	Perkebunan	29.937	10,49
10.	Empang	1,00	0,02
11.	Rawa	1,00	0,04
12.	Tambak	7,50	0,03
13.	Hutan rakyat	39.766,48	13,95
14.	Hutan Negara	23.156,54	8,11
15.	Tidak diusahakan	104.659,62	36,67
16.	Lain-lain	19.831,43	6,95
Jumlah		285.414,99	100

Sumber: Kabupaten Alor dalam Angka, 2008.

Angka-angka dalam Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar lahan berupa perbukitan tanah kapur yang tidak memungkinkan untuk digarap sebagai lahan pertanian. Sementara itu, lahan yang bisa diusahakan untuk pengembangan usaha pertanian berupa tegalan, pekarangan, ladang huma, dan sawah yang luasnya jauh di bawah hutan negara, hutan rakyat, dan tanah yang tidak bisa

dusahakan. Angka ini mengindikasikan sempitnya lahan pertanian yang bisa diusahakan oleh petani. Kondisi ini memiliki korelasi dengan produksi pertanian dan tingkat produktivitas lahan pertanian.

2.2.3 Produksi Pertanian

Produksi pertanian di Kabupaten Alor terdiri dari berbagai macam produk pertanian, antara lain tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hutan rakyat. Produksi dari tanaman pangan tersebut disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Alor Tahun 2007

No.	Jenis Produksi Pangan	Total Produksi (ton)	Ekuivalen beras (ton)
1	Padi	11.954,300	7.770,295
2	Jagung	12.907,300	12.383,391
3	Ubi kayu	17.801,600	4.767,268
4	Ubu jalar	1.798,400	466,685
5	Kacang tanah	94,000	140,304
6	Kedelai	212,800	232,548
7	Kacang hijau	2,800	2,639
Jumlah		56.805,500	33.533,425

Sumber: Kabupaten Alor dalam Angka Tahun 2007.

Bila kebutuhan beras per kapita sebesar 148 kg per tahun, sementara penduduk Kabupaten Alor berjumlah 178.974 jiwa, maka akan dibutuhkan sebanyak 26.488,152 kg beras. Volume produksi pangan yang diekuivalenkan dengan beras seperti Tabel 2.2 apabila dibandingkan dengan kebutuhan pangan penduduk sudah tergolong surplus. Produk ini belum termasuk dari sektor perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Andai kata data itu benar dan pola makan masyarakat Alor biasa mengonsumsi aneka ragam pangan, maka pengadaan pangan dari daerah lain tidak lagi diperlukan.

Sementara itu, berdasarkan data laporan analisis neraca bahan makanan (NBM) Kabupaten Alor tahun 2008, disebutkan bahwa pengadaan beras di Kabupaten Alor tahun 2007 tercatat sebesar 13.311 ton. Pengadaan beras itu berasal dari produksi sendiri sebanyak 4.729 ton, sedangkan sisanya sebanyak 9.600 ton yang didatangkan dari daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Volume pengadaan beras yang jumlahnya 2 (dua) kali lipat dari produksi sendiri, mengindikasikan kecenderungan adanya pergeseran pola makan penduduk.

Selanjutnya, dari sisi tingkat produktivitas lahan rata-rata per ha dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Tingkat Produktivitas Lahan Pertanian Rata-rata Per Ha

No.	Jenis tanaman	Kabupaten Alor	Kecamatan Alor Barat Laut	Desa Alila
1	Padi	2,861 ton	1,600 ton	1,600 ton
2	Jagung	2,717 ton	2,600 ton	2,700 ton
3	Ubi kayu	6,371 ton	6,400 ton	6,400 ton
4	Ubi jalar	4,834 ton	4,900 ton	4,900 ton
5	Kacang tanah	0,870 ton	1,500 ton	-
6	Kacang hijau	0,560 ton	0,900 ton	0,900 ton

Sumber: Alor dalam Angka 2008 dan Kecamatan Alor Barat Laut dalam Angka Tahun 2008.

Angka-angka pada Tabel 2.3 menunjukkan bahwa untuk jenis tanaman palawija, tingkat produksi lahan per ha, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa rata-rata relatif sama. Sementara untuk produksi padi, baik di tingkat kecamatan maupun desa jauh lebih rendah bila dibanding dengan produksi di tingkat kabupaten. Kalau data tersebut benar, diduga bahwa tingkat kesuburan lahan pertanian di Kecamatan Alor Barat Laut dan Desa Alila jauh lebih rendah dibanding dengan tingkat kesuburan lahan rata-rata di Kabupaten Alor. Kecenderungan lain, petani di luar Desa Alila sudah banyak memanfaatkan sarana produksi yang ada, seperti penggunaan

bibit varietas unggul, pupuk kimia, serta melakukan pemeliharaan tanaman sesuai dengan anjuran PPL. Sementara petani di Desa Alila masih menggunakan tanaman varietas lokal, seperti jagung lokal, dan padi lokal, yakni padi merah, padi hitam, dan padi putih. Selain itu, kegiatan pembinaan oleh tenaga penyuluh yang masih rendah dan ketiadaan sarana produksi (saprodi) sebagai penunjang usaha tani, juga menjadi faktor pendorong rendahnya produktivitas petani di Desa Alila. Semua jenis tanaman ditanam tanpa menggunakan pupuk kimia dan pupuk kandang, sehingga tingkat produksinya rendah.

Seperti telah disinggung pada uraian yang terdahulu, produktivitas lahan yang rendah mendorong pemerintah daerah mendatangkan kebutuhan pangan dari daerah lain atau mengimpor guna memenuhi kebutuhan pangannya, terutama kebutuhan sayur-sayuran, beras, terigu, dan buah-buahan.

Selain produksi pangan tersebut, untuk menunjang akses terhadap kebutuhan pangan, petani juga menghasilkan berbagai macam produk perkebunan rakyat sebagaimana tampak pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Hasil Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2006

No.	Jenis Tanaman	Wujud Produksi	Produksi (Ton)
1.	Kelapa	Kopra	930,90
2.	Kopi	Biji kopi kering	17,66
3.	Pinang	Irisan pinang	88,90
4.	Jambu mete	Buah polong	1.451,03
5.	Vanili	Buah polong	50,65
6.	Cengkeh	Bunga	26,47
7.	Kemiri	Biji kemiri	3.060,42
8.	Lada	Biji kering	0,08
9.	Kakao	Biji kering	1,19
10.	Pala	Biji pala kering	0,24
11.	Kapuk	Kapas kering	107,60
Jumlah			5.735,14

Sumber: Statistik Pertanian Kabupaten Alor, 2008.

Aneka jenis produksi perkebunan rakyat merupakan sumber pendapatan ekonomi rumah tangga petani di Kabupaten Alor setelah sumber pendapatan utama dari produksi tanaman pangan. Khusus petani Desa Alila, produk unggulannya adalah buah kemiri, biji mete, dan buah pinang. Biji buah mete ditanam pada pekarangan rumah, sedangkan pinang dan kemiri merupakan hasil perkebunan rakyat yang ditanam di tanah ulayat Suku Kabola. Jumlah produksi kedua komoditas ini tidak diketahui karena data di tingkat desa dan kecamatan tidak tersedia. Menurut Pemerintah Kabupaten Alor, perkebunan di tanah ulayat tersebut merupakan hutan negara.

2.2.4 Ketersediaan Pangan

Uraian sebelumnya menyebutkan bahwa sesungguhnya Kabupaten Alor tergolong surplus pangan dari sisi penyediaan pangan melalui produksi pertanian yang sudah ada. Pernyataan ini juga didukung oleh data mengenai ketersediaan pangan. Untuk lebih jelasnya, data mengenai ketersediaan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Alor Tahun 2008

No.	Jenis Pangan	Jumlah Ton	Asal Pangan
1.	Gandum	1.800	Impor
2.	Beras	13.311	9600 ton didatangkan dari luar
3.	Jagung	20.250	Produksi sendiri
4.	Umbi-umbian	29.295	Produksi sendiri
5.	Buah-buahan	2.675	Produksi lokal dan didatangkan dari luar
6.	Sayur-sayuran	n.a	Didatangkan dari luar
7.	Daging	377	Produksi sendiri
8.	Susu	8	Impor
9.	Ikan	4.339	Produksi sendiri

Sumber: Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Alor Tahun 2008.

Angka dalam Tabel 2.5 menunjukkan kecenderungan adanya perubahan pola makan penduduk dari jagung ke beras dan terigu. Sepanjang pergeseran pola makan ini diikuti peningkatan pendapatan keluarga yang dari sisi keterjangkauan sesungguhnya tidak ada masalah. Timbul persoalan ketika pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan.

Demikian juga dari sisi ketersediaan pangan dan gizi. Data yang ada menunjukkan surplus. Standardisasi Angka Kecukupan Pangan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan energi (kalori) yang harus tersedia adalah 2.200 kilo kalori/orang/hari (kkal/org/hr). Berdasarkan hasil olahan data NBM tahun 2008, dari kontribusi 11 kelompok bahan pangan, energi yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kabupaten Alor telah melebihi standar AKG. Ketersediaan kalori rata-rata 2.764 kkal berasal dari sumber hewani, 251,22 kkal sumber nabati, 1.696,96 kkal berasal dari kelompok padi-padian, dan sebesar 586,09 kkal berasal dari makanan berpati. Adapun kontribusi energi hewani terbesar dari kelompok daging sebesar 2,81 kkal dan ikan sebesar 110,82 kkal.

Sementara tingkat ketersediaan protein adalah 57 gram/hari. Protein yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kabupaten Alor berada di atas standar AKG. Berdasarkan tabel analisis NBM Kabupaten Alor sebesar 77,63 gram/orang/hari, sumbangan protein dari unsur nabati sebesar 50,39 gram/orang/hari, dan unsur hewani sebesar 23,24 gram/orang/hari. Kontribusi protein nabati terbesar dari kelompok padi-padian sebesar 43,09 gram/orang/hari. Kelompok buah biji berminyak sebesar 2,44 gram/orang/hari, dan makanan berpati sebesar 3,81 gram/orang/hari. Sedangkan kontribusi protein hewani terbesar berasal dari kelompok ikan sebesar 21,31 gram/orang/hari, kelompok daging sebesar 1,22 gram/orang/hari, dan kelompok telur sebesar 0,58 gram/orang/hari.

Adapun tingkat ketersediaan lemak adalah 45 gram/orang/hari. Berdasarkan olahan data NBM sampai dengan tahun 2008, dari kontribusi 11 kelompok bahan makanan, lemak yang

tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Alor belum mencapai standardisasi AKG. Hasil analisis NBM di Kabupaten Alor menunjukkan tingkat ketersediaan untuk lemak sebesar 0,13 gram/orang/hari. Angka ini masih jauh dari kebutuhan lemak yang diperlukan sesuai dengan standar kecukupan gizi tersebut (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor, 2008: 7-8).

Adapun realitas di lapangan menunjukkan bahwa pola makan penduduk Desa Alila yang terdiri dari nasi, atau nasi dicampur jagung dan sayur bening daun kelor yang diberi garam dan penyedap mecin yang dilakukan secara berulang-ulang³ menunjukkan kurangnya asupan gizi dalam menu makanan mereka. Hal ini bukan semata-mata karena mereka tidak tahu jenis makanan bergizi sesuai dengan anjuran yang setiap saat disuluhkan ketika kegiatan penimbangan balita dan pemeriksaan ibu hamil berlangsung, tetapi lebih menyangkut rendahnya pendapatan penduduk.

2.2.5 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diklasifikasikan sebagai keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III +, maka sebagian besar masyarakat Alor tergolong sebagai masyarakat Prasejahtera. Persentasenya mencapai 56,20% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Alor seperti tampak pada Tabel 2.6.

Kesejahteraan masyarakat pada tingkat Kecamatan Alor Barat Laut menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda. Apabila persentase Prasejahtera digabung dengan Sejahtera I, angkanya mencapai 87,23%. Penggabungan ini berdasarkan pertimbangan bahwa tingkat Sejahtera I kondisinya tidak stabil, sehingga apabila terjadi sesuatu, misalnya gagal panen karena kekeringan, serangan hama, banjir, tanah longsor, dan sebagainya, posisi itu akan bergeser

³ Wawancara dengan sejumlah tenaga medis di Puskesmas Kokar

dan merosot ke level Prasejahtera. Bila angka-angka dalam Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 diperbandingkan, maka dari 43.137 jumlah KK di Kabupaten Alor, sebanyak 23.647 KK atau sebesar 54,82 % KK berada pada strata Prasejahtera. Sementara dari 4.763 jumlah KK di Kecamatan Alor Barat Laut, sebanyak 2.447 KK atau sebesar 51,38% berada pada strata Prasejahtera.

Tabel 2.6 Banyaknya Keluarga Menurut Klasifikasi Keluarga Sejahtera di Kabupaten Alor dan Kecamatan Alor Barat Laut Tahun 2008

No	Tingkat Kesejahteraan	Kabupaten Alor		Kecamatan Alor Barat Laut	
		Jumlah KK	%	Jumlah KK	%
1	Prasejahtera	23.647	56,20	2.447	52,16
2	Sejahtera I	11.881	28,24	1.645	35,07
3	Sejahtera II	4.994	11,87	507	10,81
4	Sejahtera III	1.095	2,60	92	1,96
5	Sejahtera III +	454	1,08	-	-
Jumlah		42.067	100%	4.691	100

Sumber: Kabupaten Alor dalam Angka Tahun 2008 dan Kecamatan Alor Barat Laut dalam Angka 2008.

Selanjutnya, status sosial ekonomi keluarga juga bisa diketahui melalui jumlah warga/KK yang terdaftar sebagai penerima Program Pengentasan Kemiskinan di Kantor BPS Kabupaten Alor tahun 2008. Tabel 2.7 menampilkan penerima program yang dimaksud.

Tabel 2.7 Daftar Keluarga yang Menerima Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Alor 2008

No.	Tingkat Pemerintah	Jumlah KK	Raskin	%	BLT	%	PKH	%
1.	Kab. Alor	43.137	26.670	61,83	28.843	66,86	-	-
2.	Kec. ABL	4.763	3.231	67,04	3.717	78,04	-	-
3.	Desa Alila	209	132	63	163	78	91	41

Sumber: Biro Pusat Statistik Kabupaten Alor 2008.

Berdasarkan data-data yang disajikan dalam beberapa tabel di atas, mengindikasikan bahwa kerawanan pangan sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang tergolong miskin. Bertolak dari fakta itu, dapat dipahami bahwa masalah ketahanan pangan di Kabupaten Alor bukan terletak pada kemampuan pemerintah daerah menyediakan stok pangan, tetapi lebih pada ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengakses pangan yang ada. Lalu, bagaimana Pemerintah Kabupaten Alor mengatasi persoalan ini dan bentuk-bentuk intervensi apa yang dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat meningkat, sehingga masyarakat kelompok miskin ini memiliki kemampuan mengakses pangan? Uraian berikut mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

2.3 Kebijakan Pemerintah dan Implementasi

Dengan kondisi geografi yang ada, sesungguhnya petani di Kabupaten Alor telah melakukan adaptasi ekologi dalam mengatasi ketidakpastian yang dihadapinya agar mereka dapat tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ketidakpastian yang dimaksud tersebut antara lain iklim yang tidak menentu, curah hujan yang sedikit dan berlangsung dalam waktu yang pendek, hama dan bencana alam yang datang silih berganti, serta kondisi tanah dan alam perbukitan yang tidak memungkinkan tumbuhnya beraneka ragam tanaman pertanian dengan baik. Namun, diversifikasi usaha tani dan pola makan yang beragam merupakan hasil dari pola adaptasi ekologi tersebut. Kondisi demikian telah diapresiasi oleh pemerintah daerah melalui program Gerbadestan yang dicanangkan oleh Bupati Alor pada tanggal 1 April 1999. Program ini berlanjut pada periode 2004--2009 yang diperluas untuk pengembangan sektor kelautan. Bentuk konkret dari program ini adalah kegiatan upaya peningkatan produksi tani melalui usaha intensifikasi, diversifikasi, pengembangan agrobisnis dan agroindustri dengan introduksi teknologi pengolahan produksi pertanian (*agroprocessing*). Selain itu, berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberian makanan tambahan kepada

ibu hamil dan anak balita merupakan program-program yang langsung dapat meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.

2.3.1 Implementasi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan di Tingkat Desa

Berbagai program kegiatan untuk dapat meningkatkan produksi pertanian telah ditempuh pemerintah. Kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat telah dilakukan dengan melakukan pengolahan pascapanen terhadap semua hasil pertanian agar memiliki nilai tambah sekaligus menciptakan peluang kerja. Untuk dapat meningkatkan daya beli terutama pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah sekaligus mendekatkan pengadaan pangan, pemerintah telah melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, penyaluran beras miskin (raskin), dan melalui kegiatan rutin penimbangan balita setiap bulan yang disesuaikan dengan pemberian makanan tambahan.

Uraian di bawah ini akan mencoba menjelaskan implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa.

(1) Program Peningkatan Produksi

Pengembangan usaha tani di daerah perbukitan lahan kritis telah dilakukan dengan merehabilitasi lahan dan penerapan sistem terasering. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, pemerintah telah mengintroduksi sejumlah tanaman *leguminosae* atau *multi-purpose trees* agar secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara ekologi dapat meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan.

Usaha rehabilitasi lahan kritis sudah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya tahun 1982-1983, dengan melakukan pembuatan terasering dan penanaman lamtoro. Selain

berguna untuk penahan erosi, buah dan biji lamtoro juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan sayur-sayuran. Batang dan rantingnya dapat digunakan sebagai kayu bakar dan bahan bangunan. Tanaman ini memiliki energi yang tinggi.

Tanaman lamtorogung dipilih selain karena sifat perakarannya yang mampu menahan erosi, juga karena lamtoro mudah tumbuh pada lahan kritis dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Program ini dilaksanakan dengan model padat karya agar dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang kurang terdidik dan berpendapatan rendah. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan ini paling tidak dapat memperoleh tambahan pendapatan bagi rumah tangga, sehingga diharapkan akan terhindar dari ancaman kerawanan pangan.

Tanaman lamtoro sebagai hasil dari kegiatan itu kini telah tumbuh lebat sejauh kurang lebih 5 km, yaitu sepanjang Dusun Beharuin menuju Dusun Tulta. Keberhasilan program ini patut dibanggakan sebab kebutuhan bahan bakar masyarakat dapat terpenuhi. Bila tidak demikian, maka masyarakat akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar itu. Secara ekologi pun, proses degradasi lingkungan tidak akan bisa dicegah bila program ini tidak dilakukan. Sementara dari sisi ekonomi, tanaman ini telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mengembangkan ternak kambing dan sapi kendatipun pemanfaatannya belum optimal.

Upaya meningkatkan produksi pertanian juga telah dilakukan, yaitu dengan memberikan pembinaan dan pelatihan secara intensif melalui pembuatan areal percontohan (*dempplot*) seluas 0,5 ha, berlokasi di Dusun Bota. Usaha ini dilakukan menjelang kejatuhan pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1997/1998. Masyarakat mengakui bahwa kegiatan penyuluhan pertanian dan peternakan cukup aktif dilakukan pada saat itu. Bahkan, studi banding ke daerah lain juga pernah dilakukan, salah satunya adalah studi banding dalam upaya pengembangan usaha peternakan ayam buras di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Tahun berikutnya, Proyek UNDP 1999--2002 melakukan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, dan usaha perbengkelan. Sejumlah kelompok tani (pokmas) telah dibentuk dan kegiatan pelatihan telah diselenggarakan. Manfaat langsung yang dirasakan petani dalam kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan di bidang elektronika. Dengan berbekal keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan perbengkelan itu, kini salah seorang warga desa telah membuka usaha bengkel motor. Langgan usaha bengkel ini adalah para pemilik sepeda motor dengan jumlah sepeda motor mencapai 30 unit.

Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Alor juga telah menyalurkan subsidi pupuk sebanyak 50 kg TSP, 50 kg urea, dan bantuan bibit jagung varietas bisma sebanyak 5 kg rata-rata per ha tahun 2004. Varietas bibit ini diterima masyarakat karena keunggulannya yang tahan terhadap kekeringan dan serangan hama belalang.

Tahun 2005 pun, melalui program kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), Dinas Kehutanan memperkenalkan pengembangan tanaman jambu mete seluas 25 ha. Bantuan bibit diberikan kepada 25 orang petani, masing-masing petani menerima 100 bibit pohon jambu mete. Kini, tanaman jambu mete hasil dari kegiatan tersebut sudah mulai berbunga.

Pada tahun itu juga, pemerintah melalui Program Nasional Pengembangan Energi Alternatif mengembangkan tanaman jarak seluas 25 ha yang berlokasi di Luitbang, Desa Alila. Petani yang terlibat sebanyak 25 orang. Petani ini kemudian memperoleh pembekalan menyangkut teknik budi daya tanaman jarak di Gedung Golkar Kabupaten Alor tahun 2007. Program ini juga sudah mempersiapkan mesin pemroses buah jarak di Gedung Yayasan Undala Kabupaten Alor. Gedung pengolahan jarak juga sudah dibangun di Kokar. Akan tetapi, kelanjutan dari program nasional itu belumlah jelas hingga penelitian ini dilakukan (2009). Akibatnya,

petani sudah menebang hampir semua tanaman jarak yang ada karena tanaman tersebut menaungi tanaman pangan.

Pada tahun 2007, pengembangan tanaman jambu mete kembali dilakukan di lahan seluas 30 ha di Dusun Beharuin atas swadaya masyarakat sendiri. Pengembangan tanaman ini dilakukan di bawah binaan seorang warga setempat lulusan Universitas Negeri Kupang jurusan Kesejahteraan Sosial. Ia bekerja sama dengan PT Fores Syammil Group di Jakarta yang bertindak sebagai bapak angkat sekaligus sebagai penampung hasil buah mete. Usaha ini juga bekerja sama dengan LIPI, terutama dalam penerapan teknologi tepat guna pengolahan produk pascapanen. Wujud kerja sama itu berupa bantuan mesin pengupas jambu mete (kacip) sebanyak 2 unit.⁴

Produksi olahan biji jambu mete dalam setahun baru mencapai 500 kg. Olahan jambu mete ke depannya sedang dirancang, seperti pembuatan minuman sirup, abon, dan pengolahan minyak jambu mete. Usaha rintisan pengolahan biji jambu mete telah menyerap 7 (tujuh) orang pekerja. Pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) ini mendapat bantuan modal dari program kegiatan *agroprocessing* sebesar Rp 25 juta melalui Pokmas Semangat Baru yang beranggotakan sebanyak 15 orang.⁵ Tahun 2007 juga, Dinas Perindustrian bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi NTT telah melakukan pembuatan tambak garam di Dusun Bota. Proyek ini bertujuan untuk menanggulangi penyakit gondok yang banyak diderita masyarakat akibat kekurangan yodium dalam menu makannya.

⁴ Usaha pengembangan jambu mete ini masih memiliki mesin pengupas 1 (satu) unit lagi selain bantuan mesin yang diberikan LIPI. Mesin itu milik pribadi tenaga pendamping pengembangan tanaman jambu mete sekaligus penampung jambu mete daerah setempat.

⁵ Program yang dilakukan pada tahun 2007 sudah membentuk 64 pokmas untuk seluruh Kabupaten Alor. Total dana bergulir yang telah disalurkan sebesar Rp737.500.000,-. Sampai tahun 2009, saldo tagihan per 31 Desember 2008 masih memiliki tunggakan sebesar Rp235.714.894,- (Daftar Realisasi Industri *Agroprocessing*, BPMPD, 2008).

Pada tahun anggaran 2008, Dinas Sosial Provinsi NTT kembali melaksanakan program melalui kegiatan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Untuk mengantisipasi program itu, Desa Alila sudah membentuk 9 (sembilan) pokmas sebagai kelompok binaan. Masing-masing pokmas beranggota 10 (sepuluh) orang. Sosialisasi menyangkut pembinaan kelembagaan pokmas, keterampilan berorganisasi, penguasaan administrasi kegiatan kelompok, kewirausahaan, dan keterampilan teknis pembuatan proposal telah dilakukan kepada pokmas binaan itu. Nama-nama pokmas dan kegiatan yang diusulkan antara lain KUBE Bakau Jaya, KUBE Mahensa, KUBE Melati, KUBE Cahaya Timur 1 dan KUBE Felhey, yang akan mengembangkan ternak kambing. KUBE Ingin Berkembang dan KUBE Sukaman akan mengembangkan usaha ternak ayam. Dua KUBE yang terakhir, yakni KUBE Mahatelang dan KUBE Cahaya Timur 2 akan mengembangkan usaha di bidang jasa perkiosan dan penampungan hasil komoditas perkebunan, terutama jambu mete. Menurut informasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Alor, program ini siap dilaksanakan. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Dinas Sosial akan segera menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada masing-masing pokmas sebesar Rp20.000.000,-

Untuk musim tanam tahun 2009-2010, Dinas Pertanian Kabupaten Alor telah mempersiapkan bantuan bibit dari Cadangan Benih Nasional (CBN) jagung varietas komposit sebanyak 15 ton, ditambah bantuan benih jagung dari pemerintah pusat sebanyak 7.500 kg, dan benih padi gogo 37.500 kg. Melalui tenaga PPL, sosialisasi kepada masyarakat di tingkat desa terkait dengan introduksi benih jagung itu sedang dilaksanakan dan lahan pun sedang dipersiapkan.⁶ Selain program itu, Dinas Pertanian pun sedang menjajaki kemungkinan pengembangan tanaman jagung varietas hibrida bekerja sama dengan PT Pertani di NTT. Dalam tahun yang sama, Dinas Pertanian Propinsi NTT juga sedang merancang Sistem Pertanian

⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Alor, 27 Juli 2009.

Terpadu (*Mix Farming System*), yaitu sistem yang memadukan ternak sapi dengan pengembangan tanaman jagung. Program ini dilakukan dalam rangka mengembalikan citra daerah NTT sebagai daerah sejuta sapi yang kini populasinya sedang mengalami penurunan karena masyarakat petani lebih tergiur untuk mendapatkan uang tunai, sehingga banyak sapi pejantan yang dijual sementara sapi betina dijadikan sebagai kebutuhan untuk pesta adat.⁷

Upaya untuk meningkatkan produksi tani juga dilakukan di Desa Alila, tepatnya di Dusun Beharuin. Pada tahun 2008, PT Arta Graha bekerja sama dengan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT telah melakukan survei mengenai kemungkinan dibukanya lahan sawah berpengairan teknis seluas 400 ha. Sumber air bawah tanah akan diangkat ke permukaan tanah dengan menggunakan sumur bor dan diperkirakan akan mampu mengairi sawah seluas 400 ha. Lahan yang sudah disurvei itu kini tinggal menunggu realisasinya. Untuk itu, lahan tersebut sudah dikosongkan dan tidak lagi diperbolehkan untuk menanam tanaman keras.⁸

Kalau program pengolahan sawah berpengairan teknis ini bisa direalisasikan, maka dari sisi penyediaan pangan tidak lagi bermasalah, sehingga kekhawatiran akan terjadi kerawanan pangan sudah dapat diatasi. Dari sisi keterjangkauan, paling tidak lahan itu akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Tulta, yaitu dengan ikut menggarap lahan pertanian, upah kerja ataupun sistem bagi hasil akan dapat menunjang peningkatan ketahanan pangan bagi kelompok miskin. Namun, ketika informasi tersebut dikonfirmasi dengan Dinas Kimpraswil Kabupaten Alor, mereka tidak mengetahui keberadaan program tersebut. Mereka menduga program itu berasal dari pusat yang bekerja sama dengan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, tetapi tidak melibatkan Dinas Kimpraswil Kabupaten Alor. Staf Dinas Kimpraswil menyatakan memang ada pembuatan sumur bor di

⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Produksi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan NTT, 23 Juli 2009.

⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Alila, 25 Juli 2009.

Bota dengan kapasitas aliran air 10 liter per detik. Bangunan ini sudah dilengkapi dengan saluran-saluran irigasi, namun belum pernah dioperasikan sejak dibangun tahun 2007 hingga sekarang. Permasalahannya adalah (1) Penduduk tidak terbiasa bercocok tanam dengan menggunakan sistem pengairan teknis, (2) Biaya operasional tinggi, sedangkan bahan bakar sulit diperoleh di sekitar Desa Alila, (3) Belum terbentuknya organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air.⁹

Upaya meningkatkan produksi pertanian juga tidak terlepas dari kegiatan pemberdayaan petani. Untuk itu, sejumlah PPL tenaga kontrak sudah dipekerjakan di hampir seluruh desa di kepulauan Alor. Tugas mereka adalah mendampingi dan membimbing petani agar mampu mengembangkan sektor pertanian dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kaidah-kaidah pertanian modern. Namun sangat disayangkan, tenaga PPL ini tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Mereka mengeluh karena gaji yang diterima tidak sesuai dengan tingginya biaya hidup, tidak ditunjang oleh dana operasional, dan tidak didukung oleh prasarana kerja. Untuk menuju ke lokasi penyuluhan, mereka harus melakukannya dengan berjalan kaki karena tidak difasilitasi kendaraan bermotor.

Hal yang dirasakan lebih menyakitkan lagi adalah ketika mereka sudah melakukan pembinaan kelompok, tetapi secara tiba-tiba pemerintah mengintroduksi program baru dan membentuk kelompok penerima program sekaligus penyaluran dananya. Instansi terkait yang memiliki program tersebut sudah memiliki tenaga PPL sendiri yang direkrut oleh pemerintah daerah. Akibat benturan seperti ini, program kerja yang sudah dirancang dan pokmas yang sudah dibentuk oleh PPL tenaga kontrak seakan sia-sia, dilupakan, dan pokmas pun akhirnya bubar dengan sendirinya. Selama ini, hampir semua dinas/instansi pemerintah yang memiliki program kegiatan tidak pernah melibatkan PPL tenaga kontrak. Mereka merasa

⁹ Wawancara dengan staf Dinas Kimpraswil Kabupaten Alor, 24 Juli 2009.

ditandatangani, persis seperti kondisi bangunan tempat para petugas PPL berkumpul di Sebanjar, Kecamatan Alor Kecil.¹⁰

Masih banyak program-program peningkatan produksi yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi karena lemahnya pendokumentasian, baik pada tingkat pokmas, pemerintah desa, maupun aparat pemerintah yang terlibat, sehingga hanya beberapa saja yang dapat diuraikan. Tentu saja uraian di atas kurang lengkap karena hanya didasarkan pada ingatan informan yang diwawancarai. Keterbatasan kemampuan untuk mengingat kembali berbagai program kegiatan yang pernah dilakukan di Desa Alila merupakan kendala dalam menggali informasi tersebut. Kendatipun demikian, apa yang diuraikan sebelumnya sudah dapat menjelaskan bahwa dari berbagai kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan merupakan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan.

(2) Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan di Desa Alila meliputi pembagian jatah raskin, bantuan langsung tunai (BLT), program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri, program keluarga harapan (PKH), pemberian kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Tulisan ini difokuskan pada implementasi program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

• Raskin

Penduduk Desa Alila berjumlah 831 jiwa yang terbagi ke dalam 209 KK,¹¹ sebanyak 132 KK tergolong miskin sehingga berhak

¹⁰ Wawancara dengan sejumlah PPL di Sebanjar, Kecamatan Alor Kecil, 24 Juli 2009.

menerima raskin. Data BPS Kabupaten Alor menyebutkan bahwa dalam setiap 1 (satu) rumah tangga dihitung satu sebagai keluarga yang berhak menerima raskin meskipun dalam satu rumah tangga tinggal lebih dari satu KK dengan kondisi sama-sama miskin. Pada umumnya, rumah tangga di Desa Alila merupakan keluarga luas, sehingga dalam satu rumah terdiri dari 2 (dua) KK atau lebih. Apabila ketentuan dari BPS tersebut dilaksanakan akan menimbulkan masalah sosial berupa konflik keluarga, sehingga dapat mengganggu harmoni sosial.

Begitu tingginya nilai ekonomi dan sosial beras bagi masyarakat di Desa Alila, maka untuk menghindari munculnya persoalan tersebut, jatah raskin pun dibagikan kepada hampir seluruh KK yang berjumlah 203 KK. Masing-masing KK mendapat bagian sekitar 15 kg.¹² Jatah raskin sebanyak itu hanya cukup untuk makan selama satu minggu bagi keluarga dengan anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang, apalagi terhadap laki-laki yang berpoligami dengan 8 istri, jatah raskin itu tidak cukup untuk satu minggu.¹³ Kendatipun demikian, bantuan raskin dengan harga Rp1.600,- per kg yang penyalurannya sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2009 sangat membantu warga Desa Alila yang tergolong miskin. Harga beras kualitas sama yang dijual di pasar Kokar berkisar antara Rp4.500 – Rp5.000,- per kg. Harga ini relatif mahal bagi warga yang tergolong miskin.

Bagi masyarakat Desa Alila, beras merupakan barang yang bukan saja memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga merupakan barang yang bisa meningkatkan status sosial keluarga yang mengonsumsinya. Secara sosial budaya, beras juga sudah menjadi bagian dari pesta adat. Hampir di setiap pesta adat, makanan utama

¹¹ Catatan Kepala Desa Alila, 2009.

¹² Wawancara dengan Kepala Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

¹³ Wawancara dengan Ketua Adat Suku Kabola di Dusun Tulta, 26 Juli 2009.

berupa nasi harus dihidangkan lengkap dengan lauk pauknya. Tidak ada lagi orang yang menyelenggarakan pesta adat yang hanya menyajikan menu makan berupa jagung atau umbi-umbian karena hal itu akan mengundang rasa malu dan menjadi tertawaan orang. Dalam kondisi normal, di keseharian di luar pesta adat sekalipun, orang lebih suka mengonsumsi nasi.

Banyak pihak menilai bahwa program penyaluran raskin ini justru bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah yang kini sedang memromosikan penganekaragaman pangan melalui produk lokal. Untuk itu, di berbagai kegiatan, pemerintah daerah selalu mempromosikan kembali ke pangan lokal kepada seluruh masyarakat, bahkan melalui Surat Keputusan Bupati menekankan agar para pegawai mengonsumsi pangan lokal minimal 2 (dua) kali dalam seminggu. Para tamu yang berkunjung ke Alor pun harus dijamu dengan makanan lokal. Kendati demikian, realisasi dari anjuran tersebut tidak dipatuhi. Menurut informasi dari petugas gudang Dolog di Kalabahi, justru para pegawai negerilah yang paling banyak membeli beras di gudang Dolog itu.

• **Penyaluran BLT**

Menurut inventarisasi BPS Kabupaten Alor, di Desa Alila terdapat sejumlah 163 kepala rumah tangga yang berhak menerima program BLT. Namun dalam realisasinya, penyaluran BLT itu dianggap ada yang salah sasaran. Sebagai contoh adalah penyaluran BLT kepada empat peternak sapi. Ternyata secara ekonomi, mereka ini tergolong mampu, sehingga tidak tepat kalau diikutsertakan sebagai penerima BLT. Kalau harga sapi termurah ditaksir sekitar Rp6.000.000,- per ekor, maka dengan jumlah sapi sebanyak 23 ekor yang dimilikinya, kekayaannya sudah mencapai Rp138.000.000,-. Realitas ini dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan. Kendatipun demikian, kepala desa tidak dapat berbuat apa-apa karena kriteria orang miskin dengan kategori jumlah kepemilikan ternak tidak dihitung. Perhatian hanya diarahkan pada pekerjaan tidak tetap; pendidikan kepala rumah tangga yang relatif rendah, yakni tamat SD

atau bahkan banyak yang tidak tamat; lantai rumah dari tanah, dinding rumah dari gedek; atap rumah dari alang-alang, sehingga dengan kriteria itu orang yang memiliki ternak sapi yang oleh masyarakat setempat dipandang tergolong mampu, akhirnya diputuskan tetap mendapat jatah BLT. Uang BLT yang penyalurannya langsung melalui kantor pos di Kecamatan Alor Barat Laut sampai bulan Juli 2009, sudah disalurkan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jumlah uang Rp400.000,- pada tahap pertama, Rp 300.000,- pada tahap kedua, dan Rp200.000,- pada tahap ketiga .

Dengan uang BLT sebesar itu, masyarakat merasakan banyak manfaatnya, seperti pengakuan ibu Juma. Uang BLT telah ibu Juma belanjakan untuk menambah modal usaha sayuran, biaya anak sekolah, membeli jaring, dan membeli beras di Kokar. Saat-saat penyaluran BLT berlangsung, pasar dan kios di Kokar banyak dipadati orang untuk membeli beras.¹⁴

• Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan (PKH) ditangani langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Alor. Program ini menjadikan rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang masih memiliki anak balita, ibu hamil, atau anak SD sampai SMP sebagai kelompok sasaran. Jumlah RTSM sekitar 89 rumah tangga berada di Desa Alila.¹⁵ Sementara sumber dari Kantor BPS Kabupaten Alor jumlah RTSM mencatat 91 rumah tangga, sehingga ada selisih 2 (dua) rumah tangga.

Jumlah dana yang bisa disalurkan maksimal sebesar Rp2.200.000,- per rumah tangga dalam satu tahun. Sebagai contoh, keluarga Ali Tondo, memiliki 3 (tiga) anak laki-laki, yakni 1 (satu) anak balita, dan 2 (dua) anak duduk di bangku SD. Dana yang diterima oleh 2 (dua) anak yang duduk di bangku SD Rp800.000,-, dan 1 anak balita menerima Rp400.000,-. Ibunya sendiri menerima

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Juma, seorang pedagang sayur di Dusun Bota.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Alila.

Rp400.000,- dan masih ditambah uang tabungan sebesar Rp200.000,- untuk persiapan anak sekolah yang sekarang masih balita. Total dana yang diterima oleh keluarga Ali Tondo Rp1.800.000,-. Dana tersebut disalurkan melalui kantor pos di Kecamatan Alor Barat Laut.

Program PKH dilaksanakan atas usulan dari seorang petugas pendamping. Tugas pendamping selain menentukan rumah tangga yang berhak menerima program PKH, juga memantau penggunaan uang bantuan, dan memonitor kehadiran anak di sekolah. Kalau kehadiran anak di sekolah kurang dari 85%, uang bantuan akan dipotong sebesar Rp50.000,- per anak. Oleh karena itu, jika seorang anak sekolah memang tidak bisa masuk sekolah karena sakit, ia harus membuktikannya dengan surat keterangan sakit dari dokter. Bagi ibu, maka ia harus rajin memeriksakan kehamilannya, dan bagi anak balita, ibunya harus melakukan penimbangan anak balita secara rutin di posyandu yang telah ditentukan minimal sebulan sekali. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan negatif oleh petugas medis, maka petugas pendamping harus memberi teguran dan bimbingan kepada pihak yang bersangkutan.

Namun dalam realitasnya, pemanfaatan uang bantuan tidak selalu sesuai dengan peruntukannya. Sebab dalam pelaksanaannya, uang bantuan program PKH yang diterima oleh keluarga Ali Tondo misalnya, justru dibelanjakan untuk membeli beras, minyak tanah, gula, pakaian anak sekolah, dan buku.

- **PNPM Mandiri**

Untuk masyarakat di Desa Alila, PNPM Mandiri diwujudkan dalam bentuk pengadaan prasarana fisik berupa bangunan posyandu di tiga dusun, yakni Bota, Beharuin, dan Tulta, masing-masing berukuran 6m x 7m dengan anggaran Rp75.000.000,-. Bangunan ini dikerjakan oleh kontraktor setempat dengan melibatkan masyarakat sebagai buruh bangunan/tukang. Pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 90 hari. Masing-masing bangunan menyerap tenaga kerja buruh bangunan 6 (enam) orang dengan upah per hari Rp20.000,-.

Dengan keberadaan program ini, paling tidak sebanyak 18 tenaga kerja terserap. Pendapatan berupa upah kerja yang diterima oleh para buruh bangunan ini dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama pangan. Kendati pekerjaan bangunan sudah selesai, tetapi belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan penimbangan balita dan pemeriksaan ibu hamil masih tetap dilakukan di rumah penduduk. Bangunan posyandu memang belum dilengkapi dengan sarana air bersih, lingkungannya pun gersang dan panas, sehingga ibu-ibu lebih memilih kegiatan posyandu dilaksanakan di rumah penduduk.

Sejumlah petugas medis sendiri menilai bahwa pemrioritasan PNPM Mandiri pada bangunan fisik menjadi mubazir, meskipun hasilnya akan segera tampak. Hal yang mendesak untuk diperhatikan sebetulnya pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat, karena dengan meningkatnya pendapatan, orang akan memilih makanan yang lebih bergizi.¹⁶ (lihat juga Gafar, 2007: 21).

• Program Pemberian Makanan Tambahan

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Alor melalui puskesmas-puskesmas. Dalam waktu satu bulan sekali, kegiatan penimbangan balita dan pemeriksaan ibu hamil dilakukan di posyandu Desa Alila. Kegiatan ini melibatkan 1 (satu) orang tenaga dokter umum, 1 (satu) orang bidan desa, 2 (dua) orang tenaga perawat, dan 1 (satu) orang petugas ahli gizi. Mereka juga dibantu oleh tenaga kader kesehatan setempat sebanyak 5 (lima) orang. Selain melakukan pemeriksaan ibu hamil dan melakukan penimbangan anak balita, mereka juga melakukan pemberian bantuan makanan tambahan, antara lain berupa bubur kacang hijau dan telur yang diberikan kepada anak-anak balita, ibu-ibu yang sedang menyusui dan hamil, serta lansia. Dalam program ini, sering sekali secara swadaya ibu-ibu membuat bubur kacang hijau

¹⁶ Wawancara dengan petugas medis di Kokar, dokter, bidan desa, perawat, dan seorang ahli gizi.

untuk dibagikan kepada anak-anak dan untuk dimakan bersama-sama di tempat itu.

Pada kesempatan itu, para petugas medis dengan tidak bosan-bosannya menanamkan pengertian pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta makan makanan yang mempertimbangkan gizi berimbang antara karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Kebiasaan makan nasi dengan sayur bening daun kelor, ditambah dengan bumbu penyedap mecin dan garam, memang kurang memberikan asupan gizi seimbang yang dimaksud, sehingga kurang baik bagi kesehatan dan pertumbuhan anak. Kendatipun demikian, kebiasaan ini tetap dilakukan karena memang tingkat pendapatan mereka yang rendah, dan bukan semata-mata karena ketidaktahuan menu makan dengan gizi berimbang. Kondisi demikian sama dengan masyarakat nelayan yang berada di Kokar, tempat puskesmas berada. Sekalipun mereka sering menangkap ikan, tetapi hasil tangkapan ikan tersebut lebih suka dijual dan kemudian dibelikan beras, ketimbang harus dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein. Akibatnya, anak-anak nelayan ini juga banyak yang menderita kekurangan gizi.

Pola makan yang demikian ditambah dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, memiliki korelasi dengan berbagai jenis penyakit yang diderita masyarakat, antara lain kolera, disentri, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), tifus, malaria, penyakit kulit, dan TBC. Sebagai contoh, dari 195 rumah tinggal yang ada di Desa Alila, hanya 2 (dua) rumah yang memiliki tempat pembuangan sampah dan air, selebihnya dibuang di pekarangan rumah. Kondisi rumah tinggal penduduk Desa Alila adalah 10 rumah permanen, 70 rumah semi permanen, dan sisanya berupa rumah darurat yang terbuat dari *gedeg* dan alang-alang. Sementara data puskesmas menunjukkan bahwa dari 1.079 jiwa penduduk Desa Alila, 12 orang yang berobat ke puskesmas menderita diare, 1 (satu) orang menderita disentri, 163 menderita ISPA, 8 (delapan) orang menderita malaria, dan 7 (tujuh) orang menderita sakit mata. Kemudian, dari 97 anak balita di Desa Alila, sebanyak 64 anak balita tidak hadir pada pemeriksaan yang diadakan sebulan sekali tanpa pemberitahuan alasan ketidakhadirannya.

Dari sejumlah 33 anak balita yang ditimbang, berat 19 anak dinyatakan naik, dan berat 14 anak tidak naik. Selanjutnya, 23 anak dinyatakan bergizi baik, 9 anak kurang gizi, dan 1 anak menderita gizi buruk. Pada tingkat wilayah kerja Puskesmas Kokar, jumlah anak balita yang tercatat sebanyak 1.226 anak, di antaranya 97 anak menderita kurang gizi, dan 32 anak menderita gizi buruk (Catatan Puskesmas Kokar, April 2009).

Angka-angka tersebut menunjukkan (1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting kegiatan penimbangan balita dan pemeriksaan ibu hamil bagi kesehatan keluarga, (2) Ancaman kerawanan pangan juga masih dihadapi oleh keluarga miskin tampak dari kondisi anak balita yang ditimbang. Oleh karena itu, melalui program PMT ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi anak balita.

2.4 Strategi Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan

Uraian di atas mengilustrasikan secara eksplisit bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan sangatlah dominan. Masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan seolah bersifat pasif dalam menghadapi persoalan kerawanan pangan. Dalam realitasnya, tidak ada kelompok masyarakat di mana pun yang berdiam diri dalam menghadapi berbagai persoalan yang dialaminya, termasuk masalah kerawanan pangan. Berbagai strategi masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan telah diupayakan, seperti bekerja membangun rumah tinggal, kegiatan gotong royong baik dalam mengolah lahan pertanian, penyelenggaraan pesta adat, dan membuat lumbung pangan *esel*. Melalui kegiatan tersebut, solidaritas sosial masyarakat dapat diciptakan sekaligus dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat. Tentu saja upaya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat setempat, bahkan karakteristik sosial budaya masyarakat itu menjadi refleksi dari strategi peningkatan ketahanan pangan itu sendiri.

2.4.1 Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Desa Alila

Masyarakat NTT termasuk di dalamnya masyarakat Alor sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan saling menghormati satu sama lain. Realitas itu dilandasi oleh ikatan kekerabatan yang ada dalam sistem adat di NTT. Rasa kebersamaan diwujudkan dalam semangat persaudaraan dan gotong royong dalam keluarga, klan, dan suku, serta di dalam desa. Hal ini dapat dimengerti karena baik jumlah penduduk maupun luas wilayah desa-desa di NTT khususnya dan Alor pada umumnya relatif kecil, sehingga para warganya relatif memiliki ikatan kekerabatan satu dengan yang lain, baik berhubungan darah atau perkawinan. Satu desa didirikan oleh satu keluarga dan mempunyai hubungan timbal balik dengan desa-desa lain yang merupakan desa induk atau desa turunan yang secara bersama-sama merupakan bagian dari satu klan atau bagian dari yang lebih tinggi lagi, yaitu bagian dari satu suku. Selanjutnya, hubungan antara desa diperkuat lagi oleh hubungan antara rumah-rumah adat yang juga mempunyai induk dan turunan. Pada umumnya, sebuah desa adalah perluasan dari sebuah rumah adat (Djawani, 1985: 65).

Warga masyarakat di Desa Alila merupakan satu suku Kabola yang terpecah menjadi tiga dusun. Dusun yang tertua sebagai induknya adalah Dusun Tulta dengan ketua adat Kabola yang masih tinggal di Dusun Tulta. Dua dusun yang lain, yakni Dusun Beharuin dan Dusun Bota berada di lembah dataran rendah, merupakan hasil dari perpecahan yang terjadi pada tahun 1960-an. Melalui program *landreform*, maka sebagian penduduk dari Dusun Tulta turun ke lokasi dataran rendah yang sekarang disebut Dusun Bota. Lahan di Dusun Bota semula merupakan tanah negara, namun dengan diberlakukannya kebijakan *landreform*, maka banyak penduduk dari Dusun Tulta yang pindah ke Bota. Hasil dari pembagian tanah itu kemudian dijadikan sebagai pekarangan dan tempat mendirikan rumah tinggal. Sementara itu, mereka ini masih memiliki tanah kebun, ladang, dan huma di Dusun Tulta. Dalam perkembangannya, kini sebagian orang ada yang pindah kembali ke Dusun Tulta karena tanah milik hasil pembagian *landreform* sebelumnya sudah habis

terjual, dan sebagian lagi habis terbagi kepada ahli warisnya. Gejala pemilikan tanah *gontai*, *absente* cukup menonjol di Dusun Bota. Umumnya pemilik tanah *gontai* itu adalah penduduk dari Alor Besar dan Alor Kecil. Data tertulis mengenai jumlah orang yang sudah menjual tanah miliknya dan jumlah orang yang sudah kembali ke dusun induk tidak tersedia.¹⁷

Menurut informasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Alor, banyak hal yang mendorong orang untuk menjual tanah warisnya. Alasan itu antara lain untuk menyelenggarakan pesta adat dan membangun rumah, termasuk yang berada di tepi-tepi jalan raya beraspal yang kini kondisinya sudah rusak. Sementara untuk membiayai anak sekolah, penduduk tidak ada yang menjual tanah. Dusun Bota menjadi sasaran utama para spekulasi tanah karena tanahnya yang datar dan relatif subur bila dibanding dengan tanah pegunungan di dua dusun yang lain. Lokasi Dusun Bota relatif lebih strategis, dekat dengan kantor-kantor pelayanan masyarakat, seperti puskesmas, kantor camat, pasar Kokar, dan terminal.

Lalu bagaimana sesungguhnya pandangan mereka tentang harta? Dalam kaitannya dengan harta kekayaan, dapat diamati bahwa rasa kebersamaan juga meluas sampai pada pengertian dan sikap terhadap nilai ekonomis dari harta kekayaan. Pandangan sederhana yang kadang terasa sangat naif ialah orang bekerja dan mengumpulkan harta bukan sekadar untuk dimiliki dan dinikmati sendiri (seperti yang lumrah dijumpai pada masyarakat kota), melainkan untuk dinikmati bersama di dalam pesta-pesta dan upacara-upacara adat. Pada masyarakat Desa Alila juga terdapat usaha bersama dalam rangka menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di antara warga. Dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut tampak pada kerja gotong royong untuk mempersiapkan lahan pertanian, menanam, memanen, membangun rumah, dan menyelenggarakan pesta-pesta adat. Kegiatan gotong royong itu merupakan mekanisme untuk saling berbagi harta dan pangan di

¹⁷ Wawancara dengan Guru Desa Alila, Kakak Ipar Kepala Desa Alila.

antara sesama warga desa. Pekerjaan yang dilakukan sesungguhnya cukup dikerjakan oleh anggota keluarga serumah, misalnya untuk menggarap ladang seluas 20m x 30m atau 50m x 50m, namun tetap dikerjakan secara gotong royong. Moral ekonomi petani tidak memungkinkan untuk bertindak seperti itu. Ada suatu penilaian dari masyarakat NTT terutama yang tinggal di perdesaan kepada orang-orang yang bekerja terlalu keras untuk mengumpulkan harta kekayaan, dan melupakan tugas sosialnya di desa, ialah bahwa “Bila mati kelak ia akan dikuburkan dan ditangisi oleh kuda dan kerbaunya” (Djawani, 1985, 67).

Kondisi sosial budaya itu sangat berpengaruh pada strategi masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Sistem kerja gotong royong, bentuk-bentuk kelembagaan sosial dalam peningkatan ketahanan pangan, dan penyelenggaraan upacara adat di seputar kegiatan pertanian merupakan ceminan dari kondisi sosial budaya masyarakat petani.

- **Kerja Gotong Royong**

Kerja gotong royong atau istilah setempat lazim disebut “pulserang”, dilakukan pada berbagai lapangan kegiatan, antara lain penyiapan penggarapan lahan, penanaman, dan pemanenan. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan penduduk laki-laki dan perempuan, diawali dengan pemberitahuan dari satu keluarga yang memiliki pekerjaan kepada keluarga atau tetangga dekatnya. Melalui ajakan yang disampaikan dari mulut ke mulut, maka hampir seluruh warga desa mendengar bahwa jagung si A akan dipanen esok hari, lusanya memanen jagung di tempat si B, demikian seterusnya. Sampai pada saatnya tiba, mereka akan datang beramai-ramai untuk melaksanakan pekerjaan memanen, tanpa mengharap imbalan dalam bentuk materi, kecuali hanya mendapat makan dan minum pada saat bekerja sesuai dengan kemampuan si pemilik pekerjaan. Begitupun sebaliknya, pemilik pekerjaan harus berbuat sama saat warga yang lain memiliki pekerjaan.

Khusus hal memanen hasil tanaman dilakukan dengan sistem bagi dua. Artinya, pemilik lahan dan pekerja mendapat bagian yang sama. Misalnya, apabila dalam satu kali petik padi diperoleh 10 blek, sementara tenaga yang dipekerjakan sebanyak 10 orang, maka pemilik lahan mendapat 5 blek dan pekerja pun mendapat 5 blek yang dibagi sama oleh sepuluh orang pekerja tadi. Kasus Ibu Juma misalnya, memiliki ladang seluas 50m x 50m, hanya menghasilkan padi rata-rata 20 blek, rata-rata per blek 7 kg, atau setara dengan 140 kg padi. Dalam jumlah yang sama, Ibu Juma telah mengeluarkan padi sebagai ongkos petik yang dikerjakan secara gotong royong. Lahan yang ditumpang sari dengan jagung pada luasan yang sama hanya menghasilkan 40 ikat di mana dalam seikat jagung terdiri dari 10 tongkol jagung. Setelah dipipil, satu ikat jagung akan menjadi satu rantang jagung yang setara dengan 0,5 kg jagung.

Masa panen untuk seluruh desa berlangsung sekitar 7–10 hari. Dalam sehari, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan memanen mendapat upah rata-rata seikat jagung dan 6 (enam) rantang padi atau sekitar 3 (tiga) kg padi. Dalam setahun, lahan hanya dapat dipanen sekali dan jagung 2 (dua) kali. Untuk panen jagung yang kedua (tanam matahari), petani memanfaatkan sisa hujan dengan tingkat produksinya menjadi sekitar 20–30 ikat jagung. Tingkat produksi sebesar itu sudah tergolong bagus dan tidak terserang hama.

Rendahnya tingkat produktivitas lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lahan marginal dengan lapisan tanah yang tipis sekitar 5–10 cm, curah hujan yang rendah dan tidak menentu, rendahnya tingkat keterampilan petani dalam bercocok tanam, rendahnya kemampuan ekonomi petani sehingga tanaman tidak dipupuk. Dengan luas pemilikan lahan yang sempit yang mengakibatkan tingkat produktivitas lahan rendah, menurut sejumlah petani yang diwawancarai mengatakan bahwa seluruh panen padi dan jagung hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan sekitar 3–4 bulan.

Kendatipun luas lahan pertanian sempit, dan sesungguhnya lahan itu dapat dikerjakan oleh anggota keluarga sendiri, tetapi tetap dikerjakan oleh banyak orang karena moral ekonomi petani tidak mengizinkan untuk bertindak seperti itu. Fakta ini sama dengan sikap moral ekonomi petani di Jawa sebagaimana dikemukakan Scott (1976: 167). Pada kasus lahan sawah, hal ini dimungkinkan karena sifat ekologi sawah yang berpengairan mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak. Fenomena itu menunjukkan telah terjadi involusi pertanian (Geertz, 1963: 83). Namun, untuk kasus lahan kering pun terpaksa harus dikerjakan dengan melibatkan orang banyak karena kurangnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian dan moral ekonomi petani yang tidak memungkinkan orang bertindak dengan pertimbangan untung rugi. Sistem kerja gotong royong memungkinkan keluarga yang paling miskin sekalipun (sekitar 10 KK tidak memiliki lahan sama sekali di Desa Alila) akan memiliki jaminan pangan.

- **Gotong Royong dalam Pesta Adat**

Masyarakat Alor dikenal juga sebagai masyarakat yang gemar melakukan pesta adat. Pesta adat ini ada yang sifatnya pribadi, seperti khitanan, perkawinan, kematian, kelahiran, persiapan memotong padi, persiapan menanam padi, dan membangun rumah. Pesta adat yang bersifat umum antara lain penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan (Maulid Nabi, Isra Mikraj, menyambut bulan puasa) dan hari-hari besar nasional (perayaan 17 Agustus). Bagi masyarakat Desa Alila, pesta adat adalah segalanya. Orang akan tetap menyelenggarakan pesta adat kendatipun harus mengorbankan kebutuhan yang lain seperti untuk membiayai anak sekolah.¹⁸

Dalam menyelenggarakan pesta adat yang bersifat umum, seluruh kebutuhan pesta ditanggung oleh warga desa sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada penyelenggaraan pesta adat yang bersifat pribadi, berlaku prinsip timbal balik (resiprositas).

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Alor.

Artinya, mereka yang memberikan sumbangan kepada penyelenggara pesta, maka pada suatu saat kelak ia juga akan mendapat sumbangan dari mereka yang pernah disumbanginya itu.

Sedemikian tingginya frekuensi pesta adat, mengakibatkan kepala desa harus menjadwalkannya agar penyelenggaraan pesta adat tidak terjadi pada waktu bersamaan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban warga dalam memberi sumbangan kalau pesta adat dilaksanakan pada hari yang sama. Melalui penyelenggaraan pesta-pesta adat inilah solidaritas sosial di antara warga desa dapat dipertahankan. Dengan wilayah desa yang tidak begitu luas memungkinkan orang saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga memungkinkan orang untuk mengetahui warga desa yang tidak hadir dalam pesta tersebut. Ketidakhadiran seseorang dalam pesat adat akan mengundang aib besar bila ia tidak memberitahukan alasan yang bisa diterima.

Sekalipun kehadiran seseorang sangat diharapkan dan tidak ada ketentuan harus memberi sumbangan dalam pesta, tetapi hal ini tidak lazim dilakukan. Kalau seseorang datang ke suatu pesta tanpa membawa sumbangan, maka ia akan merasa malu. Sebaliknya, bila seseorang tidak datang ke pesta, akan mengundang penilaian masyarakat bahwa perbuatannya dapat mengusik rasa solidaritas sosial di antara sesama warga desa. Oleh karena itu, bagi keluarga yang tergolong tidak mampu, realitas ini telah dirasakan sebagai suatu beban. Kebiasaan orang untuk menyelenggarakan pesta juga membuat seolah-olah orang yang tidak pernah menyelenggarakan pesta merasa bersalah, karena hal itu merupakan suatu perbuatan yang “tidak umum”.

Salah satu penyelenggaraan pesta adat yang dirasa paling memberatkan sekaligus juga paling membanggakan adalah pesta khitanan. Pesta ini diselenggarakan selama satu minggu sejak anak mulai disunat sampai sembuh. Bisa dibayangkan kalau sebuah rumah tangga memiliki 3 (tiga) anak laki-laki yang harus disunat dalam tahun yang bergantian, jelas akan mengeluarkan dana yang tidak

sedikit. Salah satu warga yang diwawancarai bahkan sempat mengalami depresi mental hanya karena memikirkan hal itu. Ia tidak berani keluar rumah karena merasa malu terhadap tetangga. Menurut pengakuan istrinya, kalau suaminya keluar rumah dan melihat ekonomi keluarga lain lebih baik, sehingga dapat menyelenggarakan pesta, begitu suaminya pulang penyakitnya langsung kambuh, badan panas, lemas, dan terdiam. Hasil pemeriksaan medis di Puskesmas Kokar menyebutkan bahwa orang tersebut mengalami depresi mental.¹⁹

Kendatipun penyelenggaraan pesta-pesta adat memiliki nilai-nilai positif sebagai mekanisme distribusi pangan sekaligus peningkatan gizi keluarga, tetapi juga pada tingkat tertentu mempunyai dampak negatif, terutama bagi keluarga yang tergolong sangat miskin. Beban psikologis sebagai dampak penyelenggaraan pesta akibat penilaian “tidak umum” oleh warga desa merupakan hukuman sosial yang dapat memunculkan rasa keterasingan seseorang. Jaminan rasa keamanan pada masa depan juga tidak ada, sebab bila ia menghadapi kesulitan hidup, maka dapat dipastikan bahwa warga yang mau menolongnya tidak ada.

Dalam kaitannya dengan peningkatan gizi keluarga, melalui penyelenggaraan pesta adat dapat diketahui pola makan dan menu pangan. Lazimnya, hidangan utama dalam pesta adat adalah nasi dengan sayur nangka, sawi, atau kubis yang dimasak dengan sayur bening, bumbu garam, dan diberi penyedap mecin. Lauknya antara lain daging ayam atau ikan. Sementara bagi keluarga mampu, mereka menyuguhkan daging sapi dengan sup sayur. Selain hidangan utama, juga disajikan makanan ringan²⁰ yang terbuat dari singkong, jagung,

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Alila yang didampingi oleh istri dari orang yang pernah mengalami depresi yang dimaksud.

²⁰ Adapun nama-nama jenis panganan yang dihidangkan dalam pesta adat adalah sebagai berikut (1) Kue delapan, terbuat dari bahan tepung, singkong, telur, digoreng dan dibalut dengan tepung gula; (2) Pisang goreng, yaitu pisang dibelah, dijemur, dibalut tepung terigu dan digoreng;

sagu, tepung terigu, pisang, ubi jalar, telur, dan minuman air teh panas. Menu makanan tersebut menunjukkan betapa variannya kandungan asupan gizi yang meliputi vitamin, protein, zat mineral, dan lemak, yang kesemuanya dapat memenuhi standar gizi seimbang yang memungkinkan seseorang untuk hidup sehat, kreatif, dan produktif. Keragaman makanan itu sekaligus juga mencerminkan tingkat kemampuan teknis dalam pengolahan produk lokal menjadi makanan yang dapat mengundang selera karena mencitrakan makanan bergengsi sosial tinggi dengan kemasan dan tampilan yang berwarna-warni. Dalam hal ini, masyarakat Alor memang sudah dikenal sebagai pengolah produk lokal, seperti jagung dan singkong yang selama ini melekat sebagai simbol keterbelakangan dan kemiskinan, menjadi makanan yang bercitra rasa modern. Kemampuan ini memang telah diakui oleh masyarakat luar, terbukti dengan prestasi yang telah disandangnya sebagai juara pertama dalam lomba ketahanan pangan tingkat provinsi maupun nasional pada tahun 2008.

Kendatipun demikian, di luar pesta adat itu pola makan sehari-hari masyarakat Desa Alila menunjukkan pola makan yang sederhana, yang oleh para petugas medis dinilai kurang memenuhi standar kesehatan. Masyarakat memiliki kebiasaan makan dua kali dalam sehari, yakni makan siang sekitar pukul 12.00--13.00 WITA, dan makan malam menjelang Sholat Isya sekitar pukul 19.00 WITA. Sementara di pagi hari mereka tidak sarapan. Kalaupun ada di antara mereka yang sarapan, maka makanan yang mereka makan merupakan makanan yang tersisa pada malam sebelumnya, itupun yang diutamakan adalah sarapan untuk anak-anak. Kalau sisa makanan

(3) Donat, terbuat dari tepung terigu, mentega, bibit roti, gula, digoreng, dan kemudian disajikan dengan ditaburi mesis; (4) Kue hanun, tepung singkong, gula aren, kelapa parut; (5) Kue ular, yaitu terbuat dari tepung terigu dan gula; (6) Kue longa, yaitu berupa ubi yang diparut, kemudian diisi gula merah dan digoreng; (7) Kripik pisang, yaitu pisang yang dibelah-belah, dibalut dengan tepung terigu, dan kemudian digoreng.

malam sebelumnya tidak ada, maka mereka cukup dengan minum air saja.

Pola makan yang demikian telah mengakibatkan kekurangan kandungan gizi, vitamin, mineral, protein, dan lemak. Padahal, unsur-unsur itu seharusnya ada dalam kandungan makanan yang dikonsumsi agar memenuhi kebutuhan gizi berimbang. Oleh sebab itu, tidak heran kalau anak-anak balita mudah jatuh sakit akibat daya tahan tubuh yang rendah. Kurangnya kandungan gizi pada makanan dapat juga berakibat munculnya beberapa penyakit yang diderita oleh masyarakat, seperti sakit kulit, flu, ISPA, malaria, disentri, muntaber, dan TBC.²¹

• Pengadaan Lumbung Pangan

Keberadaan lumbung pangan pada masyarakat petani di Alor merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman kerawanan pangan yang sering melanda masyarakat petani di Alor. Beberapa fenomena alam yang sering terjadi dan telah mengakibatkan terganggunya persediaan pangan adalah banjir, kekeringan, tanah longsor, badai, gempa bumi, dan serangan hama. Karena itu, keberadaan lumbung pangan merupakan hasil adaptasi masyarakat terhadap kondisi alam yang kurang bersahabat tersebut.

Keberadaan institusi ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dengan memberikan dorongan secara terus-menerus agar masyarakat dapat melakukan revitalisasi pada lumbung-lumbung pangan di Alor. Di Desa Alila terdapat 6 (enam) lumbung pangan (*ese/*) yang tersebar di tiga dusun, yakni Tulta 3 (tiga) lumbung, Bota 2 (dua) lumbung, dan Beharuin 1 (satu) lumbung. Bangunan lumbung pangan berupa rumah panggung berukuran antara 3m x 3m, tinggi 6m. Bangunan ditopang dengan 4 (empat) tiang, dengan ketinggian 3m dari tanah sampai lantai lumbung. Atap lumbung ini terbuat dari

²¹ Data kuantitatif mengenai hal ini dapat dilihat pada uraian terdahulu.

daun alang-alang, berinding kayu atau *gedek*. *Esel* dibangun di pekarangan yang dikelilingi oleh rumah penduduk. Kapasitas *esel* sekitar 100 ikat jagung dan 75 *blek* padi. Dalam satu komplek permukiman yang masih memiliki hubungan keluarga, mereka biasanya memiliki 1 (satu) *esel* yang dipakai secara bersama-sama. Orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga boleh ikut menyimpan di lumbung ini sepanjang mendapat izin dari si pemilik *esel*.

Lumbung pangan yang lain berupa sejumlah tanaman yang tumbuh di halaman atau pekarangan rumah. Lumbung hidup itu seperti tanaman pisang, singkong yang sengaja tidak dicabut, nangka, kelapa, jambu mete, dan daun kelor. Saat musim paceklik tiba, tanaman, terutama singkong bisa dicabut untuk dikonsumsi.

Selain *esel*, biasanya masing-masing rumah tangga juga menyimpan cadangan pangan di para-para atau “loteng” di bawah atap rumah. Biasanya bahan makanan yang disimpan adalah padi dalam karung, jagung yang diikat, *cantle/sorgum*. Bahan makanan itu diletakkan di atas para-para atau dekat tungku, bertujuan agar selalu terkena asap dapur sehingga tidak rusak dimakan bubuk.

- **Mencari Pekerjaan di Sektor Perikanan Tangkap, Jasa dan Perdagangan**

Beberapa pekerjaan di luar sektor pertanian yang dapat dilakukan meliputi, buruh nelayan, pekerja jasa pertukangan dan pembengkelan, kernet angkutan umum, dan pedagang. Dengan cara demikian, mereka akan memperoleh tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sebagai contoh kasus adalah keluarga Juma yang tinggal di Dusun Bota yang memiliki anggota keluarga 6 (enam) orang. Anak pertama keluarga Juma ini seorang laki-laki berusia 20 tahun, tamat SMU, bekerja sebagai kernet atau “*konjak*” (dalam istilah setempat) angkutan umum bus tiga perempat “Daya Timur” jurusan Kokar – Kalabahi. Sementara adiknya adalah seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku

SMP dan 4 (empat) adiknya yang lain masih duduk di sekolah SD. Ibu Juma sendiri tamat SMP, berusia 41 tahun, dan suaminya Pak Juma tamat SR berusia 55 tahun. Pekerjaan utama Pak Juma adalah petani, dan sebagai pekerjaan sampingan ia melaut mencari ikan walaupun sekadar untuk lauk-pauk dengan cara memancing dan menjaring. Sarana yang digunakan berupa perahu dayung yang dioperasikan hanya di tepi pantai.

Sebagai petani, keluarga ini hanya memiliki tanah yang sempit, yakni pekarangan seluas 25m x 25m dan bangunan rumah tinggal yang sudah reyot seluas 4m x 8m. Selebihnya berupa halaman rumah, sumur, dan lahan pekarangan yang berisi tanaman mangga, pisang, kelor, singkong, jambu mete, dan sedikit tanaman cabe. Selain itu, ada tanah ladang seluas 100m x 100m yang berada di Dusun Tulta, sejauh kurang lebih 6 km dari Dusun Bota. Tanah tersebut berupa tanah kapur dan perbukitan. Tanah seluas itu dimanfaatkan untuk menanam padi ladang seluas 50m x 50m, dan tanaman jagung seluas 50m x 50m. Hasil panen padi yang diperoleh sebanyak 20 *blek*, di mana 1 *blek* setara dengan 7 kg, sehingga 20 *blek* itu setara dengan 140 kg dan jagung 40 ikat. Dalam jumlah yang sama, produksi sebesar itu dikeluarkan sebagai upah memetik. Selain tanaman tersebut, Ibu Juma juga memelihara ternak, antara lain ayam 6 (enam) ekor dan kambing 3 (tiga) ekor.

Hasil usaha tani tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan selama 4--5 bulan. Bila hasil usaha tani Ibu Juma dikonversi menjadi beras, hasil itu kurang lebih 100 kg dan jagung 40 ikat hanya sekitar 20 kg setelah menjadi jagung pipilan. Produksi sebesar itu sudah termasuk bagus, dalam arti tidak terserang hama dan masa panen hanya berlangsung sekali setahun. Hama yang biasanya menyerang; antara lain wereng, tikus walang sangit, belalang, jamur tanaman, dan sundep.

Dengan keadaan seperti itu, keluarga Juma harus bekerja sekuat tenaga mencari pendapatan lain di luar sektor pertanian. Ibu Juma sendiri bekerja sebagai pedagang sayur keliling (*papa lele*),

yang dilakukannya 2 (dua) kali dalam seminggu. Jenis bahan sayuran yang dijual antara lain, sawi, tomat, cabe, kangkung, dan bayam. Barang dagangan tersebut diperoleh dari Desa Adang dan Aimoli, sekitar 3--4 km dari Dusun Bota, dan dijajakan dari pintu ke pintu, serta berpindah dari satu desa ke desa lain. Setelah sayuran habis terjual, baru kemudian ia kembali datang ke petani untuk membayar sayur yang dijualnya. Ibu Juma membeli 4 (empat) ikat kangkung seharga Rp1.000,-, sementara ketika dijual seharga Rp500,- per ikat, sehingga keuntungan Ibu Juma adalah Rp1.000,- dari 4 (empat) ikat kangkung. Dalam sehari, keuntungan yang diperoleh Ibu Juma rata-rata sekitar Rp 50.000,- setelah ongkos ojek ke Desa Adang dan Aimoli tempat mengambil sayur yang akan dijual dikeluarkan. Dalam sebulan, keuntungan yang dia peroleh sekitar Rp300.000,-. Usaha dagang sayur keliling ini sudah ia tekuni sekitar 9 (sembilan) tahun lebih.

Keluarga Juma memperoleh bantuan BLT sebesar Rp900.000,- yang diperoleh melalui 3 (tiga) kali pencairan, yaitu pertama Rp400.000,-, kedua Rp200.000,-, dan ketiga Rp300.000,-. Bantuan tersebut diambil di Kantor Pos Kecamatan Alor Barat Laut, sekitar 3 km dari Dusun Bota. Uang sebesar itu digunakan untuk membayar biaya anak sekolah, membeli pakaian sekolah, buku, jaring, bibit ayam, dan ternak kambing 3 ekor. Bagi keluarga Juma, bantuan BLT tersebut sangat bermanfaat untuk menunjang ekonomi rumah tangganya. Selain Ibu Juma, sumber pendapatan ekonomi rumah tangga juga diperoleh dari upah buruh kernek angkutan umum dari anak tertuanya. Sayang, Ibu Juma tidak bisa merinci berapa jumlah uang yang diterima dari anak sulungnya ini karena jumlahnya tidak menentu, kadang Rp 5000,-, Rp 10.000,- ataupun Rp 20.000 per hari, tergantung dari banyaknya penumpang. Kecilnya pendapatan yang diperoleh bisa dipahami karena anaknya hanya seorang kernet bus yang kondisinya sudah tidak layak jalan.

Kendatipun seluruh anggota keluarga sudah dikerahkan untuk bekerja, ekonomi rumah tangga Juma sekadar pas-pasan saja. Rumah tinggal yang ditempati masih berupa rumah gubuk yang kondisinya

sudah reyot, berlantai tanah, berdinding *gedek* yang sudah lapuk, dan beratap alang-alang. Menurut pengakuan Ibu Juma, pola makan yang dikonsumsi pun tidak banyak berubah. Menu makannya nasi jagung, sayur bening daun kelor dengan bumbu garam, dan mecin. Bila kebetulan suaminya dapat tangkapan ikan, menu makanan akan ditambah dengan lauk ikan.

Kasus lain adalah keluarga Ali Tonu dengan anggota keluarga sebanyak 5 orang. Ali Tonu berusia sekitar 31 tahun berpendidikan tamat SD. Sementara istrinya adalah Yusni Hanida yang berusia sekitar 34 tahun dengan tingkat pendidikan tamat SD. Ali Tonu menikah pada tahun 1998 dan dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki. Yang pertama berusia 8 tahun duduk di kelas 3 SD, yang kedua umur 6 tahun masih duduk di kelas 1 SD, dan yang bungsu baru berusia 3 tahun. Keluarga ini tinggal di Dusun Bota, menempati rumah tinggal sederhana berukuran 4m x 8m, berlantai tanah, berdinding *gedek*, dan beratap alang-alang. Bangunan ini menempati lahan pekarangan seluas 30m x 40m. Sisa tanah di luar tapak bangunan tumbuh tanaman kelapa, pisang, dan singkong. Total panen dari lahan pekarangan ini sekitar 10 kg beras dan 40 tongkol jagung, yang dimasukkan ke dalam karung. Menurut Pak Ali Tonu hasil produksi tani sebesar itu tidak cukup untuk dikonsumsi selama 3 bulan.

Adapun makanan pokok yang dikonsumsi oleh keluarga Ali Tonu selama ini adalah beras yang dibeli dengan menggunakan uang bantuan dari PKH 2008 yang jumlahnya sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu juga dari upah buruh nelayan sebesar Rp300.000,- selama dua bulan. Pak Ali Tonu ikut kapal nelayan milik seorang juragan dari Bau-Bau. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama 3 (tiga) tahun. Penduduk dari Desa Alila yang bekerja sebagai buruh nelayan sekitar 30 orang. Kendatipun yang bekerja sebagai buruh nelayan, ia mengaku keluarganya hampir tidak pernah mengonsumsi ikan. Kalau kebetulan ia mendapat ikan yang tercecer, ia lebih suka menjualnya dan uangnya digunakan untuk membeli beras. Strategi subsistensi seperti ini banyak juga dilakukan oleh nelayan atau petani

yang lain, misalnya dengan menjual ayam dan telur ayam. Uang hasil penjualan itu digunakan untuk membeli beras dan pakaian. Karena itu, tidak aneh bila masyarakat nelayan di Kokar, terutama anak-anak balita, banyak yang menderita kekurangan gizi. Perilaku seperti ini, bukan karena mereka tidak mengetahui makanan bergizi dan sehat, tetapi akibat pendapatan ekonomi rumah tangga yang rendah, mengharuskan mereka untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan primernya.²² Untuk dapat menghidupi keluarganya, istri Ali Tonu selalu ikut membantu memasak pada setiap orang yang punya hajat menyelenggarakan pesta adat. Sebagai imbalan atas jasanya, ia sendiri dapat makan dan masih menerima makanan buat anggota keluarga yang ada di rumah. Selain pekerjaan membantu memasak, sesekali ia diminta oleh Pak RT untuk membantu mengerjakan kebunnya. Dalam satu kali musim tanam, dalam waktu 2--3 hari membersihkan kebun, istri Ali Tonu ini diberi upah Rp10.000,- per hari.

Kondisi hidup yang dijalani oleh keluarga Ali Tonu membuatnya merasa malu dengan tetangga-tetangganya. Ia jarang ke luar rumah kecuali untuk melaut ikut mencari ikan. Ia pun jarang menghadiri pesta adat karena merasa tidak mampu, termasuk untuk ikut memberi sumbangan. Hal yang dirasakan cukup berat menindih beban ekonomi keluarga adalah memikirkan bagaimana menyunatkan anak-anaknya dikemudian hari. Padahal anak yang tertua sudah berusia 8 tahun, sehingga sudah waktunya untuk disunat. Sementara itu, ia tidak memiliki cukup uang untuk melangsungkan pesta adat yang selalu didambakan oleh siapa pun yang memiliki anak laki-laki.

Kasus keluarga sekretaris desa untuk mendapatkan tambahan ekonomi rumah tangganya adalah dengan membuka usaha jasa perbengkelan sepeda motor di rumahnya. Di Desa Alila saja, ia memiliki langganan sebanyak 30 orang. Keterampilan perbengkelan ini diperoleh ketika ia tinggal di Timtim dan bekerja sebagai pembantu teknisi di sebuah bengkel motor. Hasil referendum tahun

²² Wawancara dengan petugas medis di Puskesmas Kokar.

1999 telah menghantarkannya pada sejarah kehidupan yang lain. Ia pulang ke Desa Alila tahun 1999, dan waktu itu ada program UNDP selama 4 (empat) tahun, yaitu melakukan kegiatan pengembangan pertanian, peternakan, dan perbengkelan. Kegiatan pelatihan itu ia gunakan untuk menambah keterampilannya dalam bidang elektronika dan mekanik mesin sepeda motor. Dengan bekal itulah ia bisa membuka bengkel motor kecil-kecilan. Hasilnya lumayan kalau sekadar untuk menambah biaya dapur.

Upaya bertahan yang dilakukan oleh penduduk di Desa Alila, selain berusaha di sektor-sektor lain dengan hasil yang diperoleh tidak begitu banyak, mereka juga ada yang bermigrasi ke tempat-tempat lain. Pulau Batam menjadi salah satu tujuan bermigrasi untuk dapat lepas dari kemiskinan. Mereka bekerja sebagai tenaga keamanan (satpam), pembantu rumah tangga, dan buruh pabrik. Menurut taksiran Sekretaris Desa Alila, jumlah migran dari Desa Alila di Batam lebih dari 100 orang. Ekonomi rumah tangga penduduk yang bermukim di Desa Alila juga banyak terbantu dengan uang kiriman dari migran yang ada di Batam itu.

- **Memungut Buah Mete, Pinang, Kemiri, dan Pengembangan Ternak**

Selain bertani, penduduk Desa Alila juga mencari sumber pendapatan dengan memetik buah tanaman jambu mete. Bagi anak-anak, memungut buah mete dilakukan pada pagi hari. Buah mete yang dipungut merupakan sisa makanan kelelawar yang berjatuhan. Dalam sehari, anak-anak dapat memperoleh antara 70--100 biji mete, yang kemudian dijual ke penampung dengan harga sekitar Rp1.500--Rp2.000,-. Uang sebesar itu cukup digunakan sebagai uang saku anak sekolah untuk membeli makanan (jajanan) seperti kue-kue dari bahan singkong yang dijajakan di SD Beharuin.

Rata-rata kepemilikan pohon jambu mete warga Desa Alila sekitar 20--30 batang. Oleh karena usianya yang masih muda, berkisar antara 4--5 tahun, maka buahnya pun belum banyak.

Produksi mete per pohon rata-rata antara 15--20 kg. Harga buah mete per kg tergantung dari kualitasnya. Jambu mete yang belum disortir harganya antara Rp3.000--Rp4.000,- per kg, mete yang sudah disortir Rp8.500--Rp 9.000,- per kg, sedangkan mete yang sudah dikupas harganya mencapai Rp130.000,- per kg. Di Desa Alila terdapat 2 (dua) orang pedagang penampung buah mete, 1 orang tinggal di Dusun Tulta, dan seorang tinggal di Dusun Bota.

Tambahan sumber pendapatan lainnya berasal dari memungut buah kemiri dan memetik buah pinang di hutan adat, berjarak kurang lebih 8--10 km dari Desa Alila. Pendapatan dari memungut buah kemiri selama ini cukup besar antara Rp1.500.000--Rp2.000.000,- bahkan ada yang sampai Rp4.000.000,-, tergantung dari jumlah kemiri yang berhasil dipungut. Masa memungut buah kemiri biasanya jatuh pada bulan bulan Juni--Oktober. Harga buah kemiri yang belum dikupas adalah Rp1.500,- per kg, dan harga kemiri yang sudah dikupas Rp20.000,- per kg. Sementara itu, harga buah pinang setelah dirajang dan kering adalah Rp30.000--Rp40.000,- per kg.

Sementara usaha peternakan sapi belum banyak dikembangkan kendatipun sangat memungkinkan. Penduduk Desa Alila yang sudah mengembangkan ternak sapi baru 4 (empat) orang, dengan kepemilikan sapi masing-masing 23 ekor, 11 ekor, 6 ekor, dan 15 ekor. Total keseluruhan sapi dari keempat peternak sapi itu baru 55 ekor. Sebenarnya populasi sapi ini masih mungkin dikembangkan dan dipadu dengan tanaman pertanian lainnya (*mix farming system*) karena pakan ternak cukup tersedia, antara lain daun tanaman lamtorogung, *kleresedeae*, limbah pertanian, dan rumput. Selain itu, pakan ternak lain yang volumenya besar adalah batang pohon pisang, limbah jagung, dan tebu-tebuan dengan cara ditanam. Bidang ini masih ada peluang untuk dikembangkan.

2.5 Penutup

Berdasarkan paparan di atas, kegiatan penelitian ini memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

2.5.1 Kesimpulan

Tampak bahwa dari sisi penyediaan pangan melalui produksi pertanian, tingkat produktivitas lahan pertanian rendah. Akibatnya tingkat pendapatan petani pun menjadi rendah. Implikasi lebih lanjut, kemampuan untuk mengakses pangan juga rendah. Banyak faktor yang menyebabkan tingkat produktivitas petani rendah, antara lain; (1) Faktor internal, yaitu rendahnya kemampuan sumber daya manusia petani yang tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan petani, rendahnya keterampilan bertani, dan ketiadaan modal. Akibatnya pengolahan lahan pertanian tidak dilakukan sesuai dengan kaidah ilmu pertanian modern. (2) Faktor eksternal, yaitu lemahnya kegiatan pembinaan petani yang dilakukan oleh petugas PPL, sehingga kualitas sumber daya petani tidak meningkat. Padahal, salah satu persyaratan peningkatan produksi tani adalah peningkatan kapasitas kemampuan petani melalui kegiatan pemberdayaan petani. (3) Menyangkut faktor teknis, yakni keterbatasan sarana produksi tani, sehingga petani kesulitan memperoleh layanan saprodi.

Kondisi itu masih diperburuk oleh sempitnya pemilikan lahan pertanian. Fenomena keberadaan tanah *gontai* yang dimiliki oleh orang-orang dari luar seperti Alor Kecil dan Alor Besar menunjukkan proses marginalisasi petani masih terus berjalan. Sepetak demi sepetak lahan pertanian yang relatif subur di Dusun Bota beralih kepemilikannya pada orang luar.

Secara alamiah, bentuk topografi yang berupa perbukitan, tanah kapur, dan lapisan tanah subur (*top-soil*) yang tipis, sumber air tanah yang terbatas, curah hujan yang rendah, iklim yang tidak menentu, hama, serta bencana alam yang datang silih berganti, telah dirasakan sebagai kendala alamiah yang tidak bisa dihindari dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi tani.

Gejala tekanan penduduk menampakkan diri dalam bentuk banyaknya keluarga luas yang tinggal dalam satu rumah dan banyaknya penduduk yang bermigrasi keluar. Menilik dari pekerjaan

yang dilakukan migran di Batam yang hanya bekerja sebagai tenaga satpam, buruh pabrik, dan pembantu rumah tangga, maka bisa dipastikan bahwa tingkat pendidikan mereka umumnya rendah.

Gejala tekanan penduduk yang bertautan dengan nilai sosial budaya tampak ketika mengerjakan ladang dan memanen. Lahan seluas 50m x 50m sesungguhnya cukup dikerjakan oleh 2--3 orang tenaga kerja rumah tangga sendiri, tetapi moral sosial perdesaan tampaknya tidak mengizinkan untuk memilih tindakan seperti itu. Sikap moral menjunjung tinggi rasa solidaritas komunal yang di Jawa disebut "*guyub*", sangat dipegang teguh oleh masyarakat tani di Alor. Dalam kasus seperti ini yang terjadi bukan sekadar berbagi kemiskinan (*share poverty*) sebagaimana dikonsepsikan oleh Geertz (1963: 35), tetapi sudah lebih dari itu, yakni *shared destitute* atau berbagi kemelaratan (Marzali, 2003: 256).

Berbagai upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mengentaskan masyarakat dari lembah kemiskinan telah dilakukan, seperti pembangunan agroindustri, pengembangan agrobisnis, pengolahan produksi tani (*agroprocessing*), intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian, serta implementasi implementasi berbagai program pengentasan kemiskinan. Namun hasilnya belum juga mampu mengangkat petani dari lembah kemiskinan. Implementasi dari program-program ini kurang memberi tekanan pada segi pemberdayaan petani, sehingga kualitas dan kapasitas sumber daya manusia petani tidak banyak mengalami peningkatan. Dari sisi petani sendiri, upaya untuk meningkatkan pendapatan sudah dilakukan, misalnya apa yang dialami oleh keluarga Juma dan Ali Tonu. Akan tetapi, berbagai upaya itu tetap saja tidak dapat mengubah kondisi ekonomi rumah tangga, kecuali hanya untuk dapat tetap bertahan pada tingkat *survival* kendatipun optimalisasi tenaga kerja keluarga sudah dilakukan (Marzuki, 2003: 269).

Secara sosio kultural, untuk mendapatkan jaminan ketahanan pangan, mereka telah mempertahankan berbagai bentuk aturan adat

dan cara kerja gotong royong dalam menjaga solidaritas sosial masyarakat desa. Orang yang tidak menaati asas tolong-menolong tanpa pamrih dalam menjaga solidaritas sosial dan kebersamaan warga desa akan dikucilkan dari pergaulan. Dalam kehidupan masyarakat yang demikian, seseorang dituntut harus bisa merasakan kemelaratan orang lain, dan harus bisa berbuat untuk dapat berbagi kemelaratan dengan orang lain. Terdapat suatu pandangan bahwa mencari harta bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi akan lebih terpuji jika dapat berbagi dengan orang lain. Orang yang bekerja terlalu keras dan pada saat yang sama mengorbankan aktivitas sosial warga, bisa mengganggu terciptanya rasa kebersamaan, dan orang yang demikian, kelak bila meninggal dunia akan dikelilingi oleh kuda dan kerbaunya.

Temuan yang lain terkait dengan pola pertanian di Kabupaten Alor menunjukkan adanya kemiripan dengan tradisi budaya petani di Jawa. Kemiripan yang dimaksud adalah; (1) Bukan hanya ekologi sawah yang mampu menampung jumlah penduduk yang terus bertambah sebagai mana disinyalir oleh Geertz, tetapi ekologi perladangan pun telah diperlakukan sama, (2) Sifat masyarakat Alor yang menjunjung tinggi harmoni sosial dan kerja gotong royong tanpa pamrih, (3) Menikmati kekayaan sendiri tanpa memperhatikan derita orang lain dinilai sebagai perbuatan tercela, dan sifat orang Alor umumnya juga tidak tega melihat orang lain kelaparan, (4) Sikap hidup orang Alor yang mampu menekan kebutuhan hidup sampai pada tingkat yang paling rendah sekalipun. Perpaduan antara poin 1–4 inilah yang telah melahirkan *share poverty* (Geertz, 1963: 80-89).

Kemiripan lain dengan petani di Jawa tahun 1950-an adalah adanya sikap dan perasaan cukup puas bila kebutuhan hidup hari ini sudah tercukupi dan tidak lagi menginginkan lebih dari itu, dan orang akan merasakan ketenteraman hidup. Mengejar kekayaan dan harta dinilai sebagai perbuatan yang kurang terpuji. Sikap hidup yang seperti ini disebut "*limited needs*" atau "*oriental mysticism*" yang bertentangan dengan sikap dan pandangan hidup orang barat yang bersifat "*unlimited needs*" (Boeke, 1953: 37–58).

Kedua ahli tersebut melihat kondisi sosial ekonomi petani di Jawa dengan menggunakan pendekatan moral ekonomi. Menurut Scoot, asumsi dasar dari pendekatan ini melihat masyarakat petani dalam tingkah lakunya lebih dipandu oleh dua prinsip utama, yaitu *the norm of reciprocity* (adat tolong-menolong) dan *the right to subsistence* (hak untuk hidup pada paras Subsistence) (Scoot, 1981: 167). Kedua pedoman moral ini tercermin dalam hubungan sosial yang nyata di antara warga Desa Alila.

2.5.2 Saran-saran

Setelah panjang lebar diuraikan tentang sinergi kebijakan dan strategi kebijakan dalam hal ketahanan pangan, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

- (1) Pengembangan agrobisnis yang selama ini telah dilakukan perlu lebih ditingkatkan lagi menyangkut kegiatan pemberdayaannya;
- (2) Upaya peningkatan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab banyak pihak pada tataran implementasi yang dihadapkan pada lemahnya koordinasi sebab masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri dengan programnya. Oleh karena itu, perlu peningkatan koordinasi antarsektor di tingkat desa/kecamatan;
- (3) Peningkatan setiap tetes air untuk peningkatan sektor pertanian melalui kegiatan survei dan eksplorasi untuk mengetahui sumber-sumber air tanah yang ada hendaknya terus dilakukan. Pada saat yang sama, bangunan-bangunan irigasi teknis yang ada seperti sumur bor, bendungan, dan saluran-saluran irigasi teknis harus terus diperbaiki dan dimanfaatkan secara optimal guna mendukung program peningkatan ketahanan pangan;
- (4) Keberadaan lumbung pangan perlu didorong untuk dikembangkan;
- (5) Diversifikasi usaha tani dalam menunjang kebijakan penganekaragaman pangan harus terus didorong untuk menghindari ketergantungan pada beras, mengingat daerah Alor bukan merupakan daerah penghasil beras;

- (6) Upaya penciptaan peluang kerja di luar sektor pertanian perlu diupayakan terus. Sektor perikanan tangkap dan budi daya rumput laut sesungguhnya masih menyimpan potensi yang belum tergarap. Bila sektor perikanan ini dapat dikembangkan, maka akan dapat menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan pangan, terutama pemenuhan kebutuhan gizi dan protein yang selama ini masih menjadi masalah dalam memenuhi mutu asupan gizi dan protein yang tampak pada pola makan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2009. *Laporan Analisa Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Alor Tahun 2008*. Kalabahi: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor.
- _____. 2008. *Laporan Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Indikator SKPH Serta Usulan Intervensi Di Kabupaten Alor Tahun 2008*. Kalabahi: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor.
- _____. 2008. *Rekapitulasi Data Tingkat Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Indikator SKPG di Kabupaten Alor Tahun 2008*. Kalabahi: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor.
- _____. 2009. "Rekapitulasi Laporan Penimbangan Balita Tingkat Puskesmas Kokar Bulan Juni 2009."
- _____. 2009. "Rekapitulasi Data Bayi/Balita Gizi Buruk, BGM, 2T Juni 2009 Puskesmas Kokar."
- _____. 2008. *Kabupaten Alor dalam Angka, Tahun 2008*. Kalabahi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor.
- _____. 2008. *Kecamatan Alor Barat Laut dalam Angka 2008*. Kalabahi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor.

- _____. 2009. "Rekapitulasi Penimbangan Balita Tingkat Puskesmas Kokar Juni 2009".
- _____. 2009. "Rekapitulasi Data Bayi/Balita Gizi Buruk, BGM, 2T, Juni 2009 Puskesmas Kokar."
- _____. 2009. *Daftar Penerima Raskin Kabupaten Alor 2009*. Kalabahi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor.
- _____. 2009. *Daftar Penerima Program Bantuan Langsung Tunai 2009*. Kalabahi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor.
- _____. 2008. *Daftar Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 2008*. Kalabahi: Dinas Sosial Kabupaten Alor.
- Boeke, J.H. 1953, "Economics and Economic Policy in Dual Societies". Dalam Harlem HD dkk, *The Condition of Agricultural Growth*. London: Alen and Unwinn.
- Bria, Lorens Maxi Un. 2007. *Tetes Embun Pulau Kenari*. Alor: Caritas Publishing House Indonesia (CPHI).
- Geertz, C. 1963. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesian*. Berkely: University of California Press.
- Heryani, Harun. 2001. "Pengalaman Empiris Manajemen Ketahanan Pangan". Dialog dan Lokakarya, *Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Reformasi*, Bogor, 2--3 Oktober 2001.
- Hidayat, Elok Wahyu dkk. 2007. *Pembangunan Kabupaten Alor Melalui Teknologi Tepat Guna*. Jakarta: LIPI Press.
- Itta, Hans. 2008. *50 Tahun Kabupaten Alor*. Jakarta: Hanfed Institute.
- Irsjad, Muhammad dkk. 1995. *Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Marzali, Amri. 2003. *Strategi Peisan Cikalong Dalam Menghadapi Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Said Rusli. 1995. *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin, Suatu Tinjauan dan Alternatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sapuan Gafaar. 2007. *Surplus Beras Kok Impor? Belajar Cepat Pernik-Pernik Perberasan Kita*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Scoot, James. 1981. *The Koral Economy of the Peasant*. New Haven: Yale University Press.

Sumber Informasi

- Kepala Bagian Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor.
- Kepala Seksi Bidang Peningkatan Produksi dan Distribusi, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor.
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Alor.
- Kepala Seksi Bidang Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Alor.
- Sejumlah PPL di Sebanjar Kecamatan Alor Kecil.
- Kepala Desa Alila Kecamatan Alor Barat Laut.
- Sekretaris Desa Alila Kecamatan Alor Barat Laut.
- Petugas Medis di Puskesmas Kokar, Kecamatan Alor Barat Laut.
- Ketua Adat Suku Kabola di Tulta, Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut.
- Keluarga Juma, Dusun Bota, Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut.
- Keluarga Ali Tonu, Dusun Bota, Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut.

BAB III

PANDANGAN HIDUP DAN BUDAYA PANGAN MASYARAKAT DESA ALILA

Oleh: Sihol Farida Tambunan

3.1 Pendahuluan

Secara filosofis, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk kehidupan karena tanpa pangan manusia tidak dapat hidup. Pada saat kebutuhan pangannya tercukupi, kesehatan tubuhnya akan menjaga kesehatan rohani dan jiwanya, sehingga ia tetap sehat sebagai manusia seutuhnya. Kebutuhan pangan tidak hanya berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memperoleh makanan, tetapi juga menyangkut apa yang dimakan. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral dan lemak, serta berbagai gizi lainnya. Apabila kebutuhan pangan seseorang terpenuhi, dapat diartikan dia memiliki ketahanan pangan yang baik.

Menurut Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian,¹ pangan didefinisikan sebagai bahan-bahan yang dihasilkan atau berasal dari nabati/hewani yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan manusia untuk memperoleh tenaga guna membentuk/memperbaiki jaringan dan pengaturan metabolisme tubuh. Sementara definisi ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman merata, dan terjangkau. Pandangan ini sesuai dengan pandangan kesehatan dan gizi yang mengartikan ketahanan pangan tidak hanya cukup dalam jumlah penyediaan pangan yang dikonsumsi penduduk

¹ Definisi yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

suatu bangsa, akan tetapi secara kualitas pangan tersebut juga harus terjamin kebersihannya, bebas dari kandungan racun kimia yang dapat mengganggu kesehatan manusia, dan cukup kandungan gizinya sesuai dengan syarat kebutuhan fisik manusia yang mengonsumsinya (Hadiwigeno dalam Soediyono, 2000). Ketahanan pangan juga mempunyai arti ekonomi, dan politik di mana “ketahanan pangan diartikan sebagai: “suatu keadaan di mana semua rumah tangga baik fisik maupun ekonomi, mempunyai kemampuan mencukupi kebutuhan pangan untuk seluruh anggota keluarganya”. Ketahanan pangan dalam kondisi ini merupakan suatu cara pandang terhadap kondisi suatu masyarakat maupun individu dalam menyikapi kebutuhan pangan dengan melihat (1) Ketersediaan pangan, (2) Stabilitas pangan, dan (3) Kemampuan untuk mendapatkan dan memproduksi (aksesibilitas pangan).

Konsep ketahanan pangan untuk menunjang pertumbuhan manusia seutuhnya ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang berketahanan pangan secara berkelanjutan. Indonesia memiliki badan yang mengatur tujuan tersebut, yaitu Badan Ketahanan Pangan. Semua departemen terkait seperti Departemen Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, serta dinas-dinas yang ada di daerah sebagai pelaksana program yang bersangkutan paut dengan ketahanan pangan ikut terlibat dalam badan ini. Para gubernur merupakan penanggung jawab langsung keberlangsungan ketahanan pangan di daerahnya. Tugas badan ini adalah melihat bagaimana lumbung-lumbung pangan nasional sampai keluarga terisi, dan bagaimana pengelolaan hasil panen petani yang berhubungan dengan masalah pangan dilaksanakan, serta memantau hasil panen untuk manajemen pangan. Badan ini dalam melaksanakan tugasnya diawasi langsung oleh presiden.

Ketahanan pangan di Indonesia banyak dilihat dari tingkat konsumsi beras yang dibutuhkan seseorang, atau dengan kata lain, berapa jumlah persediaan beras yang ada di suatu daerah. Hal ini tidak lepas dari melihat beras sebagai salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, baik penduduk yang berada di

wilayah barat maupun timur Indonesia. Padahal, pada zaman dahulu, bagi nenek moyang masyarakat Indonesia bagian timur seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), jagung dan bukan beras merupakan makanan utama. Kondisi itu dipengaruhi oleh alamnya yang sangat cocok untuk ditanami jagung, sebaliknya kawasan itu kurang cocok untuk tanaman padi. Akan tetapi, realitas zaman dahulu itu kini sudah berubah karena masyarakatnya sudah banyak yang beralih menjadikan beras sebagai makanan pokok kendatipun jagung tidak mereka tinggalkan. Padahal harga beras di provinsi itu relatif mahal karena sebagian besar kebutuhan beras didatangkan dari daerah lain.

Kekurangan beras di Provinsi NTT sering diindikasikan sebagai tanda terjadinya kerawanan pangan di daerah itu. Padahal, masyarakat terbiasa mencari alternatif pangan pengganti bahan makanan yang biasa mereka konsumsi. Sebagai contoh, penduduk di Pulau Lembata, Kabupaten Alor, biasa mengonsumsi buah bakau untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, orang yang tidak mengerti kondisi itu sudah mengaggap bahwa penduduk yang mengonsumsi buah bakau itu dalam kondisi rawan pangan karena memang di beberapa tempat kebiasaan seperti itu tidak lazim. Dengan demikian, terlihatlah bahwa faktor ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan budaya dan pandangan hidup suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pandangan hidup dan budaya masyarakat di Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut (Abal), Provinsi NTT dalam memengaruhi ketahanan pangan mereka, dan juga melihat aspek ekonomi dan politik serta gizi yang melatarbelakanginya. Desa ini dipilih untuk mewakili berbagai desa di Kabupaten Alor yang sering ditengarai sebagai daerah rawan pangan.

Kabupaten Alor ini merupakan daerah dengan ketahanan pangan sebagian besar penduduknya yang agak mengawatirkan karena termasuk dalam kondisi rawan pangan. Menurut pemerintahan Provinsi NTT tahun 2005, kabupaten ini merupakan salah satu

wilayah yang memiliki risiko rawan pangan yang cukup signifikan. Kendati desa-desa yang ada di kabupaten ini tidak ada yang memiliki tingkat kerawanan pangan yang berisiko tinggi, namun dari 174 desa, hanya 8 desa dengan penduduk 395 jiwa yang memiliki daerah yang aman dari rawan pangan. Sisanya, 20 desa dengan jumlah penduduk 31.502 jiwa memiliki risiko rawan pangan ringan, dan 53 desa dengan jumlah penduduk 9.127 jiwa memiliki risiko rawan pangan sedang.² Kabupaten ini memang masih termasuk kabupaten yang rawan pangannya termasuk ringan dan sedang, sehingga diasumsikan masyarakat di daerah ini sebenarnya masih bisa makan dan tidak kelaparan. Hanya saja, kandungan gizi yang terkandung dalam makanan yang mereka konsumsi kurang memadai.

Secara makro, sejak pemerintah daerah setempat mengadakan Gerbadestan (Gerakan Kembali ke Desa Pertanian dan Kelautan) pada tahun 1999, memang terjadi peningkatan hasil pangan di Kabupaten Alor. Akan tetapi, ketersediaan pangan yang tercukupi itu baru secara kabupaten. Sebab menjadi pertanyaan, apakah masyarakat Alor terutama yang berada di daerah pegunungan atau yang memiliki mata pencaharian hanya sebagai petani berladang, berpindah dan nelayan kecil dapat mengakses ketersediaan pangan tersebut?

Permasalahan muncul karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pangan masyarakat di perdesaan belum sesuai dengan standar pangan, terkait dengan gizi yang harus dikonsumsi oleh seseorang seperti yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Masyarakat di perdesaan masih dalam kondisi rawan pangan sebab zat gizi yang mereka konsumsi tidak sesuai dengan standar kesehatan. Mereka telah memiliki budaya turun-temurun, yaitu makan dengan hanya mengutamakan jagung dan padi sebagai sumber karbohidrat, sementara sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan kacang-kacangan sebagai sumber vitamin, mineral dan karbohidrat yang harganya terlalu mahal bagi kebanyakan masyarakat miskin di perdesaan di Kabupaten Alor kurang

² Sumber: Pemerintahan Provinsi NTT, 2005

dikonsumsi. Salah satu penyebab gizi buruk pada masyarakat Alor adalah kalau mereka sudah dapat mengonsumsi jagung dan ubi-ubian atau makanan berkarbohidrat tinggi sebagai makanan pokok dianggap sudah mencukupi. Apabila mereka hidup hanya untuk melakukan kegiatan berladang berpindah saja seperti zaman nenek moyang mereka, maka keadaan itu masih dapat diterima. Pada masa itu, pekerjaan yang mereka lakukan lebih mengandalkan otot daripada otak, sehingga yang mereka butuhkan lebih banyak adalah zat pembangun tenaga atau karbohidrat. Akan tetapi, pada zaman modern ini, masyarakat Desa Alila memiliki anak-anak yang bersekolah, sehingga dibutuhkan jenis makanan lain selain penghasil karbohidrat, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan penghasil vitamin dan mineral, daging, telur, dan ikan penghasil protein. Namun, mereka sangat sulit untuk mendapatkannya. Faktor kemiskinan menjadi penyebab mereka tidak dapat mengakses jenis makanan tersebut walaupun ketersediaannya dijamin.

Budaya pangan yang dimiliki oleh masyarakat desa di Alor tak dapat dilepaskan dari pandangan hidup mereka yang sangat menggantungkan diri terhadap alam. Alam yang sering tidak bersahabat, terutama pada kegiatan pertanian, mengakibatkan produksi pangan memberikan hasil yang terbatas pada masyarakat desa. Kendati demikian, masyarakat desa menerima saja kondisi ini dan pasrah pada apa yang disediakan alam itu. Mereka sudah puas, asal hidup mereka dapat berlanjut tanpa ada upaya untuk melakukan kegiatan pengolahan alam secara total untuk dapat meningkatkan hasil pertaniannya.

Pandangan hidup dan budaya pangan suatu masyarakat sangat menentukan ketahanan pangan. Pada saat masyarakat bersikap statis terhadap perubahan, maka budaya nenek moyanglah yang dipertahankan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pandangan hidup mereka tetap diarahkan ke masa lampau. Kalau pada saat mereka melihat perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan di daerah lain yang disebut sebagai kemajuan kebudayaan, tetapi mereka tidak ingin atau tidak memiliki semangat untuk berubah, maka tidak akan

ada perubahan pada kondisi pangan mereka. Tingkat ketahanan pangan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh etos kerja yang dimiliki sebab etos kerja itu merupakan semangat untuk menghasilkan sesuatu. Ketergantungan pada alam biasanya menimbulkan etos kerja yang lemah.

3.2 Potret Ketahanan Pangan Kabupaten Alor

Kabupaten Alor memiliki luas 2.864 kilometer persegi yang terdiri dari berbagai pulau dengan pulau utamanya adalah Pulau Alor dan Pantar. Kabupaten Alor pada pertengahan tahun 2008, tepat pada ulang tahunnya ke-50 memiliki penduduk sebanyak 178.974 jiwa. Kabupaten Alor ibu kotanya adalah Kalabahi, letaknya berada di Pulau Alor. Kota Kolabahi ini sudah relatif maju dengan munculnya rumah-rumah mewah milik para pedagang keturunan Cina serta tumbuhnya berbagai fasilitas modern seperti hotel dan kantor-kantor pemerintah. Namun, kemajuan kota Kalabahi tidak diikuti oleh kecamatan-kecamatan lain, bahkan dengan desa-desa terdekat dengan kota tersebut. Desa-desa di Kabupaten Alor, terutama yang berada di pegunungan tetap saja terpececil dan tertinggal kendatipun pemerintah sudah membangun banyak jalan untuk membuka keterpencilan desa-desa tersebut.

Kepulauan Alor sudah tidak asing bagi bangsa Eropa. Pelaut Spanyol bernama Ferdinand Maggeland pada tanggal 9 sampai 25 Januari 1522 pernah mengunjungi wilayah ini dengan kapal Victoria. Antonio Pigafeta sebagai penulis catatan peristiwa itu mengatakan, “penduduk pulau ini buas seperti hewan dan makan daging manusia... Mereka tidak mempunyai raja dan tidak berpakaian. Mereka hanya memakai kulit kayu, kecuali kalau pergi ke medan perang” (ADM Parera, 1994 dalam Itta, 2008: 13). Pada awalnya, orang Eropa itu menganggap orang Alor sebagai orang-orang terburuk di India. Dalam catatan itu juga dikatakan bahwa penduduk Alor memberikan bahan makanan kepada kelompok Maggeland berupa kambing, kelapa, dan lilin. Kelompok Maggeland menggantinya dengan sekarat besi tua.

Sampai tahun 1990-an, Alor masih identik dengan keterbelakangan, keterisolasian, dan kemiskinan. Pada waktu itu, Alor dianggap sebagai tempat yang penuh dengan kekerasan dan ilmu hitam. Oleh sebab itu, banyak orang dari luar Alor yang takut datang ke pulau yang dikelilingi oleh laut yang indah itu. Harga dan jati diri orang Alor yang tertutup dan terisolasi itu kemudian diubah oleh Ans Takapaela pada waktu beliau menjadi Bupati Alor. Beliau membuka keterasingan tersebut, salah satunya dengan cara membentuk program Gerbadestan (Gerakan kembali ke desa dan pertanian) sejak 1 April 1999, dan pada periode 2004--2009, program itu diperluas ke sektor kelautan. Gerabadestan yang terdiri dari program-program; (1) Pemberdayaan ekonomi rakyat, (2) Peningkatan kualitas SDM, (3) Pembarungan prasarana, dan (4) Penguatan kelembagaan. Dengan program ini diharapkan masyarakat Alor dapat menolong dirinya sendiri untuk menghadapi keganasan alam dan kemiskinan. Pembangunan sosial budaya, swadaya masyarakat, dan kemitraan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat.

Saat ini, Kabupaten Alor mengandalkan hasil perkebunan sebagai produk unggulan. Sejak dicanangkannya program tersebut, pertumbuhan ekonomi Alor meningkat seiring dengan meningkatnya hasil komoditas perkebunan unggulan, seperti pala, lada, cengkeh, kopi, dan cendana. Komoditas ini menyertai hasil perkebunan unggulan lainnya seperti kenari, kemiri, dan kelapa. Sementara saat ini, Pemerintah Kabupaten Alor sedang meningkatkan hasil perkebunan mangga dengan harapan komoditas ini dapat menjadi ekspor unggulan dari Kabupaten Alor. Program Gerabadestan yang bermanfaat bagi masyarakat Alor diapresiasi dengan menganugerahkan Piagam Penghargaan Trofi Ketahanan Pangan Regional kepada Bupati Alor Ans Takapaela tahun 2004. Pada tahun yang sama, Kabupaten Alor dalam lomba ketahanan pangan memperebutkan piala Gubernur NTT kategori Kelembagaan Aparat Ketahanan Pangan menjadi juara I tingkat Provinsi NTT.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor Provinsi NTT mengeluarkan Neraca Bahan Makanan

(NBM) Kabupaten Alor,³ yang merupakan tabel ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten Alor. NBM ini memuat informasi tentang pengadaan (produksi, cadangan/stok, impor/ekspor), penggunaan (pemakaian untuk pakan, benih/bibit, industri pangan dan non pangan), serta penyediaan pangan untuk konsumsi penduduk pada suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk mengetahui nilai gizi bahan pangan, maka angka ketersediaan pangan per kapita per hari diterjemahkan ke dalam energi protein dan lemak. Menurut tabel ketahanan pangan tersebut, ketersediaan pangan di Kabupaten Alor sebenarnya cukup memadai. Pengadaan pangan beras Alor tahun 2008 tercatat sebanyak 13.311 ton yang berasal dari produksi sendiri sebanyak 4.729 ton dan sebanyak 9.800 ton lagi berasal dari luar NTT. Pengadaan jagung sebagai makanan pokok masyarakat selama tahun 2008 tercatat sebanyak 20.250 ton yang berasal dari produksi sendiri.⁴ Kabupaten ini juga menyediakan padi-padian, yaitu makanan berpati sebagai sumber karbohidrat; buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral; ikan, daging, dan telur sebagai sumber protein.

Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketersediaan pangan itu dapat diakses oleh masyarakat desa di Kabupaten Alor, di mana menurut data BPS, mereka dikategorikan sebagai masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan? Sebagaimana desa-desa lainnya di Provinsi NTT, masyarakat di desa-desa di Kabupaten Alor merupakan masyarakat dengan daya akses yang sangat rendah untuk dapat menjangkau ketersediaan pangan tersebut, salah satunya akibat daya beli yang kurang atau kemiskinan.

Kemiskinan menyebabkan daya beli rendah, sehingga kemampuan untuk memperoleh pangan menjadi terbatas. Selain itu,

³ Lihat keseluruhan tabel pada laporan tersebut.

⁴ Data mengenai keadaan pengadaan pangan di Kabupaten Alor didasarkan pada Laporan Analisa Neraca Bahan Makanan Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor 2009.

harga bahan makanan setiap tahun semakin mahal, sementara mata pencaharian masyarakat perdesaan tetap saja tidak berubah, yaitu sebagai petani peladang berpindah atau nelayan kecil. Oleh karena itu, ketersediaan pangan itu hanya berada di pasar-pasar kecamatan di Kabupaten Alor. Adapun masyarakat yang berada di daerah pegunungan sangat sulit untuk mengaksesnya.

Masyarakat di perdesaan sejak zaman nenek moyang sudah biasa memenuhi kebutuhan pangannya secara *subsistence*. Hasil pertanian seperti jagung, padi ladang, dan umbi-umbian tidak mereka jual, tetapi disimpan untuk persediaan ke depannya. Akan tetapi, persediaan bahan makanan yang disimpan itu hanya mencukupi kebutuhan karbohidrat saja. Mereka tidak begitu memperhatikan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi, seperti yang berasal dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Oleh sebab itu, mereka kurang menanam sumber gizi lain, baik yang berasal dari sayur-sayuran maupun buah-buahan kecuali daun singkong, daun kelor, dan daun pepaya. Akibatnya, kebutuhan gizi seperti vitamin, protein, dan mineral kurang diperoleh oleh kebanyakan masyarakat desa di Provinsi NTT, termasuk di Kabupaten Alor. Kondisi ini disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah pengetahuan masyarakat akan kebutuhan gizi yang sangat minim.

Pada umumnya, tujuan maka masyarakat di perdesaan biasanya hanya untuk kenyang agar dapat melakukan aktivitas fisik seperti bertani dan mencari ikan di laut. Kandungan karbohidrat yang dikonsumsi memang terpenuhi untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fisik seperti itu, tetapi untuk kebutuhan anak-anak dalam menunjang pertumbuhan fisik dan mental belum terpenuhi karena anak-anak itu memerlukan kandungan vitamin, protein, dan mineral. Namun, banyak di antara penduduk perdesaan tidak begitu memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut. Apabila mereka mempunyai uang, hal yang utama mereka pikirkan adalah beras, sementara kebutuhan jagung sudah terpenuhi yang mereka peroleh dari kebun sendiri. Adapun kebutuhan akan sayur mayur menjadi kebutuhan sekunder. Sementara penduduk yang bermata pencaharian

mencari ikan di laut, ikan hasil tangkapan biasanya di jual dan sebagian kecil saja yang dikonsumsi sendiri.

Faktor lain yang menyebabkan kerawanan pangan di Kabupaten Alor adalah cuaca atau iklim. Kabupaten ini sering dilanda musim kering yang berkepanjangan, menyebabkan hasil pertanian selalu kurang untuk kebutuhan sepanjang tahun. Selain itu, seorang pejabat kantor di Dinas Perkebunan Kabupaten Alor mengungkapkan bahwa rendahnya etos kerja masyarakat perdesaan merupakan penyebab kemiskinan, sehingga akses terhadap pangan pun menjadi rendah. Petani Alor merupakan petani lahan kering. Pekerjaan ini tidak terlalu sulit karena tanaman yang ditanam tidak terlalu memerlukan perawatan intensif selain bergantung kepada kondisi alam. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu giat mengolah lahan, padahal alam Kabupaten Alor sering mengalami musim kering sehingga kegiatan pertanian tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Akan tetapi, mereka kebanyakan hanya menerima kondisi tersebut tanpa berusaha mengolah lahan menjadi areal pertanian yang memerlukan perawatan khusus.

3.3 Ekologi Pertanian Kabupaten Alor Sebagai Penyebab Kemiskinan

Menurut peta zona agroekologi (ekologi pertanian) Provinsi NTT, Kabupaten Alor secara keseluruhan merupakan lahan yang merupakan campuran tanaman pangan dan perkebunan. Kabupaten ini merupakan gugusan kepulauan dan terdiri dari wilayah pesisir pantai sebagai dataran rendah dan dataran tinggi berupa pegunungan. Kondisi topografi seperti itu merupakan salah satu penghambat terjangkaunya pengambilan produksi pertanian dan perkebunan yang berada di daerah pegunungan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupten Alor sejak tahun 80-an berusaha membuka akses ke pedalaman dengan membangun jalan-jalan yang dapat menjangkau pegunungan. Tak heran kalau saat ini dusun-dusun di pegunungan Alor sudah banyak yang dapat dijangkau kendaraan roda empat.

Daerah yang berada di pegunungan disebut daerah kepala burung dan masyarakatnya disebut sebagai orang gunung, sedangkan orang bawah yang dekat dengan laut disebut sebagai orang pantai. Pulau Alor memang dikelilingi laut yang dapat menunjang ketahanan pangan dalam bidang protein, tetapi sayangnya masyarakat Alor kurang akrab dengan budaya mencari ikan di laut walaupun mereka tinggal di daerah laut. Mereka bukan berbudaya nelayan, melainkan petani, sehingga mereka lebih memfokuskan mata pencahariannya di daratan, padahal usaha pertanian mereka sering mendapat bencana alam, seperti hama tikus, hujan lebat yang menyebabkan banjir, dan kekeringan. Pekerjaan melaut baru dilakukan setelah para nelayan dari Sulawesi datang dan mencari ikan di sana. Mereka pun banyak belajar dari nelayan yang berasal dari Sulawesi itu.

Sebenarnya, tanah di Kabupaten Alor yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung itu relatif subur dibandingkan dengan berbagai lokasi lainnya di Provinsi NTT. Berbagai tanaman sayur-sayuran dan perkebunan tumbuh subur di wilayah kepulauan tersebut, sehingga walaupun tanaman itu tidak memerlukan pupuk buatan, hasilnya sangat baik. Tetapi sayuran itu kebanyakan dikonsumsi oleh orang kota, bukan oleh orang desa. Berbagai macam sayuran seperti sawi hijau, sawi putih, dan kol dijual di pasar Kalabahi. Penyebabnya adalah harga sayuran relatif mahal menurut ukuran desa. Cuaca yang tidak baik untuk pertanian sering membuat hasil pertanian tidak maksimal, ditambah pengetahuan petani Alor yang terbatas untuk menerapkan cara bertani yang baik. Mereka sangat menggantungkan hasil pertanian kepada kemurahan alam. Kemampuan bertanam mereka masih banyak yang terbatas pada pertanian lahan kering. Perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat Alor sebenarnya berpengaruh banyak terhadap volume hutan yang semakin sedikit yang akhirnya mengakibatkan banjir di daerah pertanian mereka karena fungsi hutan sebagai penyerap air tidak lagi maksimal.

Biasanya, pada akhir musim kemarau masyarakat dengan segera akan menanam jagung, sehingga pada saat hujan tiba, tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik. Pada saat musim kemarau tiba lagi,

diharapkan tanaman jagung itu sudah berbuah dan dapat dipetik untuk persediaan makanan selama musim kemarau. Apabila masyarakat Alor terlambat menanam jagung yang berakibat hasil panen berkurang, mereka akan mengubah menu makanan dengan memakan umbi-umbian yang diperoleh dari tanaman di ladang. Sekiranya mereka masih mempunyai uang, barulah beras dibeli di toko kalau padi ladang pun sudah tidak ada lagi.

Permasalahan agroekologi atau ekologi pertanian yang pokok dalam ketahanan pangan di Kabupaten Alor adalah pendistribusian bahan pangan dari daerah surplus ke daerah minus. Daya beli masyarakat rendah, sehingga mereka sulit mengakses bahan pangan selain karena harganya yang mahal akibat tingginya biaya transportasi untuk mengangkut bahan makan itu dari Kalabahi ke desa-desa yang berada di balik-balik gunung. Biasanya, beras yang berasal dari luar Pulau Alor diturunkan di pelabuhan yang ada di Kalabahi. Sebenarnya, untuk mengurangi ketergantungan pangan dengan daerah lain, Kabupaten Alor sendiri sudah mulai meningkatkan hasil pangannya secara swadaya, yaitu dengan meningkatkan penanaman berbagai tanaman pangan yang cocok dengan agroekologi desa. Oleh karena itu, dari segi ketahanan pangan sebenarnya Kabupaten Alor tidak mengalami masalah karena bahan pangan yang tersedia relatif mencukupi. Akan tetapi, masyarakat di perdesaan masih sulit mengaksesnya karena mahalnya biaya pendistribusian. Bahan pangan yang dihasilkan di suatu desa tidak mudah untuk dijual di desa lain dengan jarak yang relatif jauh dan biaya transportasi yang mahal. Akibatnya, para petani dari pegunungan harus turun gunung menjual hasil pertaniannya dan kalau mau menjualnya ke pulau lain, maka dia harus menggunakan perahu. Persoalan agroekologi dengan wilayah yang bergunung-gunung itu ternyata menjadi salah satu penyebab gizi buruk masyarakat.

Keadaan alam seperti cuaca buruk yang sering terjadi juga menjadi permasalahan agroekologi lainnya. Curah hujan yang pendek, badai, dan hama yang merusak tanaman menjadi penghambat utama kegiatan pertanian di Kabupaten Alor. Alam Alor sebagaimana

terjadi di berbagai tempat di Provinsi NTT termasuk alam yang sering tidak cocok untuk kegiatan pertanian. Kekeringan yang berkepanjangan dan musim hujan yang berlangsung singkat tetapi sering dalam volume yang besar mengakibatkan bibit yang sudah ditanam menjadi kekeringan di musim kemarau, ataupun busuk karena terendam air akibat volume air yang terlalu besar. Kondisi alam yang buruk ini juga ditambah dengan adanya angin kencang, air yang langka, tingkat kesuburan tanah yang rendah, dan sisi pengolahan tanah pertanian yang masih mengandalkan otot manusia, parang, dan linggis (Itta, 2008: 1--2).

Kondisi iklim yang buruk ini juga menjadi penyebab kondisi gizi buruk masyarakat pedesaan Alor. Saat ini memang masyarakat pedesaan di Alor banyak yang sedang mengadakan diversifikasi ekonomi dengan menggeser mata pencaharian ke laut, yang juga bersangkut paut dengan diversifikasi pangan menuju pola makan yang beragam. Pemerintahan Kabupaten Alor juga meningkatkan sektor perkebunan dengan mendorong warganya menanam tanaman alternatif seperti umbi-umbian, kelapa, jagung, dan pisang agar dapat diperdagangkan. Lumbung desa pun digalakkan dengan menyimpan bahan makanan di lumbung-lumbung desa yang merupakan persediaan untuk musim kemarau.

Kemiskinan pun menjadi penyebab utama terjadinya kerawanan pangan. Akibat kemiskinan, mereka tidak mampu untuk membeli makanan dengan berbagai variasi. Pekerjaan sebagai peladang berpindah tidak akan dapat membuat mereka keluar dari kemiskinan tersebut. Kemiskinan yang ada pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Alor dapat disebut sebagai kemiskinan absolut karena tingkat pendapatan mereka berada di bawah tingkat pendapatan minimum. Apabila pendapatan berada di atas garis yang ditentukan, maka pribadi atau keluarga bersangkutan tidak lagi miskin (Haba dkk, 2000: 5).

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Alor juga dapat dikategorikan sebagai kemiskinan kultural yang merupakan: “budaya

yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi disebut mentalitas atau kebudayaan kemiskinan. Hal itu sebagai akibat dari budaya miskin, seperti masyarakat yang pasrah dengan keadaannya dan menganggap bahwa mereka miskin karena turunan orang tua atau nenek moyangnya yang miskin, sehingga tidak ada usaha untuk maju” (Wiranta, 2007: i).

Kabupaten Alor sebenarnya menghasilkan banyak hasil perkebunan seperti kemiri, kenari, dan jambu mete. Hanya saja, masyarakat kurang mendapat hasil secara memadai karena hasil bumi itu banyak yang dikirim ke luar Pulau Alor secara perorangan. Pedagang antarpulau ini mendatangi langsung para pemilik kebun dan menjual hasilnya di pulau lain. Dengan transaksi yang demikian, tentu saja Pemerintah Kabupaten Alor tidak dapat mengontrol volume hasil bumi yang dikirim ke luar Pulau Alor, baik untuk penentuan harga maupun untuk memperoleh retribusi yang memadai. Oleh karena itu, pernyataan ”uang dari Kabupaten Alor tidak singgah di Alor” sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan yang berasal dari luar Provinsi NTT namun bertugas di sana ada benarnya.

Kondisi alam yang sering merusak pertanian di Kabupaten Alor memang membuat masyarakatnya seakan pontang-panting dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi dalam kondisi ini, budaya Alor tumbuh sebagai penyemangat dan pemberi harapan untuk hidup di tengah alam yang keras. Masyarakat Alor memiliki budaya dengan tarian *lego-lego*. Gerakan dalam tarian ini membuat para penarinya berpelukan satu sama lain sebagai perlambang cinta kasih dan kesatuan dalam menghadapi persoalan hidup. Tari-tarian yang ditarikan secara berkelompok ini menunjukkan karakter dasar dari masyarakat desa di Alor yang senang akan kebersamaan, saling menerima, dan saling bergotong royong. Tari-tarian ini dilengkapi dengan pantun dan syair yang menunjukkan kebersamaan masyarakat. Syair yang memacu semangat pantang menyerah dalam membangun kampung halaman terdapat dalam lagu *Kuli mati-mati Hati Tiwang Leso*. Dalam lagu tersebut terdapat syair *dikte date ite*

lewo tanah yang artinya: "baik tidak baik, ini tetap kampung halaman kita" (Itta, 2008: 25).

3.4 Potret Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor

Desa Alila berada di Pulau Alor, berjarak kurang lebih 30 kilometer dari kota Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, dengan waktu tempuh sekitar setengah jam menggunakan kendaraan bermotor. Desa Alila memiliki luas wilayah sekitar 3.428,75 ha, terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Desa ini terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Bota, Beauruhing, dan Tulta.

Desa Alila memiliki batas-batas wilayah yang bervariasi. Sebelah utara berbatasan dengan laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Alila Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Otvai dan Kelurahan Adang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Putih atau Alila Timur. Desa Alila merupakan bagian dari Kecamatan Alor Barat Laut (Abal) yang beribu kota Kokar. Jarak Kokar dengan Desa Alila tidak begitu jauh dan dapat ditempuh sekitar 10 menit naik motor. Hal ini membuat ibu kota kecamatan ini seolah-olah merupakan bagian dari Desa Alila itu sendiri. Masyarakat Desa Alila hampir setiap hari berkunjung ke Kokar untuk berbelanja ikan serta kebutuhan sembako yang banyak dijual di warung dan pasar Kokar yang buka pada pagi hari. Selain itu, mereka ke Kokar untuk bekerja sebagai nelayan ataupun untuk memfotocopi, termasuk bepergian ke Kalabahi karena di Kokar terdapat kendaraan umum berupa bus atau angkot menuju ke Kalabahi atau sebaliknya, dengan ongkos Rp7.000 sekali jalan.

Masyarakat Kokar sangat beragam baik agama maupun etnis. Agama yang dianut penduduknya adalah Islam dan Kristen. Sementara etnis yang ada di Kokar mulai dari etnis Adang, Kabola yang merupakan etnik asli kepulauan Alor, sampai etnik pendatang seperti Buton dari Sulawesi, Timor, dan Tionghoa. Etnik-etnik pendatang ini kebanyakan memegang peranan penting di bidang

perekonomian di Kecamatan Abal. Mereka ini adalah pengusaha-pengusaha yang memenuhi kebutuhan masyarakat Kokar dan sekitarnya. Pengusaha asal Buton merupakan pemilik kapal rumpung untuk mengambil ikan, sementara penduduk asli Desa Alila dan desa-desa lainnya bekerja pada nelayan-nelayan dari Buton tersebut. Pengusaha angkutan dan warung di Kokar berasal dari etnik Timor, sementara pengusaha kebutuhan sehari-hari mulai batu bata sampai sembako dipegang oleh etnik Tionghoa.

3.4.1 Sejarah Desa Alila

Wilayah Desa Alila dulunya masuk ke dalam Kerajaan Pureman yang berada di Pulau Alor. Tadinya, di Pulau Alor ada 9 kerajaan, kemudian ketika zaman kolonial Belanda menjajah wilayah ini, kerajaan tersebut diciutkan menjadi 5 kerajaan. Desa Alila terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Bota, Beauruhing, dan Tulta. Dusun Bota sekitar tahun 1960-an adalah lahan kosong, namun lama kelamaan penduduk dari Kecamatan Alor Besar mulai berdatangan dan berkebun di dusun itu. Mereka membuka kebun dengan menanam jagung dan singkong. Tanaman ini tidak memerlukan air dalam volume yang besar, sehingga mereka tidak perlu menjaganya. Oleh karena itu, pemilik kebun dapat tetap tinggal di Alor Besar. Namun, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan pemilik kebun dari Alor Besar ini mulai menempati kebunnya sebab wilayah tersebut ternyata cukup subur, sehingga layak dijadikan sebagai daerah perkebunan sekaligus permukiman.

Kemudian, penduduk dari pegunungan yang ada di Dusun Tulta juga ikut turun ke daerah pantai Bota pada tahun 1960-an, mengikuti jejak orang Alor Besar maupun orang Alor Kecil yang sudah terlebih dahulu bermukim di sana. Mereka ini membeli tanah dari orang Alor Besar yang telah lebih dahulu memilikinya. Sampai saat ini, masih banyak orang dari Dusun Tulta yang turun ke Bota dan membeli tanah dari orang Alor Besar sebagaimana yang dilakukan oleh Kepala Desa Alila. Tanah di Bota bukanlah tanah ulayat seperti tanah yang berada di Dusun Tulta yang berada di pegunungan,

sehingga tanah-tanah di Bota dapat diperjualbelikan. Sementara di Dusun Tulta, tanahnya kebanyakan dimiliki oleh keluarga, sehingga kalau mau dijual harus melalui musyawarah adat.

Penduduk Bota yang turun dari Tulta bercampur baur dengan penduduk dari Alor Besar yang menetap atau berkebun di Dusun Bota, termasuk orang Alor Kecil, orang Sebanjar, dan orang Sulawesi. Dengan adanya penduduk baik dari Alor Besar maupun dari Tulta, mau tidak mau terjadi pelebaran wilayah. Selain untuk berkebun, penduduk Tulta yang turun ke Bota juga banyak karena adanya percampuran kekerabatan setelah terjadi pernikahan dengan orang Alor Besar. Dengan kata lain, setelah orang Alor Besar menikah dengan orang Tulta, mereka memilih tinggal di Dusun Bota. Kendati demikian, sebagian besar di antara penduduk Tulta yang turun ke Bota masih memiliki tanah perladangan di Dusun Tulta, sehingga hampir setiap hari mereka pergi ke Tulta untuk berkebun. Jarak kedua dusun itu hanya sekitar 4 kilometer, kendati demikian karena Tulta ada di pegunungan, jarak itu sangat sulit dicapai karena hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki.

Penduduk asli Desa Alila disebut suku Kabola yang berasal dari daerah pegunungan, yaitu Dusun Tulta. Sebabnya adalah, semenjak mereka bermukim di Tulta, penduduk sudah menggunakan bahasa Kabola. Mereka juga sering disebut sebagai Tulta Pukulu. Walaupun mereka yang turun itu berasal dari pegunungan Tulta yang sama, tetapi di antara penduduk ada juga yang menyebut dirinya suku Alondong dan suku Kabola Gunung. Penduduk Dusun Bota banyak yang masih memiliki keluarga di Dusun Tulta. Mereka yang enggan meninggalkan Dusun Tulta biasanya karena memiliki kebun yang luas di sana. Dusun Tulta disebut kampung tua karena dusun itu sudah ada jauh sebelum Dusun Bota menjadi permukiman.

Jumlah penduduk Desa Alila pada tahun 2009 adalah 669 jiwa, terdiri dari 314 laki-laki dan 355 perempuan, dengan kepala keluarga (KK) sebanyak 212. Penduduk yang berusia 1 tahun ke atas sebanyak 440 orang, dengan rincian 164 jiwa laki-laki dan 240

perempuan. Satu keluarga rata-rata memiliki anak 3 orang. Sementara dilihat dari jenis agama yang dianut penduduk, sekitar dua pertiga beragama Islam dan sepertiga beragama Kristen.

Akibat heterogennya suku yang bermukim di Bota, sehingga percampuran bahasa antara bahasa gunung dan bahasa pesisir pun terjadi, dan bahasa mereka pun banyak dipengaruhi oleh bahasa di luar. Walaupun terdapat perbedaan antara bahasa gunung dan bahasa pesisir, mereka masih tetap dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Kabola dengan dua dialek berbeda yaitu dialek gunung (bahasa Tulta) dan dialek pesisir (bahasa Kolana). Bahasa Alor juga berkembang di Bota karena orang Alor Besar dan Kecil banyak yang tinggal di Desa Alila ini.

Salah satu kendala untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara tak langsung adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tercermin dari kurangnya pengetahuan tentang gizi. Banyak di antara penduduk yang tidak tamat sekolah dasar (SD). Sebagai masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani peladang berpindah dan pekebun, mereka lebih memfokuskan gizinya pada pemenuhan kekuatan fisik dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat perdesaan ini, pemerintah melalui Dinas Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Program ini memberikan dana kepada keluarga-keluarga yang masih memiliki anak sekolah dari tingkat SD sampai SLTP, ibu-ibu menyusui dan wanita hamil yang jumlahnya sekitar 87 KK, atau kepada sekitar 89 orang. Jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing kepala keluarga bervariasi tergantung dari jumlah anak yang bersekolah, ibu menyusui, dan wanita hamil yang ada dalam satu keluarga sasaran.

3.4.2 Kondisi Lingkungan Alam

Alila merupakan wilayah perdesaan yang memiliki keunikan karena memiliki tiga dusun yang letaknya berbeda, yaitu Dusun Bota yang merupakan daerah pesisir, tidak jauh dari pantai Laut Flores.

Dusun Tulta berada di daerah pegunungan, namun sudah dapat dijangkau oleh sepeda motor ataupun mobil khusus. Adapun Dusun Beauruhing berada di tanah datar yang dapat ditemui pada jalan menanjak menuju wilayah pegunungan Tulta. Pemandangan indah ada di jalan menuju Beauruhing ini karena keindahan laut Flores terlihat jelas. Kendati ada keindahan alam yang ditawarkan, tetapi kewaspadaan ekstra juga harus dilakukan bagi mereka yang melewati jalan ini menggunakan kendaraan bermotor. Selain jalan yang menanjak, di sisi kiri kanan jalan ada jurang yang kedalamannya sampai ke laut. Selepas Dusun Beauruhing menuju Dusun Tulta, sisi kiri kanan jalan dipenuhi tanaman lamtorogung yang ditanam pada masa pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi, tanaman itu tidak begitu dimanfaatkan dengan baik, misalnya daunnya tidak digunakan sebagai pakan ternak sebagaimana yang seharusnya. Dedaunan lamtorogung terbuang sia-sia karena tidak banyak penduduk yang memelihara ternak di Beauruhing tersebut.

Dusun Tulta yang terletak di pegunungan terlihat sangat indah dan sejuk. Bangunan-bangunan perumahan terlihat lebih tertata dibanding di Dusun Bota. Padahal seiring dengan perkembangan Dusun Bota, didukung oleh daerahnya yang datar dan mudah dijangkau, fasilitas umum seperti posyandu, sekolah dasar, dan mesjid pun dibangun. Hal yang sama terjadi juga di Dusun Tulta. Fasilitas umum yang ada di sana antara lain posyandu yang dibangun oleh pemerintah lewat program PNPM, tempat ibadah berupa mesjid dan gereja karena penduduk di dusun ini menganut agama Islam dan Kristen. Kendati Dusun Tulta sudah lama menjadi permukiman, sampai saat ini daerah itu belum dialiri listrik.

Desa Alila dari sisi ketersediaan air tidak terlalu mengalami kesulitan. Walaupun musim kemarau yang berlangsung mengakibatkan sungai-sungai mengalami kekeringan, tanah-tanah di desa ini masih mengandung air, sehingga kebutuhan air masih dapat diperoleh dari sumur. Namun, faktor cuaca menjadi penyebab kekeringan yang membuat tanaman, terutama padi tidak tumbuh baik karena masyarakat kurang memanfaatkan air tanah dengan

memompanya untuk mengairi tanaman yang dimaksud. Kendatipun demikian, air tetap merupakan benda yang langka bagi penduduk di Desa Alila karena tidak semua keluarga memiliki sumur. Mereka tidak memiliki uang untuk membangun sumur bor. Guna mengatasi kelangkaan air itu, Dinas Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Bapedalda berencana membuat sumur di Beuruhing. Untuk itu, kegiatan survei sudah dilakukan dari tahun 2007, tetapi sayang hingga penelitian ini dilakukan realisasinya belum ada.

Masyarakat tidak banyak yang mau merubah kebiasaan berladang menjadi bersawah. Sebenarnya instansi pemerintah pusat maupun daerah cukup menaruh perhatian terhadap masalah irigasi ini. Pada tahun 1990-an misalnya, pihak Dinas Pekerjaan Umum telah memasang sebuah mesin pompa yang dapat mengairi sawah sekitar 10 hektar. Akan tetapi, masyarakat sampai sekarang tidak memanfaatkannya. Mereka sukar mengubah budaya perladangan berpindah yang menggunakan sistem tugal dalam menanam bibit menjadi budaya bersawah. Ketika hal itu dikonfirmasi kepada masyarakat, sawah-sawah yang petak-petaknya sudah dibangun di Dusun Bota ternyata belum dimanfaatkan. Menurut masyarakat, genset belum disiapkan. Masyarakat desa memang banyak yang mengambil air dari tempat penampungan air yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum. Menurut petugas puskesmas yang ada di Kokar, pemerintah menyediakan pinjaman dari Bank Dunia untuk masing-masing desa di Kecamatan Alor Barat Laut termasuk Alila sekitar Rp11 juta. Pinjaman tersebut dikembalikan setiap bulan sesuai kemampuan mereka, dan diharapkan setiap kepala keluarga mengembalikannya sebanyak sepuluh ribu. Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk membangun bak-bak air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pinjaman lain dari Bank Dunia adalah membangun sanitasi desa. Pinjaman sekitar Rp25 juta setiap desa pengembaliannya dicicil dengan jumlah Rp275 per bulan. Program ini masih disosialisasikan kepada masyarakat. Puskesmas Kokar terpilih sebagai pendamping pelaksanaan pembangunan sarana air dan

sanitasi tersebut, sementara pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

3.4.3 Permukiman

Permukiman penduduk cenderung berpusat di daerah perbukitan yang mengakibatkan sebagian desa-desa di Kabupaten Alor seperti Dusun Tulta, Desa Alila terisolasi. Tanda-tanda kemiskinan juga terlihat dari kondisi rumah di mana sekitar 25% dari rumah penduduk tidak layak huni. Dindingnya terbuat dari bambu yang sudah berlubang di sana sini, sedangkan lantainya masih tanah, dan atapnya adalah rumbia dengan kondisi yang tidak lagi baik, sehingga pada musim hujan sering bocor. Penghuni rumah seperti itu akan mengalami banjir apabila hujan deras turun. Kondisi rumah-rumah yang relatif baik adalah rumah semi permanen. Rumah tipe ini sudah berlantai semen, dindingnya separuh terbuat dari papan dan separuh lagi batu bata yang disemen. Atap rumahnya pun sudah terbuat dari genteng. Sementara atap rumah permanen terbuat dari genteng, seng, atau asbes, dindingnya dari papan atau semen, dan lantainya dari ubin atau semen. Menurut BPS, definisi rumah sehat adalah rumah yang bangunannya sudah semi permanen dan permanen dilihat dari bahan bangunannya. Merujuk definisi BPS tersebut, maka kebanyakan rumah yang ada di Desa Alila atap yang terbuat dari alang-alang, dinding yang terbuat dari potongan bambu, dan lantainya yang dari tanah termasuk rumah tidak sehat.

Hanya beberapa keluarga Desa Alila yang memiliki televisi, itupun tidak digunakan untuk menonton siaran televisi. Siaran televisi hanya dapat diterima kalau rumah yang bersangkutan mempunyai antena parabola, jumlahnya di Desa Alila hanya sedikit. Oleh karena itu, televisi yang dimiliki oleh penduduk lebih banyak digunakan untuk menonton VCD pada malam hari terkait dengan aliran listrik yang menyala hanya pada malam hari saja. Berbeda dengan penduduk di Dusun Tulta, dusun yang terletak di daerah pegunungan ini belum mendapat aliran listrik dari PLN. Kendati demikian, bukan berarti di Dusun Tulta tidak memiliki rumah permanen atau semi permanen

menurut kriteria BPS tersebut sebab beberapa keluarga di dusun ini memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik.

3.5 Pandangan Hidup dan Budaya Pangan Masyarakat Desa Alila

Kemiskinan yang menyebabkan terjadinya rawan pangan di Desa Alila antara lain karena masyarakat desa ini mempunyai budaya konsumtif dalam wujud pesta-pesta. Selain itu, budaya perladangan berpindah sebagai pola pertanian mereka tidak memberikan hasil yang maksimal. Budaya ladang berpindah merupakan kebiasaan dari pandangan hidup yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Kondisi miskin yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun tidak menumbuhkan etos kerja yang tinggi guna meningkatkan penghasilan.

Pandangan hidup dapat didefinisikan sebagai: "...landasan pola perilaku atau pasangan dalam dialog antara isi dan realitas yang berada di luar diri dengan realitas yang berada di luar diri. Landasan ini lebih bersifat kontekstual yang terikat dalam ruang dan waktu. Pengertian ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai filsafat hidup, persepsi tentang realitas, asumsi cultural, dan cita-cita. Dengan demikian, pandangan hidup bisa juga ditemukan dalam pandangan tentang alam semesta, hakekat hidup bermasyarakat, dan masih banyak lagi" (Abdullah, dikutip oleh Qoyim, dkk., 2004: 14). Dalam tulisan ini, pandangan hidup lebih diartikan pada cara pandang masyarakat Desa Alila dalam menghadapi permasalahan pangan yang sangat tergantung pada alam. Mereka memiliki filosofi hidup bahwa bahan makanan dapat diperoleh dari alam, dan mereka sudah merasa cukup atas pemberian alam tersebut. Pandangan hidup ini merupakan warisan budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka yang melakukan perladangan berpindah.

Budaya bagi masyarakat Desa Alila memiliki pengertian yang agak statis karena mereka tetap mempertahankan pekerjaan yang sebenarnya tidak cocok dilakukan pada era modern sekarang.

Pekerjaan era modern sekarang lebih banyak diarahkan kepada pengolahan alam daripada pemungutan hasil alam seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alila. Padahal budaya menurut Van Peursen dapat berarti kemajuan. Van Peursen melihat kebudayaan sebagai siasat manusia menghadapi hari depan. Dia melihat kebudayaan itu sebagai suatu “*learning process*” yang sifatnya terus menerus. Dalam proses itu, faktor penting bukan saja kreativitas dan *inventiveness*, akan tetapi kedua faktor ini berkaitan dengan pertimbangan etis (Van Peursen, 1988: 5). Pada saat faktor etis, seperti etos kerja yang rendah dimiliki oleh suatu masyarakat, maka kebudayaan akan bergerak lamban. Van Peursen juga melihat kebudayaan sebagai “endapan dan kegiatan dari karya manusia” dalam hakekatnya (Van peursen 1988: 9). Bukan berarti masyarakat Desa Alila tidak berbudaya, namun ketergantungan mereka terhadap alam sesuai dengan pandangan van Peursen lebih merupakan endapan warisan masa lampau dari apa yang dilakukan manusia dan bukan penggalan kegiatan yang kreatif dari peningkatan etos kerja.

3.6 Sumber Pemenuhan Kebutuhan Pangan

Kebutuhan hidup masyarakat Desa Alila sangat ditentukan oleh kondisi alam lingkungannya. Apabila lingkungan alam baik, maka hasil yang mereka peroleh pun besar. Mata pencaharian mereka sangat mengandalkan hasil kegiatan berkebun, berladang, dan mencari hasil laut. Sebenarnya, alam memberikan potensi ekonomi bagi mereka, tetapi mereka tidak begitu giat memperbaiki ekonominya dari hasil alam tersebut. Mereka kebanyakan mencari hasil alam hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk dijual. Pekerjaan di luar pertanian ataupun menangkap ikan, alternatif pekerjaan yang dilakukan adalah membuat batu bata. Tetapi semua kegiatan ini tampaknya belum dapat memperbaiki perekonomian mereka secara keseluruhan.

3.6.1 Pencarian Hasil Laut

Penduduk Desa Alila sebenarnya berpotensi untuk dapat meningkatkan ketahanan pangannya dengan cara menaikkan penghasilan melalui kegiatan mencari ikan di laut. Saat ini, penduduk yang bermukim di Dusun Bota yang terletak di tepi pantai sudah banyak mencari ikan. Hasil tangkapan berupa ikan ataupun teripang dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan gizi sebagai sumber protein mereka. Selama ini, asupan gizi hanya karbohidrat saja yang diperoleh dari tanaman kebun seperti jagung dan padi ladang. Namun, kegiatan mencari ikan belum maksimal karena hasilnya sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sendiri saja, belum bertujuan komersial ataupun untuk dijual.

Masyarakat Bota sudah berdiam di tepi pantai puluhan tahun. Sayangnya, penduduk sejak dahulu kala tidak memiliki budaya melaut untuk mencari ikan. Mereka lebih suka mengolah tanah dengan menjadi petani ladang dan pekebun. Walaupun tanahnya subur, tetapi karena kegiatan pertanian disertai gangguan alam seperti bencana kekeringan, banjir dan hama tikus, mengakibatkan hasil dari pertanian itu tidak optimal. Mereka baru memiliki keinginan untuk melaut setelah orang-orang dari Buton mencari ikan di wilayah mereka. Para kaum muda pun selain berladang, juga sudah mulai melakukan pekerjaan menangkap ikan di laut. Namun, kebanyakan dari mereka masih sebatas buruh pengangkut ikan pada orang-orang Buton yang tinggal di Kokar. Upah yang mereka terima sekali memasukkan ikan ke dalam satu ember sebesar Rp10.000,- dan biasanya mereka sanggup memasukkan ikan ke dalam tiga ember setiap hari. Itu berarti upah yang mereka kumpulkan dalam seharinya sekitar Rp30.000,-.

3.6.2 Perkebunan dan Pertanian Ladang

Desa Alila sebenarnya merupakan desa yang subur karena banyak tanaman perkebunan, seperti jagung dan singkong yang dapat tumbuh dengan baik walaupun pada musim kemarau. Demikian

halnya dengan tanaman perkebunan di mana halaman rumah mereka dan di tepi jalan banyak tumbuh jambu mete yang diprakarsai oleh Dinas Perkebunan. Tanaman lain yang ditanam penduduk adalah kemiri, kelapa, pinang, pohon pisang, dan ubi. Namun tanaman sayur-sayuran ataupun buah-buahan, tidak terlihat banyak. Keadaan ini disebabkan mereka lebih suka menanam tanaman yang tidak begitu memerlukan air yang relatif banyak walaupun sebenarnya sayur-sayuran dapat tumbuh subur. Akan tetapi, karena tumbuhan ini membutuhkan perawatan khusus dan air yang banyak, maka mereka menghindari menanam tanaman itu.

Adapun tanaman jagung dapat tumbuh di tanah bebatuan, sehingga tanaman ini hampir ada sepanjang tahun. Jagung merupakan makanan pokok mereka. Pinang merupakan tanaman yang penting bagi masyarakat terkait dengan budaya makan sirih yang ada pada mereka. Oleh sebab itu, pinang merupakan komoditas utama di Pulau Alor. Pinang selain dikonsumsi oleh penduduk di Kabupaten Alor, banyak juga yang dikirim ke wilayah lain dengan masyarakat yang juga gemar mengunyah pinang dan sirih di Provinsi NTT, antara lain ke Pulau Rote. Sebagai salah satu komoditi penting, produksi pinang dari Dusun Tulta dapat menghasilkan Rp4 juta sekali panen, terutama pada saat panen raya tiba yang berlangsung sekali setahun. Sementara kemiri adalah jenis tanaman yang bisa dipanen masyarakat setiap dua tahun dan dapat menjadi sumber penghasilan utama penduduk. Tanaman ini banyak ditemui di Dusun Tulta di daerah pegunungan. Hanya saja, ketika penelitian ini dilakukan, harga kemiri tidak begitu tinggi dan hasilnya pun tidak banyak, sehingga penduduk tak dapat keluar dari garis kemiskinan.

Kelapa merupakan tanaman yang dapat dijadikan mata pencaharian utama. Kelapa banyak ditemukan ditepi pantai. Hasil dari tanaman kelapa ini sebagian besar diolah menjadi kopra. Tetapi pada tahun 2004, hama kelapa mewabah di hampir seluruh Pulau Alor sehingga panen kelapa pada masa itu mengalami kegagalan yang berdampak pada turunnya produksi kelapa sampai sekarang. Pada saat tanaman kelapa diserang hama, Dinas Perkebunan melakukan

penyuntikan terhadap tanaman tersebut. Tetapi kegiatan itu tidak berhasil karena kenyataannya, tanaman kelapa masyarakat tetap saja rusak dimakan hama. Saat ini, Dinas Perkebunan sedang mengaktifkan kembali penanaman kelapa di Desa Alila dan beberapa desa lainnya di Kabupaten Alor.

Penjualan hasil perkebunan berupa komoditas seperti jambu mete, kemiri, dan pinang dijual oleh petani dengan berbagai macam cara. Petani kemiri biasanya menjual kemiri kepada seorang pengumpul hasil perkebunan bernama Jawa Aleng yang ada di Tulta. Pengumpul ini yang akan menjual kemiri masyarakat ke kota Kalabahi. Dia merupakan seorang pengusaha yang mendapatkan kepercayaan dari pengusaha keturunan Cina yang ada di Kota Kalabahi. Selain itu, biasanya anak buah pedagang hasil bumi di Kota Kalabahi sudah ada yang menampung hasil bumi masyarakat di desa tersebut. Selanjutnya, para pedagang pengumpul biasanya mengirim komoditas perkebunan ini langsung ke Kupang atau ke luar Nusa Tenggara Timur. Kemiri dijual dengan harga Rp1.700 per kilogram sebelum dikuliti dan Rp10.000 setelah dikuliti. Buah pinang dijual seharga Rp20.000--Rp30.000 per kilogram setelah dibawa dari hutan, sementara harga kemiri kalau ditimbang di hutan sekitar Rp10.000 per kilogram.

Dengan hasil perkebunan tersebut, tidak salah kalau Desa Alila dikenal juga sebagai desa perkebunan. Dinas Perkebunan pernah memberikan bantuan tanaman jambu mete untuk masyarakat walaupun sebenarnya masyarakat sendiri juga banyak menanam jambu mete di halaman rumah mereka. Selain bantuan itu, Dinas Perkebunan pun pernah menggagas penanaman pohon jarak kepada masyarakat, namun hasilnya kurang optimal. Tahun 2008, pemerintah melaksanakan program penanaman jarak di Desa Alila tetapi gagal sebab setelah petani berhasil menanam pohon jarak, pemerintah tidak bersedia menampung hasilnya atau mencarikan daerah pemasarannya. Pada waktu itu, buah jarak hanya dihargai Rp4.500,- untuk setiap satu karung, atau sekitar 9 kilogram.

Pertanian yang ada di Desa Alila adalah pertanian perladangan dengan lahan tebas bakar. Mereka menanam padi diselingi dengan tanaman jagung yang dapat berfungsi sebagai terhadap tanaman padi tersebut. Hasil yang diperoleh dari panen padi dan jagung bukanlah untuk dijual guna menghasilkan uang, tetapi untuk dikumpulkan guna kebutuhan pangan dalam setahun ke depan. Diharapkan bahwa hasil panen itu mencukupi kebutuhan pangan menunggu panen berikutnya. Namun, harapan itu tidak selalu menjadi kenyataan. Sebab, produksi ladang tidak selalu menghasilkan panen yang maksimal. Hama tanaman dan cuaca yang tidak menentu menjadi pengganggu dari kegiatan pertanian mereka.

Hama tanaman yang biasa dihadapi petani di Desa Alila adalah hama berupa bintik kuning, kutu loncat, dan tikus yang dapat merusak tanaman padi mereka. Angin kencang dan banjir juga dapat dianggap sebagai bencana yang dapat merusak tanaman mereka. Bencana, baik akibat cuaca yang buruk maupun hama lain yang datang menyerang hasil perkebunan, menjadi penyebab terjadinya kerawanan pangan masyarakat. Hasil produksi panen musiman tidak dapat diprediksi dari tahun ke tahun, dan kelihatannya semakin berkurang akibat hama dan bencana alam itu.

Pemerintah melalui Dinas Pertanian tidak begitu banyak memberikan bantuan yang bermanfaat bagi petani di Desa Alila. Pada tahun 2004, Dinas Pertanian pernah memberikan bantuan pupuk urea dalam PNP bibit padi, bibit jagung bismak untuk beberapa keluarga. Setelah itu masyarakat Desa Alila tidak mendapat bantuan lagi dari Dinas Pertanian tersebut. Saat ini sudah ada penyuluh TPL yang ditempatkan di rumah Kepala Desa Alila, namun keberadaannya baru satu bulan sehingga tenaga penyuluh ini belum banyak melakukan kegiatan, di samping program kerja yang belum disusun.

3.6.3 Pembuatan Batu Bata

Masyarakat Desa Alila mempunyai kemampuan membuat batu bata sendiri. Kegiatan pembuatan batu bata ini menjadi potensi

untuk meningkatkan ekonomi keluarga apabila produksinya dapat ditingkatkan. Sebab, batu bata produksi Desa Alila dapat digunakan untuk membangun rumah-rumah yang ada di Kalabahi dan di berbagai tempat lainnya di Kabupaten Alor. Sayangnya, pembuatan batu bata masih dalam jumlah terbatas, yaitu sekadar bahan bangunan untuk kebutuhan pembangunan rumah-rumah di Desa Alila dan sekitarnya saja. Mereka membakar batu bata itu secara bergotong royong dengan menggunakan kayu mangga. Kegiatan pembuatan batu bata dilakukan setelah petani mengadakan pembersihan lahan untuk pertanian perladangan pada saat semangat kerja mereka masih tinggi. Harga batu bata di Desa Alila sekitar Rp500 per biji.

2.6.4 Peternakan

Peternakan sapi, kambing, dan ayam sebenarnya cocok untuk daerah Alila karena di daerah ini tumbuh berbagai tanaman yang dapat dijadikan pakan ternak. Lamtorogung banyak tumbuh di Dusun Beauruhing yang ditanam pada masa Orde Baru. Tumbuhan ini sebenarnya dapat digunakan untuk pakan ternak. Kalau kegiatan peternakan dilakukan, kotoran ternak itu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk menyuburkan lahan pertanian mereka. Akan tetapi, karena harga sapi begitu mahal, masyarakat yang sanggup beternak sapi hanya sedikit. Sapi besar harganya di atas 5 juta rupiah, sedangkan sapi ukuran sedang harganya sekitar 4 juta rupiah, dan sapi ukuran kecil atau harga paling murah sekitar 3 juta rupiah per ekor.

Selain sapi, masyarakat lain juga mencoba beternak ayam dan kambing, tetapi kegiatan tersebut dilakukan sebagai usaha sambilan saja. Mereka harus melakukan peternakan kedua hewan ini di Dusun Tulta apabila mereka memiliki tanah di sana sebab ternak ini sering hilang kalau dipelihara di Dusun Bota. Sementara kalau ternak ini dipelihara di Tulta, waktu tempuh antara Bota dengan Tulta begitu lama, sehingga pemeliharaan ternak ini pun menjadi tidak maksimal.

Masyarakat Desa Alila sebenarnya sukar untuk beternak karena budaya pesta yang sering mereka adakan. Budaya pesta itu

dapat menggoda mereka untuk memotong hewan peliharaan untuk dijadikan sebagai hidangan pesta. Masyarakat Desa Alila biasanya makan daging hanya kalau ada pesta. Oleh karena itu, sukar bagi masyarakat untuk menjadikan usaha peternakan sebagai sumber mata pencaharian. Sebab yang sering terjadi, kalau mereka memelihara sapi sementara mereka ada pesta, maka sapi yang mereka pelihara itu akan dipotong walaupun anaknya belum ada. Kondisi itulah yang menyebabkan beberapa keluarga saja yang berhasil dalam usaha peternakan sapi tersebut.

Pada tahun 1995, Dinas Pertanian pernah memberikan bantuan ternak kambing kepada penduduk. Tetapi penduduk kurang dapat memelihara kambing tersebut, sehingga setelah berjalan setahun kambing-kambing itu terserang penyakit. Akibatnya masyarakat pun tidak banyak yang memelihara ternak, sehingga bantuan ternak pun dihentikan. Dinas Pertanian Kabupaten Alor melanjutkan bantuannya ke bidang pertanian dan perkebunan.

Dinas Pertanian Provinsi NTT ingin mengembalikan citra Provinsi NTT termasuk Alor sebagai gudang ternak sapi. Oleh sebab itu, pemerintah merencanakan program diversifikasi pertanian. Mereka menghimbau masyarakat untuk menanam jagung dengan bibit hibrida dengan menggunakan teknologi modern agar masyarakat dapat menghasilkan 5 ton jagung untuk satu hektar. Sementara kalau dengan cara tradisional hanya menghasilkan 1 ton saja untuk setiap hektarnya. Program diversifikasi pertanian ini juga dilakukan dengan menghimbau masyarakat untuk memelihara sapi karena pohon jagung dapat dijadikan sebagai pakan ternak tersebut. Selain itu, masyarakat dalam kegiatan pertaniannya tidak lagi tergantung pada pupuk kimia sebab kotoran sapi dapat dijadikan sebagai pupuk bagi tanaman jagungnya. Kalau hasil panen jagung 5 ton, maka uang yang dibutuhkan untuk membeli seekor sapi dapat diperoleh dari penjualan separuh dari hasil panen jagung, yaitu sekitar 2,5 ton. Sementara untuk konsumsi jagung setahun bagi 5 orang dalam satu keluarga cukup sekitar 2,5 ton lagi. Kebutuhan bibit jagung masih difasilitasi oleh Departemen Pertanian dengan memberikan bantuan kepada

masyarakat petani. Kelanjutan dari program ini diserahkan kepada masyarakat, karena swadaya masyarakatlah yang akan menentukan kelangsungan program diversifikasi pertanian ini.

Pengolahan lahan biasanya berhubungan dengan pengadaan benih dan pemupukan berimbang serta populasi tanaman. Pada pola tradisional, petani biasanya menanam bibit jagung dengan jarak setiap 1,5 meter, menggunakan bibit jenis lombosit. Agar produksi jagung dapat ditingkatkan, maka Dinas Pertanian mengajak petani untuk menanam jagung hibrida di mana jarak 1,5 meter tersebut dapat ditanami sekitar 70 jagung secara berbaris, sehingga dapat menghasilkan 5 ton jagung setiap hektar. Hasil panen memang bersifat lokalitas atau sangat tergantung kepada kondisi tanah. Namun sampai saat ini, program tersebut belum dilaksanakan di Kabupaten Alor.

3.7 Budaya Miskin dan Kondisi Pangan

Kemiskinan pasti identik dengan kerawanan pangan, kecuali kalau penduduk dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dengan mengambilnya dari alam sekitar. Namun, kondisi alam di Desa Alila yang kurang subur menyebabkan alam tidak dapat menyediakan bahan makanan yang cukup bergizi karena tanaman yang dapat tumbuh sangat terbatas. Daya beli yang rendah menyebabkan makanan yang mereka makan kurang bervariasi, selain yang biasa mereka usahakan sendiri. Sebagai salah satu desa miskin di Kabupaten Alor, tentu saja penduduknya banyak yang tidak mampu mengakses pangan. Kepala Desa Alila mengakui bahwa desa yang dipimpinnya sering mengalami rawan pangan. Hal itu terjadi karena ada saat-saat di mana masyarakat menanam padi 3 *blek*, petani berharap hasil sekitar 60 *blek* padi. Ternyata yang terjadi adalah hasil panen hanya mendapatkan 2 *blek* padi. Penyebab turunnya hasil panen padi karena terjadinya bencana kekeringan. Pada musim hujan pun, masyarakat bisa saja mengalami rawan pangan. Fenomena itu terdeteksi karena ada warga masyarakat yang membawa bakul untuk meminta uluran tangan orang lain guna mendapatkan makanan sebab

persediaan pangannya sudah habis dan dia tidak dapat berkecukupan pada musim hujan tersebut. Orang-orang yang mengalami hal seperti itu berasal dari Dusun Tulta. Mereka turun mendatangi rumah-rumah penduduk di Dusun Bota untuk meminta bantuan pangan.

Tanda-tanda kemiskinan di Desa Alila juga tampak dari cara berpakaian dan jenis pakaian yang dikenakan oleh para wanita. Secara kasat mata terlihat pakaian yang dikenakan itu sudah tidak layak karena sudah robek dan pakaian para laki-laki pun tampak lusuh. Tidak itu saja, masyarakat yang memegang uang pun hanya sedikit. Oleh sebab itu, sistem pertukaran barang pun masih ada yang dilakukan dengan cara barter. Apabila seseorang membutuhkan kopi atau gula tetapi ia tidak memiliki uang, maka ia dapat menukarkan jagung yang dimilikinya dengan gula atau kopi. Satu ekor ayam yang dihargai sekitar Rp50.000,- dan dapat ditukar dengan satu lembar pakaian. Sistem barter ini dapat dilakukan di pasar Kokar, Kecamatan Alor Barat Laut.

Berbagai program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat Desa Alila telah dilaksanakan pemerintah. Bantuan untuk masyarakat miskin diberikan kepada masyarakat yang menurut data BPS benar-benar miskin. Indikator yang digunakan BPS untuk melihat apakah satu keluarga itu miskin adalah bentuk rumahnya. Rumah keluarga miskin yang disebut rumat tidak sehat adalah rumah tidak permanen atau bahan-bahannya masih terbuat dari bambu, alang-alang, dan berlantai tanah. Indikator keluarga miskin juga dapat dilihat dari mata pencaharian satu keluarga yang masih berladang berpindah. Program-program pemerintah ini hampir semuanya merupakan program pemerintah pusat atau departemen-departemen yang dikerjakan oleh dinas-dinas yang ada di daerah Kabupaten Alor. Sejak tahun 2007, program-program yang dilaksanakan pemerintah tersebut antara lain.

- (1) Raskin atau beras untuk masyarakat miskin;
- (2) Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaaan berupa pembangunan 3 unit posyandu untuk masing-masing dusun, yaitu Dusun Tulta, Beauruhing, dan Bota;

- (3) Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar seratus ribu rupiah per kepala keluarga;
- (4) Program keluarga harapan (PKH) dari Dinas Sosial.

Hasil dari bantuan-bantuan program pengentasan kemiskinan ini ternyata belum tampak untuk meningkatkan gizi masyarakat. Potensi Desa Alila ini pun sebenarnya tidak kurang untuk peningkatan ekonomi dan kualitas pangan mereka. Namun kenyataannya, sekitar 80% masyarakat Desa Alila tetap saja masuk kategori masyarakat miskin.⁵ Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan kebanyakan masyarakat desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Alor.

Mengapa para petani desa tetap miskin walaupun hasil perkebunan mereka cukup banyak, sedangkan para pedagang hasil bumi yang ada di kota Kalabahi bertambah kaya? Sebenarnya harga beli yang ditawarkan oleh para pedagang dari Kalabahi terhadap hasil bumi petani cukup memadai. Hanya saja, para petani perorangan tidak mempunyai stok yang cukup banyak untuk dijual. Mereka kebanyakan hanya memiliki lahan berkebun yang relatif sempit yaitu sekitar 20 m x 30 m, sehingga berapa pun tingginya harga beli hasil bumi yang ditawarkan pedagang besar tidak mampu mengangkat tingkat kesejahteraan petani. Selain itu, petani kurang giat mengumpulkan hasil bumi seperti kemiri sebab mereka lebih suka membiarkannya jatuh ke tanah apabila mereka sudah merasa cukup.

Apabila mereka membutuhkan uang, misalnya untuk kebutuhan anak sekolah, barulah mereka pergi ke hutan untuk mengumpulkan kemiri itu sebanyak kebutuhan uang sekolah tersebut. Memang, mereka cukup bekerja keras untuk mengambil hasil bumi yang ada di hutan. Biasanya suami dan istri pergi ke hutan setelah berjalan sekitar 5--6 km dari kampungnya. Mereka akan menginap sehari semalam di hutan untuk memungut hasil hutan tersebut dalam jumlah secukupnya. Mereka cukup puas apabila kebutuhan pokok

⁵ Menurut keterangan Kepala Desa Alila sendiri.

mereka telah tercukupi. Sedangkan para pedagang besar yang ada di Kalabahi giat mengumpulkan hasil bumi dari petani sedikit demi sedikit melalui perwakilan mereka yang ada di desa-desa. Oleh karena itu, para pedagang besar yang ada di Kota Kalabahi bisa mengirim hasil bumi ke daerah lain dalam jumlah besar. Ada pula orang desa yang langsung menjualnya ke Kota Kalabahi tetapi dalam jumlah yang sedikit bila dibandingkan dengan orang yang datang ke desa untuk mengumpulkan hasil bumi sebab ia tak memiliki kendaraan untuk mengangkut hasil bumi itu dalam jumlah yang besar.

Masyarakat Desa Alila sebagian besar memiliki etos kerja yang tidak diarahkan kepada pencarian uang dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan banyak materi. Mereka sudah cukup puas bekerja apabila bisa pulang membawa makanan berupa jagung atau ikan dari laut dalam jumlah seadanya setelah bekerja seharian. Dengan kata lain, selama mereka masih bisa makan kenyang, mereka sudah cukup puas. Oleh sebab itu, mereka tidak begitu giat mencari uang selama mereka masih bisa makan. Seorang ibu penjual sayur dari Dusun Bota misalnya, setelah mendapatkan uang sekitar Rp50.000,- dari hasil menjual sayur, ia akan berhenti sampai di situ. Penjual sayur ini akan berjualan lagi setelah uang hasil penjualan sayur sebelumnya tinggal sedikit atau sudah habis.

Masyarakat Desa Alila sebagaimana masyarakat Alor menyatukan kegiatan perkebunan dengan kegiatan berkesenian sehingga menghasilkan musik kebun. Musik kebun merupakan musik yang diperoleh dari alat yang terbuat dari bambu yang disebut dengan *pinindal*. Musik dan bertani menunjukkan bahwa kegiatan bertani dilakukan dengan agak santai dan tidak terlalu berusaha untuk memperoleh hasil yang banyak. Selama mereka masih bisa menghasilkan kebutuhan sehari-hari untuk dimakan, mereka sudah bisa bernyanyi dan memainkan alat musik kebun tersebut.

Etos kerja yang lemah ini sangat berkaitan dengan kemiskinan. Mubyarto (1993) mengatakan, “kemiskinan bukan hanya merupakan keadaan ‘menderita’ (*deprivation*), tetapi juga ‘keadaan

lemah' (*vulnerable*)". Kemiskinan ternyata dapat memberikan sikap kurang bergairah dalam meningkatkan taraf hidup karena merasa usahanya akan sia-sia. Etos kerja yang rendah menyebabkan "kurangnya partisipasi masyarakat miskin dalam usaha pengembangan" (Hidayat, 2007: 34).

Pada tahun 2008, Desa Alila memperoleh dana PNP Mandiri masing-masing dusun sebanyak 75 juta rupiah. Dana itu dipergunakan untuk membangun 1 unit posyandu untuk masing-masing dusun. Masyarakat memilih pembangunan posyandu yang luasnya sekitar 5m x 7m karena bangunannya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, seperti tempat ibu-ibu melahirkan, penimbangan anak balita, dan pemberian makanan tambahan balita. Selain itu, seluruh masyarakat dalam satu dusun dapat menikmatinya. Bantuan PNPM Mandiri ini tidak secara langsung memperbaiki perekonomian masyarakat Desa Alila secara perorangan. Padahal sebenarnya, bantuan ini bisa juga dipergunakan untuk membantu usaha masyarakat secara perorangan, namun masyarakat tidak memilihnya. Penyebabnya adalah masyarakat tidak memiliki etos kerja yang tinggi dalam berusaha. Mereka sulit untuk mengubah mata pencaharian dari kegiatan peladang berpindah karena mereka sudah merasa puas dengan apa yang mereka miliki.

Pada tahun 2009 pemerintah melalui Dinas Sosial mengeluarkan program KUBE (Kredit Usaha Bersama). Program ini belum mengeluarkan dana karena masih dalam proses pembentukan kelompok. Ketika penelitian ini dilakukan, kelompok penerima dana yang bergerak dalam berbagai usaha perkiosan, peternakan, nelayan, dan pembelian hasil komoditas sudah terbentuk sekitar 9 kelompok. Apabila nanti masyarakat telah menerima dana dari pemerintah ini, mereka dapat mengusahakan dana ini secara berkelompok. Hal itu mengindikasikan bahwa etos kerja masyarakat desa telah meningkat karena semangat yang mereka miliki telah tumbuh dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Dinas sosial juga mengeluarkan program keluarga mandiri. Program inipun belum direalisasikan, namun pemerintah sudah menjanjikannya kepada masyarakat.

Program ini akan memberikan bantuan untuk berbagai jenis usaha masyarakat.

Selain dinas sosial, dinas perindustrian dan perdagangan juga mengeluarkan program bantuan untuk jangka waktu dua tahun, yaitu kelompok usaha pembuatan garam yodium. Kegiatan ini sudah berjalan setahun. Kelompok yang menjalankan usaha ini sudah mempunyai tabungan sebanyak 2 juta rupiah lebih. Pemberian bantuan terhadap masyarakat ini jelas membuktikan bahwa etos kerja masyarakat harus dibangkitkan dengan memberikan perhatian dari luar diri mereka, misalnya dengan memberikan bantuan melalui program-program pemerintah.

3.8 Budaya Konsumtif dan Budaya Pesta

Pesta bagi masyarakat Desa Alila adalah kesempatan untuk berkomunikasi sesama anggota masyarakat dan arena untuk bergembira. Pada saat pesta berlangsung, tokoh masyarakat menyampaikan kata sambutan. Setiap keluarga biasanya mendapat giliran untuk mengadakan pesta. Dalam hal ini, mereka mendaftarkan diri kepada kepala desa untuk mendapat giliran sebagai penyelenggara pesta. Pesta yang diadakan tidak saja untuk pesta-pesta besar seperti pernikahan dan sunatan, tetapi juga untuk menyambut kelahiran anak, meninggal dunia, membuat atap rumah, panen, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Pada saat penelitian ini berlangsung, masyarakat Dusun Bota sedang mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan dalam pertandingan sepak bola antardusun Desa Alila. Pada pertandingan akhir, kesebelasan Dusun Bota mengalahkan kesebelasan Dusun Tulta. Pada saat pesta itu, tokoh masyarakat turut memberikan kata sambutan. Pesta yang mereka artikan dengan makan bersama, berbincang, dan berkumpul, tidak selalu disertai dengan makanan daging. Makan daging baru bisa dilakukan kalau ada pesta besar karena penyelenggara pesta akan memotong hewan seperti kambing, sapi dan ayam untuk dihidangkan kepada para undangan.

Pada saat pesta menyambut kemenangan itu berlangsung, hidangan makanan yang disajikan biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan pesta besar sebagaimana sudah diuraikan. Pada saat pesta ini, mereka hanya makan kue-kue dan makanan sederhana lainnya. Adapun nasi yang dihidangkan adalah nasi beras dan bukan jagung. Nasi yang mereka makan adalah beras yang mereka beli karena beras hasil berladang tidak lagi mencukupi. Untuk mempersiapkan keperluan pesta, para tamu bergotong royong menyediakan makanan yang akan dihidangkan dengan membawa bahan mentah seperti beras, gula, dan kopi dari rumah masing-masing.

Kesenangan berkumpul dan makan bersama mereka ciptakan dalam berbagai peristiwa. Tamu yang datang ke pesta tidak dengan tangan kosong, tetapi dia akan membawa beras, kue, atau bahan makanan lain. Suatu ketika nanti, apabila giliran sang tamu sebagai penyelenggara pesta tiba, ia juga akan disumbang oleh para tetangganya dengan berbagai bahan makanan dan kue-kuean.

Ketika pesta berlangsung, terlihat bahwa budaya patrilineal yang ada di Desa Alila menempatkan kaum wanita pada posisi yang tidak utama. Kekuasaan laki-laki jelas terlihat pada saat mereka melaksanakan pesta karena kedudukan laki-laki sangat diutamakan. Pada saat pesta berlangsung, para wanita tidak ikut mengadakan pembicaraan dan makan bersama. Kaum yang terlebih dahulu makan di tempat pesta adalah para lelaki. Para wanita sebagai kaum yang menghidangkan makanan, biasanya memilih dapur sebagai tempat untuk makan. Sesama para wanita, mereka pun bergembira sambil berkumpul di dapur. Sedangkan para anak remaja biasanya makan setelah para orang tua laki-laki mereka makan di mana sisa makanan para orang tua ini dibawa ke dapur.

Sekalipun merupakan masyarakat miskin, masyarakat Desa Alila memiliki budaya pesta. Kebiasaan itu dikategorikan oleh banyak orang sebagai budaya boros. Salah satu penyebab kemiskinan masyarakat adalah budaya boros tersebut. Uang masyarakat Desa

Alila banyak dihabiskan untuk pesta besar seperti pernikahan ataupun pesta kecil untuk merayakan kemenangan bermain sepak bola sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Dusun Bota. Padahal, pertandingan itu baru tingkat dusun untuk memperebutkan piala kepala desa, dan yang bermain pun hanya tiga kesebelasan mewakili masing-masing dusun di Desa Alila. Pesta-pesta keagamaan yang diadakan oleh umat Kristen dan Islam juga dihadiri oleh masyarakat dari kedua umat beragama tersebut. Umat Islam menghadiri pesta keagamaan umat Kristen, demikian sebaliknya. Pesta-pesta keagamaan yang dimaksud antara lain sunatan, akikah, lebaran, dan lebaran haji bagi masyarakat Islam, sedangkan pesta keagamaan umat Kristen adalah Natal. Mereka mengadakan pesta dengan hidangan berbagai macam kue, nasi, dan lauk sederhana.

Pesta bagi masyarakat Desa Alila tidak mengharuskan mereka untuk mengenakan pakaian pesta. Mereka hanya ingin menyalurkan kegemaran makan dan berkumpul bersama. Namun pada saat mengadakan pesta besar, penyelenggara pesta akan berusaha untuk menghadirkan daging pada jamuan makannya. Oleh karena itu, terkadang mereka meminjam uang dari rentenir agar dapat membeli daging dan kebutuhan pesta lainnya. Undangan yang datang ke pesta tidak membawa amplop berisi uang karena memang masyarakat banyak yang tidak memiliki uang kontan. Biasanya masyarakat membawa bahan makanan seperti beras, jagung, mie, dan kue. Ketika kembali ke rumahnya setelah pesta, mereka pulang tidak dengan tangan kosong sebab penyelenggara pesta akan memberikan makanan untuk dibawa pulang.

Pada saat pesta kematian ada juga pemotongan hewan dan dagingnya diberikan kepada tamu yang datang. Sementara pada saat pesta panen diadakan, pesta itu disertai penyampaian ucapan-ucapan *sambolo-sambolo* untuk membangkitkan semangat kerja. Pada saat panen, mereka menyanyikan lagu tentang sejarah nenek moyang mereka. Pada saat menanam, mereka melakukan pesta *bokor*. Mereka memakan jagung muda dan memanjatkan doa beramai-ramai pada

saat penanaman. Pada saat pesta kelahiran, mereka menyanyikan lagu untuk membangkitkan semangat generasi muda.

Menurut Kepala Desa Alila, pesta merupakan budaya bagi masyarakat. Mereka akan malu apabila tidak sanggup mengadakan pesta. Ada satu kepala keluarga di Dusun Bota yang sampai sakit jiwa karena tidak mampu mengadakan pesta. Karena seringnya penduduk mengadakan pesta, maka kepala desa memiliki catatan tentang jadwal dan nama warganya yang akan mengadakan pesta dalam seminggu. Hal itu diperlukan agar tidak ada dua pesta atau lebih yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan.

3.9 Budaya Bergotong Royong

Masyarakat Desa Alila merupakan masyarakat yang suka bergotong royong dan berkumpul yang disebut dengan *pulsera*. Mereka biasanya memiliki kelompok gotong royong berdasarkan keluarga ataupun pertemanan. Kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alila tidak jauh berbeda dengan kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh para petani di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Menurut beliau: “Konsep gotong royong yang kita nilai tinggi itu merupakan satu konsep yang erat bersangkutan paut dengan kehidupan rakyat kita sebagai masyarakat agraris...gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi bercocok tanam di sawah...” (Koentjaraningrat, dikutip oleh Marzali, 2005: 155). Setelah menyoroti pandangan Koentjaraningrat mengenai gotong royong, Marzali melihat gotong royong sebagai berikut.

jadi gotong royong yang terjadi adalah untuk kepentingan bersama... dalam kegiatan gotong royong kita tidak menemukan prinsip timbal balik antarindividu, antarkeluarga, atau antarmarga karena di sini tidak ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang yang lain. Dalam gotong royong, sumbangan yang diberikan

seseorang apakah dalam bentuk benda atau jasa, atau tenaga, adalah untuk kepentingan seluruh anggota kelompok, termasuk kepentingan individu yang memberikan sumbangan tersebut... Jika seseorang tidak berperan dalam suatu kegiatan gotong royong sebagaimana yang diinginkan kelompok, tidak ada seseorang yang merasa dirugikan dan patut menuntut balas dari dia. Di dalam gotong royong, yang dituntut adalah komitmen seseorang terhadap kelompoknya, bukan terhadap orang yang lain. Yang dituntut dari setiap anggota kelompok adalah semangat menjatikan diri dengan kelompok, semangat solidaritas sebagai anggota kelompok (Marzali 2005: 161--162).

Masyarakat yang melakukan gotong royong tidak dibayar menggunakan uang tetapi dalam bentuk tenaga. Seseorang yang melakukan kegiatan pembangunan rumah, misalnya, ia mempunyai hak untuk menerima kegiatan gotong royong dari anggota kelompok kerjanya dan dia akan membayar dengan tenaga pula di kemudian hari apabila anggota kelompok lainnya membutuhkan. Pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga kerja yang dilakukan secara bersama atau gotong royong antara lain membangun rumah ataupun rumah ibadah, upacara perkawinan ataupun kematian. Sementara kegiatan gotong royong dalam bidang pertanian dilakukan untuk pekerjaan memotong rumput, memanen, dan menanam.

3.10 Makanan Lokal dan Gizi

Jagung secara budaya tradisional selain merupakan makanan pokok lokal bagi masyarakat Desa Alila, juga merupakan makanan pokok bagi masyarakat di berbagai desa di Provinsi NTT. Keadaan ini bermula karena tanaman jagung tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit ataupun air yang banyak. Sifat jagung yang demikian sangat cocok dengan iklim di Desa Alila, sehingga jagung dapat tumbuh dengan subur pada kondisi alam yang buruk dan berbatuan, sebagaimana terlihat di banyak daerah di kepulauan Alor dan Provinsi NTT. Jagung di daerah ini dijadikan sebagai makanan *subsistence*

atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun dalam perkembangannya, pola makan pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Alor, termasuk Desa Alila, telah mengalami perubahan.

Jagung yang banyak dikonsumsi masyarakat Desa Alila adalah jagung keterma yang tua. Jagung biasa dijadikan sebagai makanan berupa nasi jagung. Mereka mempunyai kebudayaan untuk mengolah nasi jagung, sehingga jagung itu berbentuk seperti nasi berwarna putih. Jagung itu ditumbuk dan kemudian dipisah antara jagung yang dapat dibuat nasi jagung dan yang tidak. Jagung yang tidak dapat dibuat jadi nasi ini digunakan untuk membuat panganan lain.

Biasanya jagung disimpan di atas para-para yang ada di atas dapur setelah dipanen dari ladang. Jagung yang disimpan itu diambil sedikit demi sedikit, kemudian ditumbuk agar berwarna putih. Dahulu, penumbukan ini biasa dilakukan secara manual tradisional, tetapi sekarang penumbukan jagung sudah menggunakan peralatan elektronik seperti blender. Penumbukan dengan alat elektronik ini dilakukan di rumah orang yang memiliki genset karena listrik di Dusun Bota padam di siang hari.

Saat ini masyarakat Desa Alila sudah tidak puas kalau hanya mengonsumsi jagung yang sudah diolah menjadi nasi jagung. Untuk itu, mereka menyelingi kebiasaan makan nasi jagung itu dengan nasi beras yang diperoleh dari berladang. Akan tetapi, kondisi alam yang buruk ditambah dengan teknik perladangan yang sederhana menyebabkan hasil ladang sering tidak memenuhi kebutuhan beras dalam setahun. Walaupun mereka kehabisan simpanan beras, mereka rela membelinya di warung seharga Rp5.000,- per liter.

Beras dan jagung merupakan makanan utama yang membutuhkan penyimpanan khusus. Masyarakat yang ekonominya di atas rata-rata masyarakat desa biasanya memiliki tempat menyimpan padi dan jagung yang dinamakan *esel*. *Esel* merupakan bangunan panggung dengan luas kira-kira 9 meter persegi. Penduduk yang tidak

memiliki *esel* dapat menitipkan padi dan jagungnya pada pemilik *esel* tersebut.

Masyarakat Desa Alila kebanyakan memasak makanannya dengan cara yang sederhana. Mereka tidak begitu memakai bumbu untuk memasak makanannya. Masyarakat desa banyak yang tidak tahu cara mengolah makanan agar menjadi enak dan bergizi. Mereka terbiasa hanya sekedar merebus lauk pauknya dan menambahnya dengan garam dan *vetsin*. Ikan tersebut mereka dapat dari mencari ikan di laut atau membelinya apabila mereka mempunyai uang. Sementara sayur-sayuran yang biasa mereka makan tidak begitu bervariasi, antara lain sayur merongga atau daun kelor, sayur daun singkong, sayur jantung pisang, dan sayur bunga pepaya, itupun kalau sayur-sayuran itu mereka tanam di halaman rumah. Mereka juga memiliki kebudayaan memakan jagung yang direbus dan dicampur dengan sayur-sayuran tersebut.

Menurut petugas ahli gizi dari Puskesmas Kokar, pasien yang berobat ke puskesmas yang berasal dari Desa Alila banyak yang kurang gizi. Hal itu karena mereka lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan karbohidrat yang diperlukan untuk memperoleh tenaga bertani, sehingga menu makanannya kurang bervariasi. Sementara kebutuhan akan protein, vitamin, dan mineral sangat kurang. Ditambahkan pula bahwa jumlah balita kurang gizi cukup banyak di Desa Alila, terlihat dari berat badan balita yang tidak seperti berat balita pada usia yang seharusnya. Kekurangan gizi ini membuat daya tahan tubuh masyarakat rendah. Rata-rata yang datang berobat ke puskesmas itu sekitar 40 orang dengan jenis penyakit ISPA (infeksi saluran pernafasan atas), kulit, malaria, diare, dan tuberkulosis.

Untuk memperbaiki gizi masyarakat, Dinas Kesehatan memberikan makanan tambahan berupa bubur kacang hijau yang terkadang ditambah dengan telur kepada masyarakat sekali sebulan melalui kegiatan posyandu. Dari tanggal 5--24 tiap bulan biasanya ada kegiatan penimbangan balita dan penyuluhan. Terhadap penduduk lanjut usia diadakan pemeriksaan kesehatan sebulan sekali.

Selain posyandu, di Desa Alila terdapat Pos Kesehatan Desa lengkap dengan tenaga medis berupa perawat 2 (dua) orang dan bidan satu orang. Setiap bulan perawat dan bidan ditambah tenaga dokter memeriksa kesehatan masyarakat Desa Alila.

3.11 Penutup

Ketahanan pangan merupakan konsep untuk melihat bagaimana kondisi pangan secara nasional sampai tingkat keluarga. Kondisi pangan dari sisi sosial politik dilihat dari ketersediaan pangan masyarakat, stabilitas pangan yang dijamin negara, dan kemampuan masyarakat untuk mendapat dan memproduksi pangan. Sementara dari arti kesehatan, pangan merupakan makanan yang dikonsumsi masyarakat secara sehat dalam arti memenuhi kandungan gizi yang dibutuhkan seseorang. Jadi, ketahanan pangan berhubungan dengan jumlah pangan dan juga mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat. Apabila ketersediaan pangan sudah terpenuhi, maka permasalahan yang sering muncul adalah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit untuk mengaksessnya karena faktor kemiskinan. Tidak heran kalau dalam suatu wilayah yang kondisi pangannya secara keseluruhan mencukupi, namun tidak banyak penduduk miskin yang dapat mengaksessnya, mengakibatkan terjadinya rawan pangan pada sebagian penduduk di wilayah tersebut.

Kondisi kemiskinan yang menyebabkan rawan pangan tidak dapat dilepaskan dari kondisi budaya dan pandangan hidup suatu masyarakat. Penduduk di Kabupaten Alor misalnya, budaya konsumerisme dalam kondisi ekonomi lemah menyebabkan masyarakatnya terjerat dalam kemiskinan dan akhirnya menyebabkan ketahanan pangan sebagian besar masyarakatnya menjadi lemah. Budaya konsumerisme ini tercermin dari kegemaran masyarakat untuk mengadakan pesta atas setiap peristiwa yang mereka anggap harus dirayakan. Masyarakat Desa Alila di Kabupaten Alor yang menjadi objek penelitian ini misalnya, merupakan masyarakat peladang berpindah yang memiliki budaya pesta pada setiap kesempatan. Mereka banyak melakukan kegiatan berkumpul sambil

makan-makan pada setiap kesempatan, seperti kelahiran anak, khitanan, pernikahan, perkawinan, dan juga pesta-pesta perayaan sosial seperti kemenangan dalam pertandingan sepak bola antardusun di Desa Alila dan sebagainya. Pesta pada masyarakat ini identik dengan makan bersama sambil berkumpul dengan hidangan seadanya. Apabila seseorang tidak mampu untuk mengadakan pesta dan tidak menghadiri pesta seseorang kendati sudah diundang, ia akan merasa malu karena tidak dapat ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Terkadang seseorang harus berhutang kepada rentenir agar dapat mengadakan pesta.

Pada saat pesta, masyarakat makan hidangan yang kandungan gizinya tidak terlalu cukup memenuhi kebutuhan kesehatan. Hidangan yang disajikan adalah kue-kue atau makanan berkarbohidrat tinggi, sementara daging baru disajikan kalau ada pesta besar dengan catatan penyelenggara pesta mampu menyediakannya. Adapun sayur-sayuran, buah-buahan sebagai sumber vitamin, dan mineral jarang disajikan dalam acara pesta. Dalam menu makanan keseharian pun, masyarakat di Desa Alila kurang memakan sayur. Mereka lebih banyak memakan jagung dan beras padi ladang yang merupakan makanan budaya mereka. Kebiasaan menu makanan seperti itu menyebabkan kondisi anak-anak Desa Alila menurut data Puskesmas Kecamatan Alor Barat Laut, tidak sesuai dengan pertumbuhan anak seharusnya.

Masyarakat Desa Alila mayoritas miskin, bekerja sebagai petani peladang berpindah. Mereka sangat sulit mengubah pola pertanian ini karena pandangan hidup mereka masih menggantungkannya pada kemurahan alam. Memang mereka bisa saja menghasilkan kehidupan yang makmur dari alam, tetapi kalau mereka mau mengolah alam dan membuat alam itu mencukupi kebutuhan mereka. Namun, yang dilakukan masyarakat peladang berpindah biasanya adalah menerima saja apa yang diberikan alam sehingga hasilnya tergantung pada kondisi alam. Apa yang diberikan alam hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka dan tidak bertujuan untuk dijual. Itulah sebabnya uang yang dimiliki oleh

masyarakat menjadi terbatas, sehingga mereka relatif tidak mampu untuk membeli bahan makanan yang tersedia di pasar. Oleh karena itu, mereka mengusahakan sendiri makanannya, sekedar hanya untuk menghilangkan lapar saja. Kondisi kemiskinan pada masyarakat Desa Alila disebabkan antara lain; kondisi alam yang sering merusak hasil panen ladang dan kebun sehingga mereka tidak mempunyai hasil lebih untuk dijual agar memperoleh uang. Kondisi pasrah ini menyebabkan ketahanan pangan mereka menjadi rawan. Etos kerja yang lemah akibat kepasrahan pada alam membuat mereka memiliki budaya statis yang tidak banyak berubah dari apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya.

Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan memang berusaha mengubah pandangan hidup masyarakat yang bergantung pada alam dengan melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Badan ini bekerja sama dengan berbagai dinas dan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan seperti BLT, PNPM, dan KUBE. Ternyata dari berbagai bantuan tersebut hasilnya tidak akan maksimal apabila kondisi budaya masyarakat sebagai penyebab kemiskinan tidak diperhatikan. Misalnya budaya pesta yang ada pada masyarakat miskin di Desa Alia dan sekitarnya sebaiknya diperhatikan oleh pemerintah agar masyarakat mengurangi kegiatan tersebut. Uang yang dihabiskan untuk pesta seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan gizi pangan mereka. Penyuluhan di bidang gizi pada masyarakat pun masih kurang sehingga mereka tidak mampu mengubah cara pandang mereka terhadap keseimbangan kandungan gizi dalam pangan yang mereka konsumsi.

Selain itu, masyarakat Desa Alila pun masih perlu pendamping dari luar komunitas mereka agar mampu meningkatkan semangat dan kreativitas sebagai upaya meningkatkan mutu pangan mereka. Memang tidak mudah untuk mengubah budaya dan pandangan masyarakat yang telah dimiliki selama bertahun-tahun. Tetapi, sebagaimana modernisasi yang tak dapat terbendung oleh masyarakat Desa Alila, mau tidak mau, mereka harus mau mengubah dirinya. Alam akan semakin berkurang untuk mencukupi kebutuhan

pangan mereka seiring dengan terjadinya fenomena-fenomena yang tidak kondusif seperti perubahan iklim (*global warming*). Alam yang terus-menerus diolah tanpa ada upaya memperbaiki kondisi alam itu akan membuat masyarakat kekurangan pangan. Pihak luar yang bertugas memajukan hidup mereka harus dapat mengubah mental masyarakat agar mau berubah dari budaya ladang berpidah ke pertanian menetap. Semangat dan etos kerja masyarakat harus dibangkitkan. Oleh sebab itu, bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus seimbang antara bantuan materi dan etis.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2009. *Laporan Analisa Neraca Bahan Makanan Kabupaten Alor*. Kalabahi: Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor.
- Haba, John, dkk. 2000. *Pengkajian Program-program Taskin di desa Sinar Jaya, Lampung Selatan dan Desa Purwosari, Kulonprogo*. Jakarta: Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hidayat, Eko W. 2007. *Pembangunan Kabupaten Alor Melalui Teknologi Tepat Guna*. Subang: Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- Itta, Hans. 2008. *50 Tahun Kabupaten Alor: Dalam Bingkai Sejarah Pemerintahan dan Pembangunan*. Jakarta: Hanfed Institute.
- Jafa, Albert (Ed). 2008. *Gerbadestan; Titian Masa Depan, Abstraksi Perubahan Alor*. Jakarta: Bentara Komunika.
- Marzali, Amri. 2005. *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Qoyim, Ibnu, dkk. 2004. *Religi Lokal & Pandangan Hidup*. Jakarta. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- Sudiyono. 2000. *Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Wiranta, Sukarna. 2007. *Kemiskinan dan Pemiskinan Global*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

BAB IV

MANAJEMEN DAN REVITALISASI PANGAN LOKAL

Oleh: Robert Siburian

4.1 Pendahuluan

Kabupaten Alor merupakan salah satu dari 20 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).¹ Kondisi daerah Alor tidak jauh berbeda dengan kondisi di daerah lain di Provinsi NTT, antara lain musim kemarau yang lebih lama dibandingkan dengan musim hujan, topografi yang berbukit-bukit dan kering, dan tingkat kesuburan tanah yang relatif rendah. Realitas kondisi alam yang demikian mengakibatkan bumi Alor khususnya dan Provinsi NTT umumnya kurang cocok dijadikan sebagai areal pertanian, kecuali di beberapa tempat. Kondisi alam yang tidak menguntungkan itu ditambah iklim yang kurang mendukung, dan pola makan yang mulai bergeser dari dulunya sebagai pengonsumsi nonberas menjadi beras mengakibatkan kasus kerawanan pangan, terutama bahan pangan beras, sering terjadi di provinsi ini. Faktor alam sering digunakan untuk menjustifikasi penyebab terjadinya rawan pangan dan gagal panen ataupun ketidakberhasilan kegiatan pertanian. Padahal, realitas alam dan iklim Alor dan NTT yang demikian bukan lagi hal baru. Fenomena itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Oleh karena itu, menyalahkan alam tidak lagi seharusnya terjadi, sehingga

¹ Daftar kabupaten/kota di Provinsi NTT: Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Lembata, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Kota Kupang, Manggarai Timur. Kecamatan di seluruh provinsi adalah 270 kecamatan terdiri atas 2533 desa dan 303 kelurahan (<http://www.nttprov.go.id/index.php?hal=pemkab>).

kendala-kendala akibat keterbatasan alam yang tidak mendukung dilakukannya kegiatan pertanian tidak lagi beralasan (DoE, 2008). Namun dalam realitas kekinian, faktor alam ini tidak dapat disiasati oleh petani, sehingga mengakibatkan produksi pertanian yang ada tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan pangan penduduk yang berakibat timbulnya bencana kerawanan pangan itu.

Ada 13 kabupaten di Provinsi NTT yang mengalami kerawanan pangan sehingga penanganannya dalam hal ketahanan pangan direkomendasikan, mulai dari prioritas 1 sampai 3. Kabupaten yang dimaksud adalah Sumba Barat, Manggarai, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Alor, Lembata, Kupang, Belu, Ende, Sikka, Timor Tengah Utara, dan Flores Timur. Kabupaten Alor berada di urutan ke-5 dengan status kerawanan pangan yang tinggi dan masuk pada level prioritas pertama.² Desa-desa yang berada di Kabupaten Alor berpotensi menjadi desa rawan pangan akibat perubahan iklim global yang tidak menentu yang dapat berdampak pada kegagalan panen karena kekeringan ataupun angin topan. Menurut data 2005, dari 174 desa, hanya 8 desa (5%) yang relatif aman dari risiko kerawanan pangan. Sebanyak 113 desa (65%) berisiko ringan dan 53 desa (30%) lagi berisiko sedang. Tingginya jumlah desa yang mengalami kerawanan pangan pada tahun 2005 itu tidak saja terjadi di Kabupaten Alor, tetapi juga di daerah lain di NTT, bahkan desa-desa yang memiliki hamparan persawahan yang begitu luas seperti di wilayah selatan dari Kabupaten Timor Tengah Selatan juga mengalami masa kelaparan. Penyebabnya adalah tahun itu terjadi *elnino* yang mengakibatkan masa kekeringan lebih lama lagi dari yang sebelumnya.³

Kerawanan pangan yang terjadi berimplikasi kepada rendahnya asupan gizi yang dikonsumsi seseorang, bahkan tidak

² Sumber data: http://www.bakosurtanal.go.id/igte2nd/materi/workshop%20paper_16TE_Ratih%20-Dewanti.pdf (Diunduh 22 Juli 2009).

³ Wawancara dengan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

heran kalau kasus-kasus gizi buruk di Kabupaten Alor yang terdiri dari 15 pulau di mana 9 pulau di antaranya berpenduduk, juga mewarnai pemberitaan media massa. Apabila potensi kerawanan pangan ini tidak diantisipasi melalui langkah-langkah strategis, dikuatirkan potensi itu akan berubah menjadi kasus rawan pangan. Terkait dengan potensi kerawanan pangan yang ada di Kabupaten Alor, tulisan ini ingin menjawab beberapa hal. *Pertama*, apakah memang kerawanan pangan terjadi di daerah ini? *Kedua*, bagaimana sejarah dan sumber pangan di Kabupaten Alor sehubungan dengan terjadinya perubahan pola makan pada masyarakat? *Ketiga*, bagaimana kondisi perpanganan beras dan nonberas yang ada? *Keempat*, bagaimana cara pemerintah untuk mengembalikan keberadaan pangan lokal?

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, pembahasan dalam tulisan ini selalu dihubungkan dengan kondisi di tingkat provinsi. Sebab, secara umum, pangan lokal di Kabupaten Alor maupun di Provinsi NTT adalah sama dan topografi di seluruh wilayah Provinsi NTT relatif sama.

4.2 Sejarah dan Sumber Pangan Alor

Dalam perjalanan sejarah kehidupannya, penduduk di Provinsi NTT umumnya dan di Kabupaten Alor khususnya bukan pemakan pangan beras. Mereka hidup dari pangan lokal seperti jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Ketiga komoditas tersebut menjadi andalan untuk memperoleh asupan karbohidrat. Keberadaan sumber pangan lokal tersebut didorong pula oleh topografi Provinsi NTT yang berbukit-bukit. Dalam hal ini, jagung menjadi makanan pokok sedangkan dua komoditas lainnya menjadi pendamping dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk. Jagung sebagai makanan pokok masyarakat NTT secara umum dan masyarakat Alor secara khusus yang sudah turun-temurun didatangkan dari negara lain. Para pelaut Belanda maupun Inggris mencatat bahwa jagung telah lebih dari tiga abad menjadi *ethno-food* dari masyarakat NTT, khususnya di Timor Barat. Fowler (2005,

dikutip oleh Lassa, 2009b) mengklaim bahwa jagung dibawa oleh kolonial sejak 400--500 tahun yang lalu.

Kalau Fowler mengatakan asal-muasal pangan lokal penduduk Alor merupakan impor dari negara lain, berbeda dengan cerita rakyat Alor berjudul "Lointang".⁴ Diceritakan bahwa konon pada zaman dulu hiduplah suami-istri: Pen Tang (suami) dan Boin Tang (istri) di Dael Mate (bagian utara Omtel) bersama dengan enam anaknya bernama Lointang, Mokatang, Hulungtang, Habetang, Fentang, dan Laintang. Keluarga Pen Tang–Boin Tang dan keluarga-keluarga lainnya hidup dengan tenteram. Namun seiring berjalannya waktu, pada suatu ketika turunlah hujan lebat yang mengakibatkan banjir melanda segala tempat. Banjir tersebut telah menghanyutkan seluruh binatang peliharaan, meluluhlantakkan ladang dan kebun serta segala isinya. Penduduk pun menjadi kehabisan akal sebab semua bahan makanan musnah dan hilang dibawa banjir, akibatnya kerja keras menjadi konsekuensinya agar kehidupan dapat dilanjutkan. Suatu hari, Lointang (anak perempuan Pen Tang – Boin Tang) sedang tertidur di siang hari karena kelelahan bermain. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang pengorbanan yang harus ia lakukan untuk meringankan penderitaan orang tuanya dalam mencari nafkah. Lointang harus dicincang dan tubuhnya ditebarkan ke seluruh kebun. Setelah terbangun dari tidurnya dan Pen Tang – Boin Tang kembali ke rumahnya dari bekerja di kebun, ia pun menceritakan mimpinya. Singkat cerita, Lointang menjalankan pengorbanan itu dibantu oleh 5 (lima) saudaranya yang lain. Ketika tugas masing-masing saudaranya sudah disampaikan, mereka inipun saling berpisah melaksanakan tugas sesuai saran Lointang sebelum ia dicincang.⁵ Seminggu

⁴ Cerita rakyat ini merupakan arsip Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor, yang ditulis kembali oleh Lodowyk R. Adang sesuai dengan penuturan lisan nenek Bay yang bermukim di Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

⁵ Masing-masing tugas anak Pek Leng yang lain sesuai dengan yang diminta oleh Lointang adalah sebagai berikut (1) Mokatang, ia pergi ke barat berperan sebagai guruh dan guntur pertanda akan turunnya hujan,

kemudian, Pen Tang – Boin Tang kembali ke kebun dan terheran-heran melihat tubuh putrinya Lointang berubah dan tumbuh menjadi padi, jagung, kacang-kacangan, dan ubi-ubian. Hasil pertanian ini melimpah sebab kendati hasilnya sudah mereka panen namun tidak pernah habis, sehingga dibutuhkan tenaga dari orang lain.

Hasil kebun yang tidak habis walaupun sudah dipanen menimbulkan iri hati pada orang lain, yaitu dari orang yang bernama Aibela. Keirihatian itu ia wujudkan dengan menebas seluruh isi kebun hingga beterbangan ditiup angin ke sana ke mari, bahkan ada yang terbang sampai ke Manatutu di Timor Timur (Timor Leste sekarang), sebuah daerah yang diperintah oleh Raja Meo Tolang. Isi kebun yang terbang ke Manatutu dan setibanya di sana berubah wujud menjadi seorang putri cantik. Saat itu, rakyat di Manatutu sedang berpesta dan masih berpesta sampai waktu yang lama atas kemakmuran yang mereka capai. Sebaliknya, di Alor terjadi masa paceklik seiring dengan terbangnya isi kebun karena ditebas oleh orang yang iri hati. Akibat penderitaan yang tidak lagi tertahankan, akhirnya ayah Lointang bertindak untuk membawa pulang seluruh bahan makanan dari Manatutu. Ketika rakyat Manatutu masih hanyut dalam pesta, tiba-tiba pasukan ayah Lointang mengambil seluruh persediaan makanan rakyat Manatutu dan membawanya kembali ke Alor. Bersamaan dengan itu, hilang pula putri cantik jelmaan jagung, padi, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang terbang dari Pulau Alor, padahal Raja Meo Tolang berencana akan menjadikannya sebagai

(2) Laintang, ia naik ke langit menjadi hujan dan kilat agar Lointang tumbuh, namun kilat tidak boleh menyambar manusia karena mereka bersaudara, (3) Hulungtang, ia pergi ke langit berperan sebagai bintang yang memberi tanda bahwa petani sudah boleh menanam, (4) Habetang, ia naik ke udara dan menjadi awan agar padi, jagung, kacang, dan umbi-umbian yang sedang tumbuh tidak kepanasan, (5) Fentang, ia tetap di bumi dan berkembang biak untuk menikmati semua makanan yang tumbuh dari bagian tubuh Lointang dan bertugas untuk menceritakan pengorbanan Lointang dan saudara-saudaranya ke generasi berikutnya hingga akhir kiamat.

istri. Karena raja menganggap putri tersebut "diculik" oleh pasukan dari Alor, amarahnya murka. Sang raja pun memerintahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran ke Dael Mate. Ketika pengejaran dilakukan, penduduk di Alor masih dalam suasana pesta karena masa penderitaan sudah berakhir dengan hasil rampasan dari daerah Manatutu. Hasil rampasan sudah dibagi dan dibawa ke masing-masing gudang makanan termasuk dibawa oleh binatang-binatang⁶ yang turut membantu pasukan Pan Teng ikut memperoleh bagiannya. Makanan jatah binatang-binatang itu sudah dibawa ke lubang dan liang masing-masing. Ketika semua orang masih dalam suasana pesta, tiba-tiba pasukan Raja Meo Tolang datang untuk mengambil kembali sang putri, namun mereka tidak menemukannya. Karena tidak menemukan putri yang dicari, akhirnya mereka mengambil seluruh persediaan makanan penduduk di Alor. Suasana desa kembali sepi seiring dengan hilangnya harapan hidup akibat persediaan makanan yang kembali lenyap dirampas pasukan lain. Ketika bayang-bayang penderitaan sudah di depan mata, tiba-tiba hujan turun membasahi tanah Alor. Saat itu pula padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian tumbuh di berbagai tempat. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu merupakan jatah binatang-binatang yang ikut membantu pasukan Pan Teng ke Manatutu yang tercecceh ketika mereka membawa bagiannya ke lubang ataupun liang masing-masing. Tumbuhan baru yang tumbuh pada waktu itu dipercaya sebagai leluhur dari padi, jagung, kacang-kacangan, dan

⁶ Binatang-binatang yang membantu pasukan Pan Teng adalah (1) Burung sigurintang berperan sebagai mata-mata untuk mengintai, (2) Burung elang bertugas mengintai dari udara untuk melihat keberadaan musuh, (3) Tikus berperan sebagai tukang menerat dan melubangi lumbung dan para-para serta memutuskan tali dari pintu gudang dan tali para-para, (4) Burung terkukur terbang mengawali rombongan dan menyusup ikut serta meramaikan pesta yang diadakan Raja Meo Tolang, (5) Burung balam juga berfungsi sebagai penyusup dan ikut menari (*lego-lego*), burung pipit ikut bernyanyi di pesta Raja Meo Tolang dengan suaranya yang nyaring serta turut mengangkat makanan dari gudang ke perahu, dan (6) Semut, sebagai buruh pengangkut makanan dari gudang ke perahu.

umbi-umbian yang tumbuh hingga saat ini. Tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi pangan lokal di Kabupaten Alor sampai sekarang.⁷

Terlepas dari asal-usul pangan lokal masyarakat di NTT umumnya dan Alor pada khususnya, tetapi mengingat sudah begitu lamanya jagung menjadi makanan pokok bagi masyarakat di NTT yang didukung oleh karakteristik alam NTT untuk bertumbuh dan berkembangnya produksi jagung, kebijakan pangan yang melibatkan keberadaan pangan lokal seperti jagung sering luput dari perhatian. Kondisi ini berbeda dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap pangan beras yang dalam kebijakan pangan menempati posisi "terhormat". Keberpihakan itu juga tampak dari parameter kesejahteraan masyarakat Indonesia yang memakai ukuran tingkat konsumsi beras per kapita per tahun. Dengan demikian, secara nasional hal itu berpengaruh pada kebijakan pembangunan pertanian

⁷ Cerita rakyat seperti ini dimiliki oleh masing-masing suku yang berada di NTT. Mirip dengan cerita rakyat di Alor, juga terjadi pada masyarakat suku Ngada. Dalam cerita rakyat ini, juga anak perempuannya yang dikorbankan untuk tumbuhnya tanaman-tanaman pangan. Bedanya adalah, ketika panen yang tidak habis-habis dan lumbung pangan sudah penuh, orang tua dari anak perempuan yang mengorbankan dirinya ini membakar sisa tanaman pangan yang masih ada di ladang. Asapnya naik ke atas dan mengumpul di udara, dan itu dipercaya sebagai tanda bahwa seluruh arwah tanaman pergi ke utara. Sebagian hasil bakaran itu tersangkut di pegunungan dan lereng-lereng perbukitan. Manusia yang membakar ladangnya ini selanjutnya kesulitan untuk menyediakan bibit, sehingga ia mengejar sampai ke perbukitan. Pada saat itu, burung dan tikus justru sedang berpesta menikmati tanaman pangan yang tumbuh di lereng-lereng perbukitan dan pegunungan yang merupakan hasil bakaran tanaman pangan yang tersangkut di lereng dan pegunungan. Kemudian, manusia ini meminta kepada burung dan tikus itu sebagian dari pangan yang dimakannya untuk ditanam. Burung dan tikus memberikan apa yang dibutuhkan manusia tetapi dengan suatu perjanjian bahwa tanaman pangan yang ditanam oleh manusia akan bebas dimakan oleh burung dan tikus sebagai bagian mereka, sebagaimana terjadi pada saat ini (Widiymitra, 2008: 109).

yang secara tidak langsung mengarahkan perhatian pemerintah dan sumber daya lahan untuk swasembada beras. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi pada besarnya perhatian pemerintah untuk pengembangan pertanian lahan basah (*wet land*). Padahal secara demografis bagian terbesar penduduk Indonesia bermukim di daerah dataran tinggi (pegunungan) dan menggantungkan hidupnya dari mengelola lahan kering (*rain-fed land*) (DoE, 2008). Tidak jarang kebijakan untuk mengembangkan persawahan itu selain menggeser pola pertanian penduduk lokal juga berindikasi merusak lingkungan.⁸ Kalau proses produksi pangan beras selalu mendapat perhatian penuh dari pemerintah, maka untuk pangan lokal pengelolaan seluruhnya diserahkan kepada petani. Indikasi rendahnya perhatian pemerintah terhadap pangan lokal juga tampak dari bantuan-bantuan yang diberikan ketika terjadi bencana alam ataupun kerawanan pangan. Salah satu contohnya penduduk Alor sebagai pemakan jagung ketika menerima bantuan pangan tidak pernah menerima jagung. Bantuan yang mereka terima selalu dalam bentuk beras.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ketahanan pangan nasional, selalu berorientasi kepada ketersediaan beras. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara nasional. Kebijakan nasional yang demikian mengakibatkan persoalan yang muncul selalu pada sejauh mana persediaan beras yang ada, ditambah dengan produksi beras, kemudian dikurangi dengan kebutuhan beras pada tahun berjalan. Hitung-hitungan itu akan bermuara pada apakah kebijakan yang diambil itu mengimpor beras atau tidak. Artinya, ketahanan pangan yang selalu menjadi perhatian pemerintah hanya kepada kelompok masyarakat pemakan beras, sehingga fenomena itu sering dijadikan selain sebagai isu nasional, juga sebagai isu politik. Padahal kalau ditelusuri lebih jauh lagi, persoalan pangan bagi bangsa Indonesia

⁸ Gagalnya pembangunan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk dijadikan sebagai lahan persawahan merupakan indikasi kebijakan pemerintah yang hanya memperhatikan pengembangan lahan sawah.

bukan hanya berpusat pada beras, tetapi juga sumber-sumber karbohidrat lainnya. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia mencatat bahwa tidak semua kelompok masyarakat awalnya sebagai pemakan beras. Jagung dulunya adalah makanan pokok kelompok masyarakat yang tinggal di Provinsi NTT dan sagu merupakan makanan lokal masyarakat di Maluku dan Papua. Namun belakangan ini, beras menjadi makanan pokok hampir seluruh rakyat Indonesia, sehingga bantuan-bantuan makanan yang dikirim ke berbagai daerah melalui program-program untuk membantu orang-orang miskin tidak melihat latar belakang sejarah makanan pokok daerah yang dimaksud. Bantuan beras miskin menjadi salah satu introduksi pemerintah yang menyebabkan tergesernya pola makan tradisional kelompok masyarakat yang disebutkan di atas sebab komoditas beras dengan program raskin (beras untuk keluarga miskin) itu sudah sampai ke seluruh pelosok negeri.

Bagi masyarakat di Provinsi NTT ataupun di Kabupaten Alor, tidak beralasan untuk menyalahkan alam sebagai faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan di daerah itu. Iklim yang ada di NTT dengan musim kemarau yang lebih lama dibandingkan dengan musun hujan yang lebih pendek bukan fenomena baru, tetapi sudah berlangsung sejak dulu kala. Namun pada masa lalu, masyarakat di NTT jarang menjadi berita sebagai daerah yang mengalami kerawanan pangan. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2002 Provinsi NTT pernah mengalami surplus pangan yang berasal dari pangan sumber karbohidrat seperti ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Ketiga jenis pangan ini bila diekuivalenkan dengan beras, terdapat surplus sebesar 20% (*Pos Kupang* Edisi Jumat 24 Januari 2003, dikutip oleh Lassa, 2009a: 1). Hanya saja, pengertian pangan mengalami penyempitan makna sepanjang pemerintahan Orde Baru. Pada era itu, pangan diartikan hanya mengarah pada beras saja. Dominasi beras atas pengertian pangan juga terindikasi dari hadirnya instansi Dolog di daerah-daerah yang hanya mengatur distribusi beras saja. Dolog tidak pernah berbicara soal keberadaan pangan lokal, sesuai dengan makanan pokok lokal yang ada di daerah.

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, jagung masih menjadi makanan pokok dalam kehidupannya. Begitu menyatunya jagung dalam kehidupan masyarakat desa sehingga mereka belum merasa kenyang kalau belum makan jagung, walaupun sepanjang hari itu mereka sudah banyak memakan makanan yang bukan berbahan jagung. Pergeseran pola makan dari jagung ke nonjagung hanya terjadi pada masyarakat perkotaan. Penyebabnya adalah masyarakat kota membeli bahan makanan untuk dimakan, sementara pengadaan pangan lokal di pasaran sangat kurang karena yang ada adalah beras.

4.3 Kondisi Perpanganan

Provinsi NTT merupakan provinsi yang belum mandiri dalam ketersediaan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan sekitar 4.534.319 jiwa penduduk NTT pada tahun 2008, pemerintah masih harus mendatangkan beras dari daerah lain. Walaupun pemerintah provinsi sudah mencoba untuk meningkatkan produksi beras, peningkatan itu kurang berarti karena selain persentasenya kecil juga akibat adanya pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang sudah berubah dari pengonsumsi beras ke nonberas. Pertumbuhan penduduk NTT rata-rata dalam lima tahun terakhir sekitar 1,98%, namun pertumbuhan produksi padi rata-rata dalam kurun waktu yang sama hanya 1,73% (*Leaflet* BPS Provinsi NTT, 2009). Fenomena itu menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi padi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang bertambah. Ketimpangan itu akan semakin lebar ketika total produksi padi dalam satu tahun dihadapkan pada kebutuhan penduduk dalam satu tahun.

Perkiraan kebutuhan konsumsi beras bagi 4.619.700 jiwa penduduk NTT pada tahun 2009 adalah sekitar 507.368 ton. Sedangkan perkiraan produksi padi pada tahun yang sama sebesar 595.872 ton gabah giling kering (GKG) atau ekuivalen dengan hasil beras, baru sekitar 331.803 ton (*Leaflet* BPS Provinsi NTT, 2009). Tentu, perkiraan ini mengabaikan faktor-faktor yang dapat

mengakibatkan berkurangnya hasil produksi padi ataupun gagal panen akibat kekeringan, hama, dan banjir. Dari perbandingan antara produksi beras dengan kebutuhan beras diperoleh bahwa kebutuhan untuk konsumsi beras di NTT masih kurang sekitar 175.565 ton.

Sementara pada tahun 2008 produksi tanaman padi Provinsi NTT mencapai 577.986 ton GKG, terdiri atas 440.909 ton GKG berasal dari produksi padi sawah dan 136.896 ton GKG dari padi ladang. Pada tahun itu, produktivitas tanaman padi sawah Kabupaten Alor yang mencapai 50,72 kuintal per hektar merupakan produksi yang tertinggi dari kabupaten lain, termasuk untuk produktivitas tingkat Provinsi NTT yang hanya sebesar 34,78 kuintal per hektar. Walaupun produktivitas tanaman padi di Kabupaten Alor tertinggi di Provinsi NTT, sebenarnya produksi itu masih dapat ditingkatkan lagi untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Sementara dari sisi ekstensifikasi relatif sulit dilakukan karena tingkat kemiringan tanah di Alor begitu tinggi (lihat Gambar 4.1).



Sumber Foto: Koleksi Peneliti, 2009

Gambar 4.1 Lahan Pertanian Penduduk yang Berada di Punggung Punggung Perbukitan

Luas tanah dengan tingkat kemiringan 00--01 derajat hanya 100,98 hektar atau sekitar 3,53% dari luas wilayah Kabupaten Alor, 2.864,64 hektar. Sementara tingkat kemiringan antara 02--15 derajat mencapai 249,58 hektar atau sekitar 8,71%. Karena topografi tanah dari kedua kelompok kemiringan ini merupakan lahan yang relatif datar, maka mengakibatkan daerah ini menjadi tempat-tempat permukiman penduduk. Lokasinya pun berada di sepanjang pesisir, hal itu tampak juga dari tingkat kerapatan rumah-rumah penduduk di wilayah pesisir yang relatif padat. Adapun lahan dengan kemiringan relatif tinggi kurang cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian kecuali dikerjakan dengan kerja keras seperti membuat teras-teras untuk mencegah terjadinya erosi jauh lebih luas, yaitu pada tingkat kemiringan 15--40 derajat seluas 682,29 hektar (23,82%), dan tanah yang lebih terjal lagi dengan kemiringan 40 derajat lebih seluas, yaitu 1.831,79 hektar (63,94%) (BPS Kabupaten Alor, 2008).

Jumlah produksi padi/beras di Provinsi NTT berasal dari kegiatan pertanian di lahan basah (sawah) maupun di lahan kering (ladang) dengan luas panen sekitar 187.907 ha (bandingkan: luas tanam adalah 197.267 ha).⁹ Hasil produksi padi per hektarnya adalah 3,6 ton/ha. Tingkat produksi per hektar itu dikategorikan rendah karena tingkat produktivitas maksimal padi dapat mencapai 8 ton/ha GKG. Namun, karena proses pertanian yang dilakukan oleh petani di NTT masih menggunakan cara tradisional, mengakibatkan hasil yang diperoleh pun jauh dari maksimal itu. Petani di NTT belum memelihara tanaman padinya dengan baik, tidak menggunakan pupuk dan belum menyemprot hama yang menyerangnya. Hal itu adalah akibat karena sebagian besar petani NTT merupakan penduduk miskin, sehingga mereka tidak mempunyai modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Mereka masih hidup dengan ekonomi subsisten. Selain itu, penggunaan waktu belum

⁹ Selisih luas tanam dengan luas panen sekitar 9.360 ha. Hal itu menunjukkan bahwa tanaman padi yang gagal panen cukup luas, baik yang diakibatkan oleh angin maupun hewan yang menjadi hama bagi tanaman padi seperti tikus.

dimanfaatkan secara maksimal, sehingga waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk bekerja justru digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Mentalitas yang terlalu cepat puas terhadap hasil yang diperoleh juga menjadi kendala dalam meningkatkan produksi. Petani beranggapan bahwa hasil yang diperoleh sudah cukup untuk kebutuhan setahun. Realitas ini akibat proses produksi yang dilakukan tidak berorientasi pasar, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan keluarga.¹⁰

Guna mencukupi kebutuhan beras, kekurangan itu didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pulau Sulawesi. Walaupun perkiraan kekurangan kebutuhan pangan beras sudah diketahui sehingga penyediaannya dapat dilakukan jauh hari sebelumnya, dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik. Jalur distribusi yang menggunakan kapal laut, baik untuk mendatangkannya dari Sulawesi ataupun NTB maupun menyalurkannya di tingkat Provinsi NTT sering mengalami kendala. Pada musim-musim tertentu, gelombang laut begitu tinggi, sehingga kapal-kapal yang beroperasi untuk menghubungkan pulau-pulau di NTT menjadi terhenti, yang berarti terhenti pula kegiatan pendistribusian itu. Walaupun kebutuhan beras didatangkan dari daerah lain pada tingkat provinsi, akan tetapi beberapa kabupaten di NTT justru mengirim produk berasnya ke Provinsi NTB. Kabupaten-kabupaten di daratan Flores yang merupakan daerah lumbung padi di Provinsi NTT justru menjual beras ke NTB. Fenomena itu terjadi karena faktor jalur distribusi ke daratan Timor Barat lebih sulit dibandingkan ke daerah NTB. Gelombang laut yang begitu tinggi dari daratan Flores ke arah Timor Barat sering menjadi alasan. Oleh karena itu, mungkin saja beras yang didatangkan dari NTB adalah beras yang dihasilkan oleh petani-petani NTT sendiri, yaitu petani yang bermukim di daratan Flores.

¹⁰ Wawancara dengan sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.

Penyediaan pangan yang masih harus didatangkan dari luar daerah akibat ketidakmampuan petani sendiri untuk memroduksinya, menjadi salah satu indikator rentannya ketahanan beras di NTT. Pemerintah turut memberikan kontribusi terhadap pemunculan ketergantungan ini, yaitu dengan adanya kebijakan yang "memaksakan" penduduk di NTT mengonsumsi beras, sementara kalau orang makan sagu atau jagung seolah-olah mereka warga kelas dua. Padahal tanah di NTT tidak cocok ditanami padi, tetapi untuk ditanami jagung dan sagu (Musakabe 2009, dikutip dari Tempointeraktif 04/09/2007). Melepaskan ketergantungan kepada pasokan pangan dari daerah lain, dan upaya untuk meningkatkan derajat pangan lokal, pemerintah Provinsi NTT melakukan berbagai langkah antara lain "Gerakan Pangan Lokal". Gerakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk revitalisasi pangan lokal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT. Walaupun demikian, tampaknya upaya peningkatan produksi pertanian terutama pangan lokal relatif sulit dilakukan. Kedala itu disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi beban rakyat miskin di satu sisi, namun bersamaan dengan itu, pemerintah justru berkontribusi mengurangi kreativitas petani dalam mengembangkan dirinya di sisi yang lain. Atau dengan kata lain, bantuan pemerintah untuk membantu masyarakat melalui program-program penanggulangan kemiskinan seperti pemberian bantuan beras bagi keluarga miskin justru membuat masyarakat penerima raskin terminabobokkan oleh bantuan itu. Masyarakat justru semakin malas untuk mengelola lahan pertaniannya karena mereka berkeyakinan bahwa pemerintah juga nantinya akan membantu. Pernyataan seperti ini tidak saja muncul hanya dari kalangan birokrasi, tetapi juga masyarakat sendiri seperti disampaikan oleh Ori (43 tahun), yaitu salah seorang petani dan penerima beras raskin tahun 2008. Namun, pada tahun 2009 ia dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri sebagai penerima beras raskin. Walaupun bukan orang yang berkecukupan, ia menyatakan bahwa ia tidak bisa menerima raskin tersebut terus-menerus karena masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan. Ori yang juga berprofesi sebagai tukang ojek sambil menunggu masa tanam tiba,

menilai bahwa pemberian raskin kepada penduduk miskin membuat orang menjadi bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Oleh karena itu, bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk natural sudah harus ditinjau kembali atau dihapuskan. Dalam hal ini, ia bukan berarti menolak seluruh bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau bantuan yang diberikan pemerintah itu dalam bentuk modal kerja pertanian, seperti peralatan pertanian ataupun bibit, maka yang bersangkutan akan menerimanya.

Pola pikir masyarakat dalam bercocok tanam pun masih dipengaruhi oleh mitos-mitos yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan adanya mitos yang berkembang di tengah masyarakat petani, maka luas lahan yang akan ditanam tergantung pada tahun saat panen, yang dikenal dengan istilah "tahun genap dan tahun ganjil". Oleh karena petani di Alor lebih banyak bertani tadah hujan, maka masa tanam pun dilakukan pada musim hujan, yang jatuh pada bulan November. Hasil tanam itu dipanen pada bulan Februari atau Maret tahun berikutnya. Kalau masa panen itu jatuh pada tahun genap, maka lahan yang diusahakan untuk dapat dipanen di tahun genap tersebut jauh lebih luas dibandingkan kalau masa panen jatuh pada tahun ganjil. Masyarakat percaya bahwa masa panen di tahun ganjil tidak akan memuaskan karena pada tahun ganjil banyak tikus yang menyerang tanaman petani. Dengan mitologi yang berkembang sedemikian rupa, maka tidak ada petani yang berani untuk menanam pada lahan yang luas karena diyakini ia akan mengalami kerugian nantinya. Adapun masa tanam pada tahun genap itu hanya diperuntukkan untuk mencari bibit. Ori (43 tahun) di atas mengemukakan pada tahun 2008 lalu ia hanya menanam jagung sebanyak 100 rumpun jagung tanpa menyebut berapa luas lahan yang ditanam. Hasil dari 100 rumpun jagung itu tidak diharapkan untuk dikonsumsi kecuali hanya untuk bibit pada masa tanam 2009. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa masa tanam sebenarnya hanya sekali dalam dua tahun, sehingga dapat dimaklumi potensi rawan pangan di Kabupaten Alor relatif tinggi.

Tampak bahwa sifat fatalistik dari kalangan petani begitu tinggi. Mereka tidak mencoba untuk membasmi keberadaan hama tikus yang muncul pada tahun ganjil itu dengan cara meracunnya. Alasan yang dikemukakan adalah meracun tikus tidak ada manfaatnya karena ketika tikus diracun, justru jumlahnya akan semakin besar. Walaupun tidak ada pantangan untuk membunuh tikus, namun karena itu sudah merupakan maunya alam, maka mereka membiarkan hama tikus tersebut tanpa ada upaya untuk menanggulangnya. Hal yang dilakukan untuk menghindari dari populasi tikus yang begitu banyak pada tahun ganjil adalah dengan tidak menanam komoditas pangan jenis apapun dalam lahan yang luas.

Sebenarnya, instansi yang membidangi ketahanan pangan menyadari paradigma yang keliru dari para petani ini. Dijelaskan bahwa masa panen tahun genap memungkinkan tikus-tikus untuk meningkatkan populasinya karena ketersediaan makanan yang cukup. Walaupun pada masa itu populasi tikus juga banyak, tetapi karena lahan yang ditanam oleh petani juga banyak sehingga hasilnya pun masih relatif banyak. Berbeda dengan masa panen pada tahun ganjil, populasi tikus yang begitu banyak pada masa panen tahun genap membutuhkan makanan yang banyak juga. Oleh karena masa tanam petani sudah terpola dengan mitos-mitos yang diperoleh secara turun-temurun, maka hal ini mengakibatkan hasil panen dari lahan sempit itu masih harus berbagi dengan kebutuhan pangan dari populasi tikus yang begitu banyak, akibatnya bagian untuk petani pun menjadi kecil. Realitas inilah yang dipahami oleh petani Alor sebagai sebuah kepercayaan yang apabila dilakukan akan mengalami kerugian, sehingga harus dihindari.

Pengetahuan umum orang Alor terkait dengan mitos tahun genap dan tahun ganjil, berbeda dengan pengetahuan yang ada pada masyarakat di Desa Pintumas, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Walaupun muara dari kedua pemahaman ini adalah banyaknya tikus yang muncul pada tahun-tahun tertentu, tetapi penduduk di Desa Pintumas kurang setuju dengan istilah tahun ganjil

dan tahun genap. Dengan istilah itu, maka setiap dua tahun sekali pasti terjadi tahun baik ataupun tahun tidak baik. Oleh penduduk Desa Pintumas, tahun baik dengan tahun tidak baik itu mereka sebut dengan "tahun tikus dan tahun tidak tikus". Ketika tahun tikus akan terjadi, mereka tidak akan menanam jagung ataupun padi dalam jumlah lahan yang luas. Sebaliknya, ketika tahun tanpa tikus yang terjadi, maka mereka akan mengolah lahan dalam hamparan yang luas.

Mengingat ada perbedaan dalam memahami tahun tikus dengan tahun tanpa tikus, maka untuk memahaminya tidak semudah pada mitos "tahun genap dan tahun ganjil". Penduduk Desa Pintumas memahami mitos itu dengan mengamati curah hujan yang turun pada tahun tersebut. Ketika hujan sudah turun sebelum waktunya (bulan September atau Oktober) atau hujan belum turun padahal sudah waktunya menurut pengalaman (*common sense*) mereka karena hujan baru turun pada bulan Desember, maka tahun yang akan tiba adalah tahun tikus. Oleh karena itu, lahan yang harus dikelola harus lebih sedikit. Apabila lahan yang dikelola relatif luas, maka petani tersebut akan merugi karena tanamannya akan habis dimakan tikus. Biasanya, hujan turun pada bulan November, sehingga kalau hujan turun pada waktu itu sesuai dengan yang mereka pahami selama ini, maka tahun yang akan tiba adalah tahun tanpa tikus.

Menurut koordinator pegawai PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan Alor Barat Daya, fenomena seperti ini sebenarnya bukan sebuah mitos karena dapat dijelaskan secara ilmiah. Ketika musim hujan turun tidak pada waktunya, tanaman jagung yang ditanam akan lebih cepat memasuki musim kemarau dari yang seharusnya. Ketika hujan turun lebih awal, sementara petani belum melakukan persiapan untuk masa tanam pada waktu itu, mengakibatkan waktu untuk menanam jagung menjadi lebih lama. Pada waktu itu pun musim kemarau akan lebih cepat tiba dari biasanya yang mengakibatkan ukuran tumbuhan jagung menjadi lebih pendek dari yang biasanya. Karena tumbuhan jagungnya relatif pendek, akibatnya bulir jagung menjadi lebih dekat ke tanah. Dengan

kondisi bulir jagung yang demikian, baik tikus kecil maupun besar lebih leluasa untuk memakan bulir-bulir jagung. Namun, walaupun fenomena tahun tikus dan bukan tahun tikus sudah dijelaskan sedemikian rupa, petani masih saja banyak yang tidak menerimanya dan tahun tikus masih dipercayai sebagai realitas yang harus dihindari agar tidak mengalami kerugian.

Indikator mengapa tikus banyak di lahan-lahan petani juga dapat dicermati dari lokasi lahan pertanian itu sendiri. Lahan-lahan pertanian bersebelahan dengan hutan belantara. Hutan belantara ini menjadi sarang tikus-tikus yang menyerang lahan pertanian penduduk. Selain itu, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tahun tikus dan bukan tahun tikus belum seragam, sehingga mereka yang berani membuka ladang di tahun ganjil adalah mereka yang tidak percaya mitos tersebut, tetapi jumlahnya relatif sedikit. Akibatnya, lahan pertanian yang ditumbuhi oleh tanaman jagung yang diserang oleh tikus pun menjadi relatif sedikit, sehingga mengakibatkan hasil pertanian yang diserangnya pun lebih cepat habis. Berbeda dengan lahan pertanian yang ditanam dalam hamparan yang luas, tikus pun akan menyebar dan tidak berkonsentrasi pada satu lahan jagung saja. Artinya, petani yang tidak percaya terhadap tahun tikus ini tidak berbagi kerugian dengan petani lain, sehingga hanya ia sendiri yang mengalami kerugian. Oleh karena itu, walaupun ia sebenarnya tidak percaya dengan mitos tersebut, namun untuk menghindari kerugian yang akan ditanggungnya sendiri, ia pun menjadi ikut tidak membuka lahan dalam jumlah besar pada tahun ganjil tersebut.

Upaya untuk membongkar mitos yang merugikan petani itu sudah pernah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Alor yang dimotori oleh Ibu Pulinggomang pada tahun 1996. Selain bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama agar kepercayaan yang keliru itu dapat diluruskan melalui pendekatan keagamaan, di tingkat implementasi pun harus dilakukan. Dalam hal ini, proyek percontohan pun dilakukan di Desa Silaebole. Kepala Desa Silaebole mendukung proyek percontohan ini karena ia juga seorang pendeta.

Sepanjang proyek percontohan itu dilakukan ternyata apa yang selama ini dipercayai oleh masyarakat terkait dengan tahun ganjil dan tahun genap itu tidak terbukti. Dengan kata lain, hasil yang diperoleh dari proyek percontohan ini relatif besar. Walaupun ada gangguan dari hama tikus, namun jumlah kerugian yang diakibatkannya masih dalam tingkat yang wajar. Sayangnya, proyek seperti ini tidak mendapat dukungan pada tingkat kecamatan karena paradigma berpikir mereka masih tetap diliputi kepercayaan "tahun genap dan tahun ganjil". Setelah kepala desa yang juga sang pendeta ini berhenti sebagai kepala desa karena masa tugas sudah berakhir, ia kembali sepenuhnya kepada panggilan pelayanannya di tempat lain yang mengakibatkan kepercayaan terhadap mitos "tahun genap dan tahun ganjil" masih tetap menjadi ganjalan dalam mengembangkan produksi pertanian agar pola pertanian, baik pada tahun genap maupun pada tahun ganjil minimal sama.¹¹

Hal lain yang menjadi kendala dalam meningkatkan produksi pertanian adalah semakin rendahnya persediaan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian. Orang lebih berminat pada sektor-sektor yang cepat memberikan penghasilan, seperti tukang *ojek* salah satunya. Orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, yang berada di desa-desa adalah mereka yang tidak lagi tergolong muda, sehingga dari kemampuan yang dimiliki sudah tidak lagi maksimal. Dengan semakin sedikitnya SDM di bidang pertanian ini, mengakibatkan banyak lahan-lahan yang tidak dikelola, di samping waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas pertanian tidak begitu maksimal. Sebab, petani dalam melakukan aktivitasnya di pagi hari rata-rata mulai pukul 08.00 sampai 10.00 WITA, kemudian istirahat, dan dilanjutkan lagi pada sore harinya, mulai pukul 15.00 sampai pukul 17.00 WITA. Etos kerja yang demikian inilah yang diperlihatkan oleh kebanyakan petani di Alor. Etos seperti itu mengakibatkan mereka tidak mampu menyesuaikan diri pada irama jam kerja sekitar 7 sampai 8 jam sehari sebagaimana orang yang

¹¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Alor, 2009.

bekerja pada umumnya. Oleh karena itu, ketika mereka bekerja di luar lahan pertanian seperti kuli bangunan atau kuli pada infrastruktur lain, di antara mereka banyak yang tidak sanggup atau banyak yang mengundurkan diri.

Sumber daya manusia di bidang pertanian sangat minim sekali, hal itu akibat bergesernya lapangan kerja yang diminati oleh anak-anak muda perdesaan. Mereka lebih cenderung bekerja pada sektor-sektor informal, seperti menjadi tukang ojek daripada menjadi petani. Pilihan anak muda perdesaan ini mendapat dukungan dari orang tuanya sebab tidak jarang hasil pertanian dijual untuk dijadikan uang muka membeli sepeda motor sebagai modal awal si anak menjadi tukang ojek. Kondisi kekurangan tenaga kerja ini tidak disiasati oleh petani dengan mempercepat masa pengolahan tanah dari yang biasanya mereka lakukan. Pengolahan tanah baru dilakukan menjelang musim hujan, padahal dengan kurangnya tenaga kerja pengolahan lahan pertanian seharusnya sudah dilakukan sekitar bulan Juli agar lahan yang dapat digarap lebih luas. Namun, karena penggarapan lahan baru dilakukan sekitar bulan September atau Oktober, mengakibatkan lahan-lahan yang siap untuk ditanam menjelang musim hujan hanya sedikit sehingga hasil yang diperoleh pun sedikit. Hal tersebut terjadi karena petani hanya mengandalkan pada tingkat kesuburan tanah semata karena petani tidak menggunakan pupuk dalam melakukan proses produksi.

Petani memang disayangkan tidak mau menggunakan pupuk dalam bercocok tanam untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Akan tetapi, kondisi ini tidak semata-mata diarahkan sebagai kesalahan petani saja. Bukan mereka tidak mau menggunakan pupuk ataupun pestisida, yang menjadi kendala adalah pengadaan, baik pupuk maupun pestisida sulit dilakukan. Pupuk dan pestisida harus dibeli di Kota Kalabahi, itu pun jarang ada toko yang menjualnya. Kalaupun ada, harga kedua kebutuhan pertanian itu relatif mahal. Salah satu contoh, harga racun rumput merek "rundup" setiap 1 liter sekitar Rp120.000, padahal racun rumput tersebut tidak cukup untuk membasmi rumput di lahan seluas 1 hektar. Oleh karena petani tidak

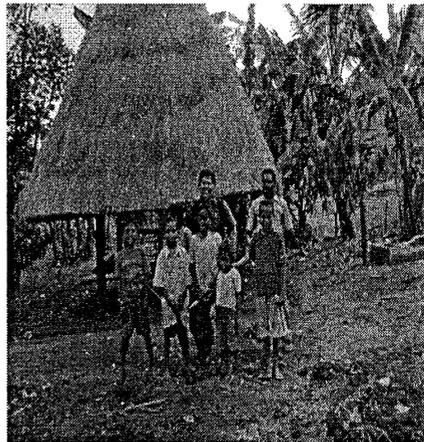
tahu tempat toko menjual kebutuhan pertanian dan harganya yang mahal, hal itu mengakibatkan ketika tanaman sumber pangan mereka diserang hama, petani hanya dapat berdiam diri dan pasrah pada gagal panen yang pasti terjadi.

4.4 Revitalisasi Pangan Lokal

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan perhatian yang tinggi terhadap diversifikasi pangan agar ketergantungan kepada makanan beras lambat laun dapat dikurangi. Mengurangi ketergantungan kepada beras ini menjadi perhatian karena dengan topografi dan iklim di Provinsi NTT tidak mungkin untuk memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan penduduk di NTT. Perhatian itu tidak hanya sekedar slogan, tetapi ditindaklanjuti dalam tingkat implementasi. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah ini sangat beralasan karena Provinsi NTT selalu menjadi berita di media massa terkait dengan seringnya daerah ini mengalami kejadian rawan pangan ataupun gizi buruk. Padahal dalam sejarahnya, NTT jarang menjadi isu nasional terkait dengan kerawanan pangan. Walaupun penduduk di NTT tidak mampu memenuhi kecukupan pangan jenis beras akibat kondisi iklim yang didominasi musim kering, topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, serta wilayah yang terdiri dari pulau-pulau sehingga dari sisi distribusi sangat sulit untuk dilakukan, namun dari sisi ketahanan pangan tidak terlalu bermasalah.

Pangan dengan adanya diversifikasi itu tidak lagi dibatasi hanya beras saja. Oleh karena itu, kerawanan pangan yang sering menjadi berita di surat kabar hanya kerawanan dalam bidang beras saja. Sebab, kalau berbicara tentang pangan secara luas, sebenarnya NTT tidak mengalami kekurangan. Salah satu contoh, jagung sebagai makanan pokok bagi NTT tingkat produksi mencapai 400.000 ton dalam setahun, sementara kebutuhan jagung hanya sekitar 380.000 ton. Artinya, ada surplus sekitar 20.000 ton secara keseluruhan. Hanya saja, surplus itu tidak kelihatan di pasar sebab jagung jarang

diperjualbelikan oleh petani. Jagung diutamakan sebagai kebutuhan konsumsi keluarga saja.



Sumber: Koleksi Peneliti, 2009

Gambar 4.2 Bentuk Lumbung Pangan Petani dan Anak-anak Alor dengan Latar Belakang Lumbung Pangan

Jagung yang disimpan oleh petani di lumbung-lumbung pangan (lihat Gambar 4.2) dimanfaatkan sebagai persiapan kebutuhan pangan selama setahun. Lumbung pangan berbentuk segitiga itu dimaknai juga sebagai adanya pemrioritasan dalam pemanfaatan jagung berdasarkan tingkatannya. Tingkat 1 yang berada di bagian bawah dari bangunan lumbung pangan merupakan bagian yang paling luas, sehingga volume jagung pada tingkat ini pun lebih banyak, dimaksudkan sebagai jagung untuk kebutuhan konsumsi. Tingkat 2 (dua) dengan volume jagung yang lebih sedikit dari volume di bagian bawahnya adalah jagung sebagai antisipasi konsumsi apabila jagung yang berada di tingkat 1 (satu) tidak mencukupi. Adapun manfaat jagung pada tingkat 3 (tiga) atau puncak dengan volume yang lebih sedikit merupakan jagung-jagung pilihan untuk dijadikan sebagai bibit. Oleh karena itu, kontrol terhadap persediaan jagung menjadi

teratur dan juga menjadi penting. Kalau pengonsumsi jagung sudah menyentuh pada tingkatan kedua atau berada pada kondisiantisipasi, itu berarti persediaan jagung diasumsikan tidak lagi mencukupi sampai menunggu panen jagung selanjutnya. Untuk itu, masyarakat petani harus sudah dapat menyiasatinya. Dalam hal ini, petani mempunyai strategi tersendiri untuk memperlakukan jagung tersebut. Kalau di awal-awal panen petani dapat makan jagung setiap harinya, namun memasuki masa tanam dengan persediaan jagung sudah mulai menipis, petani akan mengonsumsi jagung yang dikombinasikan dengan makanan pangan yang lain.

Pemerintah dalam upaya merevitalisasi budaya untuk memakan pangan lokal, melakukannya melalui himbauan-himbauan terhadap seluruh masyarakat NTT. Sejak tahun 2007, Pemerintah Provinsi NTT telah mencanangkan "Gerakan Pemanfaatan Pangan Lokal". Gerakan itu dituangkan dalam bentuk Instruksi Gubernur Frans Leburaya yang isinya adalah menetapkan "Hari Kamis sebagai Hari Wajib Konsumsi Pangan Lokal 3 B (Beragam-Bergizi-Berimbang) Nonberas dan Nonterigu". Tujuan dari gerakan ini adalah agar permintaan akan kebutuhan beras berkurang dan pada saat yang sama permintaan terhadap pangan lokal meningkat. Terhadap jajaran penyelenggara pemerintah di Provinsi NTT, himbauan ini lebih ditegaskan lagi. Berdasarkan Surat Gubernur NTT Nomor BKPP.510.13/02/IV/2009 Perihal Penggunaan Pangan Lokal dalam Pertemuan/Rapat/Pelatihan Tertanggal 1 April 2009 yang ditujukan kepada seluruh Pemimpin Instansi Sipil, TNI dan Polri, Ketua PKK, Walikota dan Bupati, Ketua TP PKK Kota dan Kabupaten, Pemimpin Badan Internasional dan lembaga swadaya masyarakat di Provinsi NTT yang mendorong agar pada acara rapat, pertemuan, dan pelatihan yang diadakan di lingkungan kerja masing-masing, dalam penyajian makanan dan *snack* supaya memanfaatkan pangan lokal. Dengan adanya himbauan ini, maka apabila setiap kunjungan kerja yang dilakukan oleh Gubernur NTT menerima sajian makanan yang tidak memanfaatkan pangan lokal, gubernur tidak akan mencicipinya. Teguran halus dengan sikap yang diperlihatkan oleh gubernur ini

dapat merubah cara pandang para pemimpin di masing-masing instansi dan wilayah terhadap pangan lokal. Dengan demikian, perlakuan terhadap pangan lokal sama dengan pangan lainnya terutama dengan beras.

Himbauan yang sama juga disampaikan kepada pengusaha toko/swalayan, pengelola restoran/rumah makan, kantin sekolah agar mendukung gerakan mencintai produk pangan lokal NTT. Himbauan yang disampaikan oleh gubernur antara lain (1) Selalu menyajikan pangan lokal di setiap acara-acara/rapat/pertemuan resmi maupun tidak resmi dan di tiap rumah tangga, (2) Meningkatkan citra pangan lokal dan olahan pangan yang dihasilkan oleh *home industry* pangan, baik itu kualitas maupun kemasan produknya, (3) Turut serta mempromosikan pangan lokal dan olahan pangan lokal yang dihasilkan oleh *home industry* pangan, (4) Turut serta memfasilitasi pemasaran produk pangan segar maupun olahan yang dihasilkan oleh *home industry* pangan.¹²

Agar himbauan terdengar sampai ke seluruh lapisan masyarakat, mimbar-mimbar keagamaan pun menjadi media pemerintah dalam menyosialisasikan himbauan ini. Tokoh agama masih dianggap sebagai agen pemerintah yang efektif dalam menyampaikan himbauan ini, sehingga implementasi himbauan melalui tokoh-tokoh agama ini akan lebih cepat dilaksanakan. Generasi muda sebagai penerus dari pemanfaatan pangan lokal ini juga menjadi target dari gerakan pemanfaatan pangan lokal. Kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi di tingkat SD, SLTP, dan SLTA dalam rangka menyosialisasikan gerakan pangan lokal ini berupa lomba pengelolaan lahan sekolah dalam bentuk tanaman-tanaman pangan lokal. Selain itu, kegiatan lomba lain dengan sasaran mereka yang duduk di sekolah SLTA dan Perguruan Tinggi adalah lomba pidato terkait dengan pangan lokal.

¹² Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKPP. 510.13/92/IV/2009 Tanggal 27 April 2009 Perihal Gerakan Mencintai Produk Pangan Lokal NTT.

Himbauan yang sama sebenarnya sudah dilakukan ketika Talakapeta menjabat sebagai bupati di Kabupaten Belu. Kalau himbauan Gubernur NTT hanya sekali dalam seminggu, maka himbauan dari Bupati Alor lebih tinggi lagi, yaitu 2 (dua) hari dalam seminggu, namun tidak ditentukan setiap hari apa saja. Ketersediaan untuk mengonsumsi pangan lokal diserahkan pada individu masing-masing. Himbauan ini dengan jelas mengharapkan agar penduduk Alor melaksanakannya minimal 2 (dua) hari dalam seminggu dan lebih bagus lagi kalau bisa lebih. Tujuan akhir dari himbauan ini agar mengonsumsi pangan lokal membudaya di kalangan masyarakat Kabupaten Alor. Sayangnya, himbauan untuk kembali ke pangan lokal ironis dengan implementasi di tingkat lapangan. Salah satu contoh adalah pengadaan pangan untuk PNS, TNI, dan Polri serta bantuan pangan untuk rumah tangga miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Alor. Pemerintah justru memberikan bantuan itu dalam bentuk beras bukan dalam bentuk pangan lokal, seperti jagung.

Kebutuhan beras untuk PNS, TNI, Polri, dan Raskin mencapai 600 ton per bulan. Beras itu didatangkan dari Surabaya dan Mataram. Kebutuhan beras untuk Raskin saja mencapai 400,050 ton, selebihnya adalah untuk kebutuhan PNS, TNI, dan Polri. Banyaknya kebutuhan beras Raskin disebabkan jumlah kelompok rumah tangga sasaran di Kabupaten Alor mencapai 26.670 rumah tangga, di mana setiap rumah tangga menerima 15 kilogram tiap bulan.¹³ Jumlah tersebut sebenarnya masih jauh dari cukup. Kalau rata-rata anggota keluarga dari RTS itu 5 orang dengan kebutuhan beras 0,3 kg perhari, maka dibutuhkan paling sedikit 45 kg beras dalam sebulan.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Kepala Gudang Seksi Logistik Kabupaten Alor (Dolog Kabupaten Alor di Kalabahi).

¹⁴ Harga beras untuk RTS adalah Rp1.600/kg, sedangkan untuk PNS, TNI, dan Polri harganya adalah Rp5.200/kg sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Pengadaan beras untuk PNS, TNI, Polri sebelumnya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Mutiara Harapan dan mulai April 2009 pengadaannya dikembalikan ke Dolog. Sebelum itu, tunjangan

Mengingat tidak semua penduduk miskin sebagai penerima Raskin, maka RTS yang terdaftar sebagai penerima Raskin menerima lebih sedikit lagi. Ada kebijakan-kebijakan lokal di tingkat desa yang dilaksanakan atas kesepakatan bersama agar koehsi sosial terus terpelihara. Kebijakan yang dimaksud adalah jatah Raskin untuk RTS di desa tertentu dibagi oleh seluruh masyarakat desa yang tergolong miskin itu. Kebijakan yang diambil ini tidak menimbulkan gejolak karena RTS membayar sesuai dengan jumlah beras yang diterima. Kebijakan seperti itu juga diberlakukan bagi penerima BLT. Kalau anggota masyarakat sudah menjadi penerima program keluarga harapan (PKH) yang jumlahnya sama dengan BLT, maka penerima BLT menjadi hak orang lain yang belum mendapat bantuan PKH walaupun namanya terdaftar sebagai penerima BLT. Kebijakan lokal ini ternyata dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat karena mereka memandang satu sama lainnya masih dalam satu kekerabatan.¹⁵

Revitalisasi pada tingkat implementasi adalah membantu petani menyediakan bibit jagung kelas hibrida. Keunggulan jagung hibrida ini adalah produktivitas jauh lebih tinggi, sehingga dapat mencapai 6 ton per hektar karena dalam satu pohon jagung dapat menghasilkan sampai tiga bulir jagung, padahal dengan jagung lokal satu pohon jagung hanya menghasilkan satu bulir jagung. Namun, ketika produksi ditingkatkan, ternyata persoalan baru pun ikut muncul. Kelemahan jagung hibrida ini adalah cepat rusak, sehingga tidak dapat disimpan dalam waktu yang begitu lama, misalnya

beras untuk aparaturn pemerintah ini pernah dibayarkan dalam bentuk uang, tetapi para istri aparaturn pemerintah ini mengeluh karena uang yang diterima oleh suaminya tidak digunakan untuk membeli beras atau uang tersebut tidak diserahkan ke istrinya. Hal itu berakibat uang beras sudah diterima tetapi beras tidak ada di rumah. Dengan adanya keluhan seperti itu, maka pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk mngembalikan tunjangan beras dalam bentuk natura (beras).

¹⁵ Wawancara dengan IK (46 th) di Desa Pintumas, Kecamatan ABAD, Kabupaten Alor.

dijadikan sebagai persediaan untuk kebutuhan pangan selama setahun. Upaya untuk memasarkan jagung hibrida ini juga terbatas akibat sempitnya ruang pemasaran. Kalaupun ada pasar, harga jual begitu rendah menurut petani. Petani bersedia untuk melepaskan jagung kalau harga per kilogramnya sekitar Rp3.000, namun pasar hanya bersedia membelinya sekitar Rp1.500. Tidak melepaskan jagung pada harga pasar yang tersedia itu karena menurut petani harga tersebut terlalu rendah sementara harga beli bibit jagung hibrida saja sudah Rp30.000 per kilogram. Padahal, menurut hitung-hitungan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Alor, dengan harga jual jagung yang Rp1.500 saja sebenarnya petani sudah menerima keuntungan lumayan.

Pemerintah Kabupaten Alor juga membuka sekolah lapang (SL) di kalangan petani. Sekolah ini adalah model pemberdayaan di kalangan petani agar proses pertanian dilakukan secara modern sehingga hasil yang diperoleh dapat ditingkatkan. SL ini bertanggung jawab sejak pengelolaan sampai pascapanen. Proyek percontohan yang pernah dilakukan mengambil lokasi di lahan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor seluas 0,7 ha, dengan hasil yang diperoleh sekitar 9 ton. Oleh karena pemerintah kabupaten menganggap hasil uji coba ini menggembirakan, maka sejak tahun 2005/2006, SL pun diadopsi sebagai program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat petani dengan maksud agar mereka yang menjadi anggota SL dapat menerapkan ilmu pertanian yang diperolehnya di lahan pertanian masing-masing. Sasaran dari SL ini adalah petani lahan kering mengingat para petani di Alor memang merupakan petani ladang berpindah, terutama untuk meningkatkan produksi jagung sebagai pangan lokal utama bagi penduduk di Kabupaten Alor. Luas lahan yang dikelola oleh kelompok yang terlibat dalam SL ini mencapai 1 ha dengan lokasi yang berpecah. Masing-masing kelompok tani mengelola lahan SL yang berbeda. Hal itu untuk memudahkan pengaturan dari hasil yang diperoleh. Apabila lahan SL dikelola oleh kelompok tani A, maka hasil yang diperoleh dari usaha tani kelompok tersebut masuk ke kas kelompok tani A. Bibit jagung yang digunakan

adalah hibrida M35. Jarak tanam antarjagung itu adalah 20cm x 70cm dan hasil yang diperoleh pada setiap pohon adalah 3--4 bulir jagung. Tingkat produksi jagung kering dari lahan yang dikelola oleh kelompok SL ini dapat mencapai 5 ton per hektar. Kualitas sekolah lapang yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor ini sudah diakui di antara sekolah-sekolah lapang yang ada, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Salah satu kelompok sekolah lapang dari Desa Penatin, Kecamatan Teluk Mutiara pada tahun 2008, yaitu Kelompok Tani Asa Buana menjadi juara satu lomba sekolah lapang, baik di tingkat Provinsi NTT maupun di tingkat nasional yang diadakan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Tindak lanjut dari SL ini adalah membentuk kelompok-kelompok tani mandiri. Hingga tahun 2008, jumlah kelompok tani yang sudah terbentuk sekitar 30 kelompok dengan luas lahan yang dikelola oleh masing-masing kelompok lebih kurang 15 hektar, sehingga total lahan yang dikelola oleh seluruh kelompok mencapai 400 hektar. Hanya saja, jarak tanam masing-masing jagung di antara kelompok ada yang berbeda dari yang dianjurkan di SL sebab di antara anggota kelompok ada yang menanam jagung dengan jarak 40 cm x 70 cm sesuai dengan pengalaman yang pernah dilihatnya di tempat-tempat lain. Sasaran dari pembentukan kelompok tani ini adalah petani-petani pemilik lahan. Namun dalam implementasinya, rekrutmen anggota kelompok kurang selektif sebab anggota kelompok tidak semuanya pemilik lahan karena ada anggota kelompok yang hanya sebagai penggarap saja. Ketidakjujuran di antara anggota kelompok terjadi karena keanggotaan kelompok memperoleh bantuan dana sekitar 8 juta rupiah guna membangun kemandirian kelompok. Dana kemandirian kelompok ini dikelola oleh masing-masing kelompok dan dikirim langsung ke kelompok setelah mereka memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Pertanian, seperti menyusun rencana peruntukan dana yang akan diterima tersebut. Selain itu, ada juga anggota kelompok yang menjadi anggota kelompok lain yang dapat berakibat penumpukan bantuan pada orang-orang tertentu saja, sementara tidak sedikit orang yang tidak

menjadi anggota di salah satu kelompok manapun, sehingga bantuan yang diterima pun nihil.

Kelompok-kelompok tani yang ada itu sudah berhasil meningkatkan produksi jagung hibrida, namun yang menjadi persoalan adalah pemasaran. Kelemahan dari jagung hibrida ini tidak dapat bertahan lama karena cepat rusak, sehingga tidak mungkin diperuntukkan sebagai bahan pangan untuk jangka panjang. Selain itu, jagung hibrida dari hasil pertanian petani itu sendiri tidak dapat dijadikan sebagai bibit seperti yang terjadi pada jagung bibit lokal. Penyebabnya adalah bibit jagung hibrida yang disisihkan dari hasil panen tidak tahan lama. Petani belum tahu cara pengawetan agar bibit tersebut dapat bertahan lama. Oleh karena bibit hibrida berbeda dengan jagung lokal yang dapat bertahan sampai dua tahun, sedangkan jagung hibrida hanya bertahan selama 3 bulan, sehingga untuk tiba masa tanam berikutnya dengan jeda waktu sekitar 8 bulan, bibit jagung hibrida itu sudah rusak. Kondisi itu mengakibatkan bibit jagung hibrida untuk masa tanam selanjutnya harus dibeli. Pemerintah kabupaten mencoba mengatasi persoalan pengadaan bibit jagung hibrida ini dengan merangkul PT Pertani. Kalau harga bibit hibrida mencapai Rp30.000 per kilogram di pasaran, PT Pertani sanggup memberikan harga di bawah harga pasar itu, yaitu Rp27.000 per kilogram. Kelebihan dari harga pasar sekitar Rp3.000 per kilogram masuk ke kas kelompok sebagai biaya angkut.

Suksesnya pemberdayaan petani sangat tergantung pada kehadiran tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL). Namun, untuk wilayah Kabupaten Alor, jumlah tenaga PPL ini masih sangat kekurangan sebab tidak semua desa di Kabupaten Alor memiliki tenaga PPL. Jumlah tenaga PPL di Kabupaten Alor adalah 121 orang, sebanyak 65 orang di antaranya tenaga kontrak, sementara jumlah desa sebanyak 174 desa. Timpangnya tenaga penyuluh di tingkat kabupaten dengan membandingkan jumlah penyuluh terhadap seluruh desa lebih terasa lagi bila ditelusuri di tingkat kecamatan sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Alor Barat Daya. Jumlah tenaga PPL di kecamatan dengan 19 desa dan 1 kelurahan ini hanya dilayani oleh 5

(lima) orang penyuluh dengan rincian 2 (dua) orang tenaga penyuluh untuk lahan basah dan 3 (tiga) orang tenaga penyuluh lahan kering. Walaupun komposisi dari pembagian jumlah penyuluh antara lahan kering dan lahan basah hampir berimbang, tetapi komposisi ini pun dikategorikan kurang seimbang mengingat lahan kering di kecamatan ini justru lebih luas dibandingkan dengan lahan basah. Menurut Laporan Camat Alor Barat Daya, 3 Maret 2009, pertanian lahan basah (sawah) hanya berada di Desa Pailalang dengan luas lahan \pm 10 hektar, sementara pertanian lahan kering tersebar di 20 desa/kelurahan (Sekcam Abad, 2009: 1). Artinya, kebutuhan tenaga penyuluh belum sesuai dengan kondisi riil suatu wilayah. Padahal, idealnya setiap desa memiliki seorang tenaga PPL agar tugas yang diembannya dalam memberdayakan masyarakat petani lebih terfokus.

Selain jumlah tenaga PPL yang masih kurang, tidak seluruhnya tenaga PPL terpanggil sebagai tenaga PPL. Kondisi yang demikian tidak saja hanya di Kabupaten Alor, tetapi menyeluruh di Provinsi NTT. Nikolaus menyebutkan bahwa sebagian besar tenaga penyuluh di NTT tidak memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan. Penyuluh pertanian yang profesional adalah penyuluh yang mampu dan berhasil mengajak, mendorong, dan mengajar petani untuk menerima dan menerapkan teknologi yang dianjurkan kepadanya (Nikolaus, 2009: 125). Oleh karena itu, pendampingan dari tenaga PPL harus terus-menerus agar bantuan maupun program yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Dengan demikian, kasus seperti yang dialami oleh petani di Desa Pintumas tidak terulang. Suatu waktu, petani Pintumas mendapat bantuan pupuk urea dari pemerintah. Namun, petani penerima pupuk urea itu tidak dilatih bagaimana cara memupuk tanamannya karena begitu bantuan diberikan, pemberi bantuan langsung meninggalkan Desa Pintumas. Petani Pintumas tidak terbiasa menggunakan pupuk dalam bercocok tanam, sehingga mendengar ada pupuk mereka berasumsi bagaimana pun cara menggunakannya pasti membuat tanamannya menjadi subur. Ternyata, begitu pupuk ditabur pada tanaman jagung dan padi ladangnya, beberapa hari kemudian jagung yang ditanam justru mati.

Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan, hal tersebut mengakibatkan petani kecewa dan juga merugi. Akibatnya pupuk urea yang masih tersisa dibuang ke sungai. Itu berarti, tujuan pemberi bantuan tidak tercapai di satu sisi dan petani pun tidak terbantu di sisi lain.

Diharapkan bahwa tenaga PPL itu tidak hanya sekadar memberikan pelatihan, tetapi yang lebih penting dari itu PPL mengimplementasikan ilmu yang disosialisasikan itu di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, tenaga PPL akan lebih baik bermukim di tengah-tengah masyarakat yang ada di desa tempatnya mengabdikan. Apabila ia berhasil mengimplementasikan ilmu pertanian yang disosialisasikan itu di tempat tinggalnya, itu menjadi media sosialisasi yang lebih ampuh. Petani tidak mudah diajak untuk mengikuti instruksi-intruksi yang disampaikan oleh tenaga PPL dengan cara verbal saja. Pengakuan koordinator tenaga PPL Kecamatan Alor Barat Daya menyebutkan bahwa petani yang berada di wilayah kerjanya seperti si Tomas¹⁶ sebagaimana yang ada di Alkitab, adalah orang yang tidak percaya sebelum melihat dengan mata kepala sendiri.

Kendati petani membutuhkan implementasi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga PPL sebelumnya, hal yang menggembirakan dari petani adalah tingkat partisipasi petani yang masih tinggi terhadap program-program yang sudah direncanakan. Kehadiran tenaga penyuluh sangat diharapkan. Setiap ada permasalahan di bidang pertanian, anggota kelompok menyampaikan permasalahannya kepada tenaga penyuluh dengan harapan tenaga penyuluh memberikan jawaban atau solusi dari masalah yang dihadapi.

¹⁶ Penilaian yang disampaikan oleh tenaga PPL yang berada di Kecamatan Abad ini sama dengan penilaian Nikolaus (2009: 125) yang menyebutkan bahwa petani di NTT pada umumnya adalah petani Tomas, yaitu petani yang berperilaku seperti Rasul Tomas, yakni setelah melihat baru percaya atau *seeing is believing*.

Kontradiksi dengan partisipasi atau sifat gotong royong yang ada di antara masing-masing anggota masyarakat terjadi pada program-program pemerintah yang digerakkan oleh kepala desa. Program-program yang membutuhkan partisipasi masyarakat kurang berjalan dengan baik. Hilangnya sifat gotong royong terhadap program-program pemerintah merupakan dampak dari bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Penyebabnya adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak merata, di satu sisi ada masyarakat yang mendapat bantuan, di sisi lain ada kelompok masyarakat yang tidak mendapatkannya. Realitas bahwa tidak semua masyarakat yang bermukim di satu desa sebagai penerima bantuan mengakibatkan di antara mereka timbul kecemburuan, terutama dari kelompok masyarakat yang tidak menerima bantuan. Hal itu berakibat himbauan kepala desa kepada masyarakat yang dipimpinnya untuk ikut berpartisipasi pada program-program pemerintah yang dilakukan sering dijawab dengan sinis. Kelompok masyarakat yang tidak menerima bantuan mengemukakan agar program pemerintah yang menjadi program desa itu dikerjakan oleh kelompok masyarakat penerima bantuan saja. Dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat seperti itu, teridentifikasi bahwa kohesi sosial untuk melakukan kegiatan bersama demi kepentingan bersama sudah mulai longgar oleh hadirnya bantuan-bantuan pemerintah yang tidak merata ataupun tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat desa.

Hal yang sama juga dialami para aktivis pemberdayaan masyarakat di NTT. Penduduk sangat paternalistis atau bergantung kepada bantuan. Partisipasi masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sangat rendah. Salah satu kasus terjadi di TTS tempat pemberdayaan dilakukan. Ketika penduduk desa diundang partisipasinya untuk menghadiri penyuluhan tentang kesehatan, mereka yang diundang meminta uang kehadiran. Padahal, tujuan dari

penyuluhan itu adalah untuk membantu mereka agar hidup sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.¹⁷

Dampak dari bantuan yang diberikan kepada penduduk desa dalam rangka pemberdayaan mengakibatkan sifat paternalistik terhadap pemerintah ataupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh lembaga lain. Menurut Bunch (1991), pemberian bantuan itu menyebabkan beberapa hal:

- (1) Membuat penerima bantuan menjadi buta terhadap kebutuhan untuk memecahkan masalah sendiri karena ia tidak bekerja untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, tetapi berpartisipasi sekadar untuk mendapatkan hadiah atau bantuan yang dimaksud,
- (2) Merusak program, karena partisipasi masyarakat dalam program tersebut adalah semu, sehingga ketika bantuan sudah tidak ada atau program tanpa disertai pemberian bantuan, akibatnya program tidak jalan,
- (3) Menyembunyikan ketidakpedulian orang terhadap usaha-usaha program karena kesetiaan yang ditunjukkan oleh penduduk desa untuk menghadiri kegiatan penyuluhan selama bertahun-tahun tidak disertai dengan pengadopsian satu pun dari inovasi yang diajarkan,
- (4) Tidak tersebarluaskannya inovasi itu kepada orang lain karena kalau adopsi inovasi petani bergantung pada pemberian hadiah, atau kalau orang diyakinkan bahwa demikian semestinya maka para penerima inovasi setempat tidak akan mengajarkan atau meneruskannya kepada para tetangga (Bunch, 1991: 25).

4.5 Penutup

Produktivitas komoditas pangan secara umum tidak mengalami kekurangan di Kabupaten Alor. Ketercukupan pangan itu

¹⁷ Hasil diskusi dengan WY dan AS, aktivis dari sebuah LSM yang wilayah kerjanya berada di NTT, Sulawesi Tengah, dan Papua.

yang dimaksud di sini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu meliputi seluruh sumber-sumber pangan yang ada pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, berbicara kebutuhan pangan tidak hanya berbicara pangan beras saja, juga pangan nonberas yang merupakan pangan lokal masyarakat Alor, seperti jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan juga pisang. Kalau ketercukupan pangan itu adalah beras, maka hal ini mungkin saja terjadi. Sebab, penduduk di Alor sudah mengalami pergeseran pola makan dari dominan pangan lokal menjadi dominan beras, padahal tingkat produksi beras di Alor relatif sedikit sebab lahan pertanian yang ada hanya pada lahan kering, itu pun ladang berpindah. Sementara lahan basah (sawah) jumlahnya tidak terlalu banyak.

Penduduk terkadang memang berada dalam kondisi kekurangan pangan, tetapi itu untuk jagung dan beras saja karena gagal panen akibat terjadi bencana alam dan serangan hama. Namun, penduduk masih mempunyai cadangan makanan dari sumber lain dari umbi-umbian, kacang-kacangan, dan pisang. Jadi, pada dasarnya penduduk belum pernah mengalami kekurangan pangan, apalagi penduduk dalam jumlah besar. Kekurangan pangan hanya terjadi pada beberapa keluarga saja.

Penduduk di Alor sudah melakukan strategi untuk mencukupi kebutuhan pangan sejak dulu. Untuk setiap hasil panen yang diperoleh, mereka tidak menjualnya tetapi menyimpannya di lumbung-lumbung pangan untuk kebutuhan konsumsi dalam setahun. Oleh karena itu, hampir setiap rumah tangga petani memiliki lumbung-lumbung pangan dengan tingkatan bagian bawah untuk konsumsi, tingkatan tengah antisipasi apabila kebutuhan pangan sudah menipis sehingga konsumsi pangan harus dikombinasikan dengan pangan lain, sedangkan tingkatan ketiga diperuntukkan untuk kebutuhan bibit. Karena sudah terbiasa dengan pangan lokal, zaman dulu tidak pernah kedengaran penduduk kekurangan makanan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penduduk yang sudah mendapat berbagai bantuan justru sering mengalami kekurangan pangan. Itu terjadi karena bantuan tersebut telah mengubah pola

pertanian penduduk, di mana yang tadinya mereka harus berusaha sendiri untuk memperoleh pangan, saat ini hanya dengan uang sedikit, saja penduduk sudah dapat membeli beras. Selain itu, penduduk menjadi manja, sehingga sedikit bencana saja sudah dikategorikan gagal panen. Maksudnya agar pemerintah mengucurkan bantuan pangan ke daerah yang dimaksud.

Mengingat bantuan-bantuan yang diberikan itu menghambat kreativitas masyarakat untuk berkembang, membuat orang malas, dan mengakibatkan bergesernya pola makan dari nonberas menjadi beras, sehingga tingkat ketergantungan kepada daerah lain menjadi begitu tinggi. Tanah Alor yang berbukit-bukit itu tidak cocok sebagai tempat memproduksi padi lahan basah yang hasilnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lahan kering, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya pada program-program pemerintah yang dapat berdampak semakin longgarnya kohesi sosial sebagai dampak tidak meratanya penerima bantuan. Maka, sudah seharusnya bantuan-bantuan tersebut ditinjau sesuai dengan kebutuhan, ataupun pemberian bantuan diharapkan tidak menimbulkan masalah-masalah baru yang disebutkan sebelumnya.

Pemerintah sudah mencoba untuk merevitalisasi pangan lokal ini dengan berbagai himbauan, termasuk gerakan pangan lokal. Hanya saja, di tingkat implementasi dengan volume yang besar tidak dilakukan. Sebab, pengadaan pangan untuk PNS, TNI, Polri, dan Raskin yang dilakukan oleh Dolog sebagai bentuk kerja sama Pemerintah Kabupaten Alor dengan Bulog tidak terjadi. Justru mengubah pola makan penduduk didorong oleh pemerintah dengan pengadaan pangan beras melalui Dolog ini. Seharusnya, Dolog juga berperan dalam merevitalisasi keberadaan pangan lokal ini, tidak hanya semata-mata beras.

Daftar Pustaka

- BPS. 2008. *Kabupaten Alor Dalam Angka 2008*. Kalabahi: BPS Kab. Alor.
- DoE, Adang. 2008. "Community Based on Sustainable Agriculture". (<http://www.omtel.blogspot.com/>, diakses tanggal 21 Juli 2009).
- DoE, Adang. 2008. "Food in Security". (<http://www.omtel.blogspot.com/>, diakses tanggal 21 Juli 2009).
- Bunch, Roland. 1991. *Dua Tongkol Jagung: Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal pada Rakyat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lassa, Jonatan. 2009a. "Diskursus Kelaparan dan Ketahanan Pangan Indonesia 1958--2008: Studi Kasus Nusa Tenggara Timur". Dalam J. Lassa, D.D.B. Putra, T. Kleden (Ed.), *50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur*. Hlm. 1--16. Kupang: PT Timor Media Grafika.
- Lassa, Jonatan. 2009b. "Memahami Kebijakan Pangan dan Nutrisi Indonesia: Studi Kasus Nusa Tenggara Timur 1958-2008". *Journal of NTT Studies* I(1): 28--45.
- Musakabe, Herman. 2009. "Dewan Riset Daerah vs Kemiskinan". Dalam J. Lassa, D.D.B. Putra, T. Kleden, *50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur*. Hlm. 78--85. Kupang: PT Timor Media Grafika.
- Nikolaus, Serman. 2009. "Perlu Pendidikan Penyuluhan Pertanian". Dalam J. Lassa, D.D.B. Putra, T. Kleden, *50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur*. Hlm. 123--127. Kupang: PT Timor Media Grafika.
- Sekcam ABAD. 2009. Laporan Camat Alor Barat Daya (ABAD) tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Alor Barat Daya Tahun 2004 s/d Pebruari 2009, disampaikan

dalam Rapat Koordinasi Pamong Praja Tingkat Kabupaten Alor di Kalabhi, tanggal 3 Maret 2009. Moru: Sekretariat Kecamatan Abad.

Widiyamitra, Munandjar. 2008. *Kebudayaan Masyarakat di Bumi Cendana*. Kupang: Pusat Pengembangan Madrasah.

Leaflet:

BPS Provinsi NTT. 2009. *Potensi Padi Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

BAB V

KEBIJAKAN PANGAN, KETAHANAN PANGAN, DAN STRATEGI LOKAL DI KABUPATEN ALOR

Oleh: John Haba

5.1 Pendahuluan

Sebagai negeri agraris, Indonesia seyogianya menikmati kelimpahan pangan yang dapat menyejahterakan masyarakatnya. Idealisme seperti ini sulit terwujud sebab adanya berbagai kendala kebijakan, geografis, struktural, dan kultural yang terus dihadapi negeri ini. Indonesia selaku negeri multikultural dan multietnis, memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai mekanisme pertahanan diri di tengah prahara sosial, ekonomi, dan politik. Varian-varian budaya dan etnik ini sejatinya dapat didayagunakan juga dalam mendukung upaya kecukupan pangan yang meupakan sebuah isu krusial yang telah dinegasikan sejak masa pemerintahan Orde Baru.

Kondisi kekinian Indonesia masih berkorelasi dengan kebijakan-kebijakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat sejak periode pemerintahan Soeharto. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama periode pemerintahan Orde Baru, berbagai prestasi telah diraih dan salah satunya adalah di sektor pertanian, tatkala pada tahun 1994/1995, di mana Indonesia berhasil menjadi negara pengekspor beras. Capaian di sektor pertanian ini kemudian menurun dan kembali bangkit hingga Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2008.

Isu ketahanan pangan terkait dengan berbagai aspek, mulai dari aspek kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan kabupaten. Setiap provinsi dan kabupaten menjabarkan kebijakan di

sektor pangan dengan merujuk pada kebijakan nasional. Pada ranah ini, kecermatan dan prioritas daerah harus diperhitungkan agar setiap kebijakan yang diterapkan teristimewa di sektor pertanian dapat mendorong dan memperbaiki produktivitas daerah (seperti Kabupaten Alor). Selain faktor kebijakan, faktor sumber daya manusia, dana, dan geografi pun menjadi hambatan tersendiri. Kondisi geografis Kabupaten Alor yang kurang subur dengan tingkat curah hujan rendah ikut berdampak pada tingkat produktivitas penduduk di sektor pertanian. Selain itu, sumber daya manusia yang masih dalam tahap pengembangan akibat seiring dengan terbatasnya dana untuk secara serempak memajukan sektor pertanian dan sektor-sektor terkait masih dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu kendala penting dalam isu ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Alor, ialah pola makan masyarakat yang sudah bergeser meninggalkan makanan lokal, seperti jagung, umbi-umbian dan kenari, dan lebih memprioritaskan beras. Pergeseran substansial sejak kebijakan “berasnisasi” secara nasional ini berdampak pada perhatian serius untuk mempertahankan potensi lokal di sektor pangan di Kabupaten Alor. Oleh karena beras menjadi ukuran nasional untuk kecukupan pangan, maka setiap kali terjadi kekurangan/kerawanan pangan, maka bantuan utama selalu beras. Kebijakan serupa ini sudah saatnya secara nasional/per wilayah direorientasikan dan dipadukan dengan potensi pangan.

5.2 Konsep Ketahanan Pangan

Selain konsep “ketahanan pangan” (*food security*), terdapat juga istilah “*Community Food Security*”/CFS¹ yang memiliki berbagai ukuran dari setiap lembaga (internasioal, nasional, dan

¹ Berkaitan dengan konsep ketahanan pangan (*food security*), terdapat juga konsep tentang “*Community Food Security*” (CFS). CFS didefinisikan sebagai: “*A Situation in which all community residents obtain a safe, culturally acceptable, nutritionally adequate diet through a sustainable food system that maximized self reliance and social justice*” (Molly-Cook, 1999).

lokal). Berhubungan dengan pengertian/pemahaman tentang ketahanan pangan (KP), sedikitnya terdapat 200 konsep, disertai dengan 450 indikator mengenai KP. Pemikiran tentang KP yang lebih terfokus pada “kecukupan pangan” bagi masyarakat dirasakan tidak cukup dan tidak sanggup memenuhi semua persyaratan menuju pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) dari “*supply and availability*” menuju ke aksesibilitas dan hak (*entitlements*).

Pangan di samping sandang adalah kebutuhan dasar manusia. Pangan didefinisikan sebagai “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman” (Sekretariat Terpadu Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Aliansi LSM Nasional, 2009: 4).

Menjadi menarik dalam soal konsep yang dikenal selama ini tentang pangan karena terdapat dua pemikiran utama, yakni “Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan” (<http://formala.multiply.com/journal/item/6>). Dalam konsep kedaulatan pangan, yang lebih diutamakan adalah bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas atau oleh warga masyarakat secara mandiri, bebas, dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan merupakan hak setiap orang, kelompok, dan negara untuk menentukan sendiri kebijakan pertanian, perikanan, tenaga kerja, tanah dan pangan, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, budaya, sosial, ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*) ini dideklarasikan oleh 400 delegasi organisasi petani, masyarakat adat, LSM, akademisi, peneliti, dan aktivis sosial dari 60 negara di Havana (Kuba) dalam “Pertemuan Dunia Tentang

Kedaulatan Pangan (*World Forum on Food Sovereignty*), tanggal 3--7 September 2001.²

FAO mempergunakan empat aspek untuk mengukur ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas/keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan (Aswatini-Romdiati, dkk, 2004: 35). Pemahaman mengenai ketahanan pangan yang telah ditungkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 1996, sampai dengan tahun 2002 belum mengalami perubahan konsep dan definisi³ mengenai ketahanan pangan.⁴ Menurut Aswatini-Romdiati, dkk (2004:28), “Ketahanan pangan yang hanya berfokus pada ketersediaan beras merupakan pengertian yang sempit karena tidak memasukkan kebutuhan-kebutuhan bahan makanan lain yang paling esensial, seperti lauk-pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu yang diperlukan sebagai sumber protein, lemak, energi, dan bahan gizi lainnya, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seimbang”.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana terpenuhinya kecukupan pangan untuk setiap rumah tangga, dalam jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau (UU RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁵

² Hasil Deklarasi Havana 2001 ini kemudian dituntaskan pada “Pertemuan Puncak Pangan Dunia” (*World Food Summit*) di Roma dari tanggal 8--13 Juni 2002 yang dihadiri oleh 700 organisasi masyarakat sipil dunia.

³ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002.

⁴ Masih menjadi masalah di Indonesia dalam memasukkan unsur-unsur pangan di Indonesia; di mana komponen beras lebih dikedepankan, dan komponen lain seperti jagung dan umbi-umbian belum diperhitungkan sebagai unsur penting ketahanan nasional (wawancara dengan Pdt. Dina Takalapeta).

⁵ Pada tahun 1948 dalam “Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia” digaribawahi bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pangan yang cukup. Penegasa serupa diulangi lagi dalam “Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1972). Perhatian utama kepada isu ketahanan pangan telah mendorong ditetapkannya berbagai konvensi/deklarasi tentang isu ini.

mengartikan KP sebagai semua kondisi di mana setiap individu memiliki akses untuk mendapatkan gizi yang standar dalam jumlah dan kualitas yang baik, sehingga kehidupan yang sehat (layak) dan berkelanjutan dapat terwujud sesuai dengan budaya masyarakat lokal/setempat. Pemerintah Indonesia memilih konsep ketahanan pangan dari pada konsep kedaulatan pangan. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 Tentang “Pembentukan Badan Ketahanan Pangan” di bawah Departemen Pertanian hingga ke tingkat kabupaten merupakan bukti atas pemilihan konsep “Ketahanan Pangan dan Bukan Kedaulatan Pangan”. Konsep dasar ketahanan pangan diterjemahkan dalam “Program Aksi Desa Mandiri Pangan” (PADMP) yang diperkenalkan tahun 2005.

Tujuan pokok dari Program Aksi Desa Mandiri Pangan adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang dipadukan dengan faktor sarana dan prasarana, ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan rumah tangga. Untuk menyukseskan PADMP, maka fokus dari program ini pada daerah perdesaan yang memiliki potensi pengembangan sektor pertanian adalah tersedianya bahan pangan bagi masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan, tersedianya bahan baku untuk industri dan menjadi penyuplai komoditas kebutuhan masyarakat dan ekspor. Tujuan akhir dari PADMP⁶ ialah meningkatkan kemandirian masyarakat, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, mengembangkan sistem ketahanan pangan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat (Sekretariat

⁶ Sasaran penerima program ini diprioritaskan bagi rumah tangga miskin, terutama di desa-desa rawan pangan. Dalam jangka panjang diharapkan agar ada keberhasilan dari program ini. Beberapa indikator yang dipergunakan adalah berkembangnya usaha ekonomi produktif, berfungsinya kelembagaan pelayanan masyarakat desa, tersedianya pangan yang cukup dan distribusi pangan yang memadai, konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang dan aman, peningkatan pendapatan dan masyarakat miskin dari usaha *on farm*, *off farm*, dan *non-farm*.

Terpadu Badan Ketahanan Pangan dan Aliansi LSM Nasional, 2009: 3).

PADMP yang memiliki misi meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin dan rawan pangan menjadi tercela karena identifikasi desa-desa rawan pangan dipolitisir oleh daerah. Desa atau daerah yang sesungguhnya sanggup memenuhi kebutuhan pangan, karena tujuan untuk memperoleh bantuan kemudian diklasifikasikan sebagai desa miskin dan rawan pangan. “Kita akan melihat betapa anehnya ketika kabupaten yang selama ini tidak pernah kelaparan, bahkan cenderung dianggap sebagai kabupaten yang kaya, masuk dalam daftar yang akan disasar oleh program ini” (<http://formala.multiply.com/journal/item/6:3>).

Dalam konsep “*Community Food Security*” (CFS), terdapat beberapa isu menarik dan sangat jarang luput dari unit analisis penentu kebijakan ketika mereka mewacanakan tentang KP. Unsur-unsur penting dari CFS antara lain isu kebudayaan (*culturally acceptable*) dan kemandirian (*self-reliance*). Dalam konsep kebudayaan, pola makan (*food habits*) bertalian dengan tingkat pengenalan anggota masyarakat terhadap jenis makanan dan bahan makanan yang berada di wilayah kebudayaan mereka. Sikap terhadap jenis makanan dan tanaman menyatu dengan pengetahuan lokal dan perlakuan terhadap jenis tanaman bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan terhadap jenis tanaman, semakin termotivasi warga untuk memelihara dan melindungi tanaman itu karena merupakan bagian dari subsistensi masyarakat.

Tingkat kemandirian telah menjadi *benchmark* dari konsep pembangunan di mana setiap proses dan program idealnya tidak menciptakan ketergantungan baru pada agen pembangunan, pemerintah, atau lembaga donor, tetapi justru membawa kemandirian, sehingga terbangunlah kesetaraan (*equality*) antara pemberi dan penerima bantuan. Di sektor ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Alor, kebijakan pembangunan sektor pertanian yang terkait langsung dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan,

cenderung membangun mentalitas bergantung para petani terhadap pemerintah.

Kemandirian yang diprasyarkan dalam CFS menjadi “antitesis” terhadap berbagai bentuk kebijakan yang bertujuan membangun kesetaraan atau kemitraan. Fenomena yang ada hanya menggambarkan ketergantungan berkelanjutan, dan bukan kemitraan dalam proses, pengambilan keputusan dan tanggung jawab antara para petani, pemerintah, dan lembaga swasta lainnya. Kepincangan relasional ini menjadi salah satu kendala bagi petani untuk mendapatkan akses lebih besar agar dapat ‘mandiri’ di sektor pertanian.

Dalam hubungannya dengan KP, apabila KP diterjemahkan dalam bentuk kuantitatif atau terukur, maka KP dihitung dengan memperhatikan “Angka Kecukupan Pangan” (AKP). AKP diartikan sebagai jumlah penduduk sesuai dengan jenis kelamin dan kelompok umur mereka. Kemudian dapat diprediksi tingkat kebutuhan pangan dan gizi di suatu wilayah. Pada sisi lain, “ketersediaan pangan” dihitung dari jumlah produksi komoditas bahan pangan yang dikategorikan dalam sembilan kelompok bahan kebutuhan pangan (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2007).

Mempersoalkan tentang isu pangan, pemerintah (pusat dan daerah) selama ini telah terjebak dalam pemikiran beras semata,⁷ seperti yang terjadi di Provinsi NTT, kalau provinsi ini dapat diambil sebagai sampel kerawanan pangan. Menurut Saefuddin, “Ini artinya, pemerintah masih terikat dengan pola pemikiran prareformasi, di

⁷ Masalah pangan bagaikan lingkaran tidak berujung kendatipun Indonesia mengklaim dirinya sebagai negeri agraris. Kegagalan pangan setiap tahun sulit diatasi dan pemerintah takut dicap gagal dalam kebijakan pangan, dan memprioritaskan pengembangan pangan lokal sesuai dengan karakteristik wilayah secara masif dan berkelanjutan. Tanpa kebijakan nasional tentang diversifikasi pangan, maka pemerintah pusat akan menyediakan beras untuk daerah-daerah yang sesungguhnya memiliki potensi pangan nonberas.

mana “*food security*” (keamanan pangan) menjadi basis ketahanan pangan rezim Orde Baru. *Food security* dengan segala perangkatnya –di antaranya lembaga Bulog dan Dolog– yang menghasilkan kebijakan blunder “berasnisasi’ di seluruh Indonesia ternyata telah menciptakan persoalan mendasar terhadap ketahanan pangan” (*Koran Sindo*, 27 Desember 2006). Sebuah kemungkinan di antara berbagai kemungkinan yang sudah dilakukan oleh pemerintah (Departemen Pertanian dan jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia) adalah pertanian kecil multifungsi yang memiliki dimensi ganda, yakni aspek ekonomi dan ketahanan pangan lokal dan nasional, dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, tanpa mengeliminasi budaya lokal dan sistem pengetahuan masyarakat perdesaan (Hadar, 2008: 1).⁸

Masalah ketahanan pangan memiliki keterkaitan dengan banyak faktor dan salah satu faktor yang dominan adalah kemiskinan, baik ”kemiskinan kronis” maupun ”kemiskinan transisi”.⁹ Kemiskinan kronis adalah masyarakat atau orang miskin sesungguhnya tidak dapat keluar dan mampu beranjak dari kondisi miskinnya. Sementara kemiskinan transisi dapat dimaknai sebagai perubahan yang terjadi, baik secara gradual maupun tiba-tiba, sehingga seseorang atau sekelompok orang terjatuh lingkaran kemiskinan, seperti bencana alam, kelaparan, ketiadaan mata pencaharian, sakit, dan faktor lainnya. Dua jenis kemiskinan ini berdampak pada ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi

⁸ Ivan Hadar. 2008. “Kelaparan” (<http://www.targetmdgs.org/index.php>) Diakses tgl. 20 November 2009.

⁹ Jumlah penduduk miskin dunia sekitar 1 milyar, hidup dengan US\$1 per hari. Sekitar 800 juta jiwa kekurangan gizi dan mengalami kelaparan. Setiap tahun 6 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal sebab malnutrisi. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan penduduk (dunia) untuk mengakses sumber hidup layak, termasuk pangan dan pendapatan, semakin sulit dari tahun ke tahun. Butir 2 dari *Millenium Development Goals* (MDG’s) adalah “Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Kelaparan yang Parah”.

kebutuhan hidup mereka. Masyarakat yang memiliki fasilitas yang terbatas atau tidak memiliki fasilitas sama sekali, termasuk potensi bahkan akses untuk menghidupkan dirinya, menjadi faktor dominan bagi lemahnya ketahanan pangan masyarakat sebab sumber-sumber subsistensi yang tidak dimiliki atau sangat minim dipunyai. Dasar perhitungan garis kemiskinan adalah kebutuhan dasar kalori minimal 2.100 kkal, dengan pertimbangan 24% dari 2.100 kkal tersebut berasal dari beras, maka jika harga beras naik, kebutuhan uang untuk membeli beras juga akan bertambah, sehingga garis kemiskinan akan bergeser ke atas (<http://www.et-neg.go.id/index.php?2>).

Masalah ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di Provinsi NTT dan provinsi lainnya sangat berkaitan juga dengan kebijakan pangan. Mengurangi perhatian dan program pembudidayaan tanaman lokal seperti sagu, jagung, dan ubi kayu, kemudian pola makan (*food habits*) yang dipusatkan pada beras, telah merusak daya tahan pangan lokal yang berlangsung sejak era Orde Baru. Pangan selalu dihubungkan dengan beras. Daerah-daerah yang produksi berasnya rendah ‘melarikan diri’ dari usaha meningkatkan produksi lokal yang khas (jagung, sagu, dan ubi kayu), dan beralih ke usaha meningkatkan produksi beras. Terlebih lagi, kebijakan yang diterapkan selama tiga dekade telah membentuk persepsi masyarakat, bahwa beraslah indikator pokok ketika isu tentang pangan diwacanakan.

5.3 Keseluruhan Produksi Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur sering dianggap (ternyata demikian) sebagai “daerah rawan pangan” (DRP) dari tahun ke tahun, juga daerah yang bermasalah dengan kondisi kesehatan masyarakatnya. Karena kondisi rawan pangan (termasuk kategori gizi buruk)¹⁰ yang terus terjadi, maka timbul pertanyaan apakah benar

¹⁰ Data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang+buruk sebesar 33.6% (Departemen Kesehatan Republik

Provinsi NTT mengalami krisis pangan dari tahun ke tahun? Dari data yang tersedia, sejak tahun 2005 hingga 2007 kebutuhan akan energi (pangan) seperti beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sorgum mengalami peningkatan (Margana, 2009:7-8).¹¹ Sejak 2005 produksi pangan mencapai 745.000 ton, pada tahun 2006 meningkat sedikit menjadi 756.034 ton, dan naik lagi pada 2008 menjadi 799.745 ton. Penyebabnya adalah terjadinya peningkatan penduduk dan perubahan komposisi kelompok usia penduduk.¹² Secara umum, kebutuhan pangan di Provinsi NTT paling tinggi berada pada kelompok usia 10--14 tahun, atau 97.227 ton pada tahun 2005 dan 103.098 pada tahun 2006 (Magana, 2009: 6).

Salah satu penyebab krisis pangan di Provinsi NTT adalah kondisi geografis (lahan kering dan tandus) serta rendahnya curah hujan per tahun. Menghadapi kerawanan pangan itu sekaligus upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka masyarakat yang selalu menghadapi tantangan itu melakukan berbagai strategi. *Pertama*, menanam tumbuh-tumbuhan ‘alternatif’ selain padi dan jagung seperti ubi kayu, ubi jalar, dan pisang, serta upaya mengatasi ketahanan pangan ini bervariasi dari satu daerah ke daerah lain tergantung pada “agro-ekologi dari masing-masing desa” (Margana, 2009:9). *Kedua*, melakukan sistem barter¹³ atau pertukaran hasil-hasil

Indonesia, 2008. Laporan RISKESDAS 2007 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jakarta).

¹¹ Margana, Ignatius. 2009. "Ketahanan Pangan di NTT: Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Sumber Energi Tahun 2005-2008". Makalah Pusat Pendidikan LIPI, Cibinong.

¹² Terdapat korelasi antara jumlah energi yang dikonsumsi dengan usia penduduk. Pertambahan usia ditengarai mendorong peningkatan kebutuhan akan energi/pangan.

¹³ Praktik tukar-menukar barang (barter) merupakan salah satu bentuk tertua dalam interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan praktik serupa ini banyak dilakukan di daerah perdesaan di mana peranan nilai tukar uang belum besar pengaruhnya. Praktik barter di antara kenalan dan

pertanian dengan barang kebutuhan lain (makanan dan hewan, atau makanan dan hasil tenun). *Ketiga*, peranan kerabat dekat untuk membantu memenuhi keperluan pangan (jagung, padi dan umbi-umbian) pada saat krisis pangan. Bentuk 'pertahan diri' ini akan selalu dilakukan di antara kerabat ayah dan kerabat ibu dalam satu desa, sejauh keperluan untuk memenuhi kebutuhan pangan itu berlangsung. Bentuk ketiga sebagai bagian dari sejumlah strategi, untuk memenuhi kebutuhan pangan berlangsung dalam jaringan kerabat dekat dan akan selalu berulang.

Semua usaha telah dilakukan untuk mempertahankan hidup penduduk, tetapi kesulitan utama yang tidak mudah dihadapi adalah faktor alam. Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan dana sebesar 1.765 miliar rupiah untuk menangani kasus rawan pangan penduduk di 20 wilayah kabupaten dan kota. Dana yang bersumber dari APBD sebesar 1 miliar rupiah dan dari APBN sebesar 765 juta rupiah. Data dari Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi NTT menyebutkan terdapat 11 kabupaten/kota¹⁴ atau sekitar 380 desa yang mengalami kerawanan pangan, dan khusus di Kabupaten Alor sendiri sekitar 123 desa mengalami rawan pangan pada tahun 2008 (<http://nttonlinenews.com/ntt/index.php?view>).

5.4 Kabupaten Alor dan Ketahanan Pangan

Setiap kabupaten di Provinsi NTT memiliki kebijakan untuk mempertahankan kecukupan pangan bagi masyarakatnya. Kebijakan daerah (mulai dari provinsi hingga kabupaten) selalu merujuk ke kebijakan nasional tentang pangan, yaitu UU RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Ketahanan Pangan. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Alor hidup dari sektor pertanian. Kendati demikian, pembangunan

kerabat harus dipahami sebagai sebuah strategi adaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan akan pangan.

¹⁴ Kesebelas kabupaten/kota adalah Alor, Belu, Timor Tengah Utara, Lembata, Flores Timur, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Nagekeo, dan Sumba Barat Daya.

sektor pertanian ini juga menghadapi berbagai kendala dari tahun ke tahun. Kendala-kendala alamiah yang dihadapi adalah faktor topografi, dengan bukit berbatu dan bergunung, terbatasnya ketersediaan air sebab curah hujan yang rendah setiap tahunnya, pola pertanian masyarakat yang masih berpindah-pindah (*shifting cultivation*) dengan sistem tebas dan bakar, bencana alam akibat angin, kekeringan, hama, dan penyakit tanaman seperti ancaman hama tikus dan babi.

Kalau dicermati, tampak bahwa struktur ekonomi urutan paling dominan di Kabupaten Alor adalah pertanian, jasa-jasa, perdagangan, hotel, dan restoran. Hingga tahun 2006, sektor ekonomi mencapai 35,02%, jasa-jasa 27,50%, perdagangan, hotel, dan restoran 15,51%, konstruksi/bangunan 8,85%, transportasi dan komunikasi 4,70%, keuangan dan jasa-jasa sebesar 3,36%. Pada sisi lain, pendapatan per kapita masyarakat naik setiap tahun. Sebagai contoh, pada tahun 1998 pendapatan per kapita masyarakat Alor sekitar Rp1.270.334 dan hingga tahun 2007 mencapai Rp2.754.022 (Itta, 2008: 32--33).

Kontribusi bidang pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2007 sebesar 36,09% yang dapat dibagi dalam subsektor tanaman bahan makanan sebesar 11,66%, subsektor tanaman perkebunan sebesar 9,12%, subsektor peternakan sebesar 6,96%, subsektor kehutanan sebesar 0,73% dan subsektor perikanan 7,62% (BPS Kabupaten Alor, 2008: 2). Pertumbuhan nilai tambah pada sektor pertanian pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 51,34% di mana subsektor tanaman bahan makanan sebesar 7,13% dan subsektor tanaman perkebunan mencapai 8,13%. Khusus untuk produksi tanaman bahan makanan seperti jagung, umbi-umbian, padi dan kacang-kacangan sebesar 56.805.500 ton selama tahun 2007 dan mengalami kenaikan sebesar 4,24% kalau dibandingkan dengan produksi pertanian untuk jenis yang sama pada tahun 2006 yang hanya 54.493,200 ton (BPS Kabupaten Alor, 2008: 2--3).

Data tentang kenaikan produksi tanaman bahan makanan di Kabupaten Alor ini merupakan sebuah pencapaian positif sebab pada tahun 2005 penduduk di Kabupaten Alor pernah juga mengalami kerawanan pangan serius, di mana sekitar 3.600 kepala keluarga (KK) di 23 desa menderita kekurangan pangan, sehingga pemerintah harus membantunya dengan 180 ton beras. Fenomena yang sama terjadi lagi pada tahun 2006, ketika 6.000 KK di 17 kecamatan (82 desa) mengalami kerawanan pangan saat terjadinya penurunan produksi akibat bencana angin dan kelebihan hujan.¹⁵

Dinas Pertanian Kabupaten Alor berperan penting dalam menentukan kebijakan di sektor pertanian, berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta terkait. Perencanaan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Alor dimulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Perhatian utama ditujukan ke daerah perdesaan sebab di wilayah perdesaanlah terdapat banyak lahan pertanian dan perkebunan. Strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya di sektor pertanian di desa-desa di Kabupaten Alor dijabarkan dari “Perencanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan” sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan program dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga ke desa-desa. Dua isu pokok yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah desa yaitu “usaha peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Faktor-faktor yang dikembangkan selama ini terfokus pada peluang, dan potensi yang dimiliki di setiap desa. Hasilnya, setiap desa memiliki dua program utama, yaitu memprioritaskan potensi yang dimiliki dan peluang yang tersedia di dalam dan di luar desa.

Potensi utama daerah pertanian di Kabupaten Alor dengan 17 wilayah kecamatan adalah jagung, kacang tanah, padi, ubu kayu, ubi jalar, kacang hijau, jambu mete, kenari, dan kedelai. Potensi ini

¹⁵ Pendapat Wakil Bupati Alor, Abraham Maulaka.

sebagai besar untuk dikonsumsi dan hanya sebagai kecil saja yang dijual untuk membeli kebutuhan nonpangan (gula, minyak tanah, kopi, pakaian, dll). Hasil produksi pertanian yang berjangka pendek dan berjangka panjang (jambu mete dan kenari) dibudidayakan di kebun atau hidup di halaman rumah penduduk. Untuk menjaga tingkat produksi dan keberlanjutan produksi, maka dibentuk kelompok-kelompok kerja. Salah satu kelompok kerja di Desa Lewola, daerah yang kurang air bernama Kelompok Penanam Sayur, menjadi contoh bagaimana anggota kelompok sulit air itu dapat bekerja sama dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Pola kerjasama antaranggota dan dibantu oleh “Yayasan Citra Hidup dan Alfa Omega” dapat menghasilkan bahan makanan dalam menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan di desa tersebut.¹⁶

Terkait dengan organisasi yang menaruh perhatian pada ketahanan pangan, di Kabupaten Alor terutama ibukota Kalabahi terdapat beberapa organisasi swasta seperti “Yayasan Obor Swadaya” (YOS) yang diprakrsai oleh mantan Bupati Alor periode 1999--2007 Ans Takalapeta. Yayasan Obor Swadaya dibentuk pada tahun 1980-an dan berupaya untuk mendampingi dan menolong para petani dalam berbagai usaha untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Alor sejak masa pemerintahan Bupati Ans Takalapeta untuk memprioritaskan produk unggulan kabupaten ini terindikasi dari berbagai kerjasama di dalam dan luar negeri, yang juga mementingkan produk tenun lokal yang juga telah diekspor ke mancanegara.

Konsep “*Asa Buana dan Asa Bahari*” untuk mengaktifkan kehadiran dan peranan gereja (dengan kebun dan usahanya), dan masyarakat dengan kebun dan usahanya secara sinergis, dirasakan sangat membantu masyarakat tanpa terpilah dalam latar belakang agama, etnik, ras, dan kelompok. Disadari oleh penentu kebijakan di

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Pdt. Dina Takalapeta-Meller di Kupang, 14 Oktober 2009.

Kabupaten Alor bahwa daerah ini adalah daerah kepulauan, maka prioritas pada usaha menyiapkan dan memenuhi kebutuhan warga sangat dikedepankan dalam setiap kebijakan pembangunan. Prinsip yang dianut untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat adalah diusahakan agar 90% kebutuhan (pangan) diproduksi oleh masyarakat di pulau-pulau mereka dan selisihnya didatangkan dari luar Kabupaten Alor. Dalam meningkatkan kualitas makanan olahan agar unsur higienisnya terjamin, maka basis pengolahan makanan bekerja sama dengan organisasi Ikatan Bidan Indonesia dan Organisasi Perempuan Profesi (Gabungan Organisasi Perempuan). Makanan lokal yang diolah itu adalah ubi (kayu dan ubi jalar), kacang-kacangan, dan jagung yang dikerjakan oleh kaum perempuan.

Memberikan perhatian penting kepada perempuan Alor juga menjadi prioritas pembangunan manusia. Salah satu program adalah mengangkat tenun ikat Alor, yang oleh penggagasnya Pdt. Dian Takalapeta-Meller diprioritaskan pada tiga dimensi pokok. *Pertama*, merevitalisasi kebudayaan Alor melalui tenun ikat sebab tenun ikat adalah warisan turun-temurun perempuan Alor sekaligus wujud identitas masyarakat Kabupaten Alor.¹⁷ *Kedua*, pemberdayaan perempuan lokal, dan *ketiga*, pemberdayaan ekonomi rakyat (Itta, 2008: 80--81).

Salah satu program untuk membangun desa dan masyarakat perdesaan adalah melalui program “Gerbadestan” (Gerakan Kembali ke Desa dan Pertanian). Konsep utamanya ialah kembali ke desa, kembangkan desa dan menyejahterakan masyarakat desa. Dalam Program Gerbadestan terdapat tiga unsur utama, yakni pemerintah, masyarakat, dan kemitraan. Kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra juga dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Alor. Lembaga mitra dalam negeri yang intensif bekerja sama dengan pemerintahan

¹⁷ Seperti di Kolana, adat di daerah itu mewajibkan semua perempuan yang akan menikah mesti sanggup menenun. Sebuah kewajiban budaya turun-temurun sekaligus usaha pelestarian pengetahuan lokal akan potensi yang dimiliki perempuan/masyarakat.

Kabupaten Alor adalah LIPI dan Universitas Gajah Mada (UGM). Menyadari akan keterbatasan untuk menanggung usaha pembangunan, maka pemerintah Kabupaten Alor pada tahun 2005 juga menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain GZT dari Jerman, Pidra, Unicef, World Vision Indonesia (WVI), Area Development Program (ADP), UNFPA, CD Bethesda, MSF, Global Fund, Swisscontact, dan DHS. Badan-badan itu bergerak di bidang pemberdayaan gender, ketahanan pangan, dan pembangunan perdesaan.

Untuk menjawab berbagai ketertinggalan di Kabupaten Alor, Bupati Ans Takalapeta periode 1999-2007 memperkenalkan Program “Gerbadestan” (Gerakan Kembali ke Desa dan Pertanian) yang diluncurkan pada tanggal 1 April 1999. Program Gerbadestan ini kemudian diperluas tidak saja terfokus pada daerah/sektor pertanian, tetapi juga ke sektor kelautan. Program Gerbadestan bertujuan untuk membangun Alor dalam rangka memberdayakan rakyat, memberdayakan masyarakat, dan merekatkan hubungan sosial budaya mulai dari desa sebagai basis kehidupan masyarakat dengan melibatkan tiga unsur penting, yaitu pemerintah daerah, swadaya masyarakat, dan kemitraan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan (Itta, 2008: 26). Konsep dasar Program Gerbadestan dipadukan dengan kebijakan otonomi daerah yang memfokuskan perhatian pada keunggulan lokal dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸

¹⁸ Perhatian ditujukan untuk membangun keunikan dan keunggulan spesifik daerah menjadi salah satu sasaran pokok program Gerbadestan (Itta, 2008: 29). Program Gerbadestan dirangkai dengan program Pemerintah Provinsi NTT, yakni pembangunan ekonomi, penegakan hukum, dan pengembangan sumber daya manusia. Tiga agenda nasional utama yang diadopsi oleh program Gerbadestan adalah menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, menciptakan Indonesia yang aman dan damai, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia” (Itta, 2008: 29).

Empat program Gerbadestan¹⁹ adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan prasarana dan sarana, serta penguatan kelembagaan. Dalam memberdayakan ekonomi rakyat, upaya-upaya yang dilakukan bertujuan memampukan dan memberdayakan masyarakat agar secara terpadu, terencana, dan terarah memanfaatkan segala potensi yang tersedia di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, industri rumah tangga, dan usaha kecil/menengah. Segala tujuan pembangunan akan gagal kalau kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor tidak ditingkatkan.

Untuk mencapai tujuan itu, maka program kedua dari Gerbadestan adalah meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan, merubah wawasan agar lebih progresif, meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan berbagai program pelatihan, serta menjaga kehidupan keagamaan/spiritualitas dengan benar. Salah satu kekurangan wilayah ini yang belum sanggup menunjang program ketahanan pangan adalah minimnya prasarana dan sarana. Untuk menambah dan mempertahankan sarana dan prasarana yang ada, maka program Gerbadestan memberikan prioritas pada pembangunan dan juga memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada.

Program Gerbadestan ketiga adalah penguatan kelembagaan. Berbagai lembaga formal dan informal yang berada di wilayah Kabupaten Alor perlu ditingkatkan kinerjanya. Upaya penyinerjian antara lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga adat diharapkan akan membantu meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga program-program pembangunan termasuk upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pangan masyarakat dapat tercapai. Untuk mengaktualisasikan program Gerbadestan, maka ditempuh prinsip “5 S”, yaitu *Serentak* (oleh seluruh warga masyarakat tanpa kecuali),

¹⁹ Program pokok Gerbadestan adalah terwujudnya masyarakat Alor yang sejahtera, beriman, adil, maju, mandiri melalui pemerintahan yang baik dalam kerekatan hubungan sosial budaya dan berwawasan lingkungan (Itta, 2008: 28).

Selektif (selaras dengan potensi wilayah), *Sederhana* (mulai dengan apa yang masyarakat miliki dan ketahui), *Serius* (dengan penuh tanggung jawab), dan *Sukses* (berorientasi pada pencapaian sasaran optimal program). Diharapkan dari program Gerbadestan dapat mengadopsi keunikan daerah dan membangun keunggulan setiap daerah termasuk Kabupaten Alor dan program ini merupakan pengejawantahan dari jiwa otonomi daerah (Otodada).

Program Gerbadestan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat sehingga mereka dapat menolong diri sendiri. Basis pembangunan itu dimulai dari desa sebagai unit terkecil pemerintahan sekaligus juga merupakan basis kultural masyarakat yang kaya akan berbagai tradisi, nilai, dan norma yang dapat dijadikan ‘benih sosial’ untuk membangun masyarakat tanpa harus kehilangan jati dirinya. Landasan kultural (atau dapat disebutkan juga “*cultural capital*” atau modal budaya²⁰) dari program ini hendak menegaskan bahwa pembangunan adalah untuk orang Alor dan dimulai dari kesadaran bahwa masyarakat Alor memiliki modal sosial tanpa harus merasa rendah diri atau terus meniru kelompok masyarakat lain di luar Kabupaten Alor. Syair lagu *Taramiti Tominuku*²¹ merupakan pesan bagi masyarakat Alor “untuk bersatu hati membangun daerahnya”, diangkat menjadi pembangkit semangat untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Alor yang sementara berjuang memenuhi

²⁰ Pemikir dan pakar sosial Perancis P. Bourdieu (1986) “The Forms of Capital”. Dalam Richardson, J.G (ed). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood, menyebutkan terdapat tiga jenis modal budaya, yakni *state*, *embodied state*, dan *objectified state*. *State* mempunyai tiga perspektif, yaitu manusia, objek, dan institusi.

²¹ Ungkapan syair lagu lokal seperti “*Waibeke Seli Geipo Patamuru, anakoda kangkang sa Kuli*”, mengandung makna menuntaskan sebuah perjuangan di tengah kesulitan. Arti harfiahnya “perahu akan berlayar dalam badai dan gelombang laut ganas, kalau nahkoda berhati-hati pasti selamat”. Tidak saja berjalan bersama, tetapi peranan pemimpin sangat menentukan tujuan bersama.

kebutuhan hidupnya, dan satu komponen penting di dalamnya adalah pemenuhan akan kebutuhan pangan.

5.6 Homogenisasi Kebijakan

Untuk menyatukan keberagaman etnik dan kultural yang terpusat pada sejumlah sentra kekuasaan dan pengaruh bernuansa kedaerahan, Soeharto kemudian menyatukan sentra-sentra kekuasaan itu di bawah pengawasannya yang bersifat sentralistik. Nuansa politik berbau dengan perasaan terancam itulah yang mendorong diawalinya kebijakan sentralistik, dan salah satu bentuknya adalah “homogenisasi kebijakan”. Pemerintah pusat menjadi sentra penataan dan penentuan kebijakan nasional, dan daerah hanya memiliki sedikit ‘ruang’ untuk menganulir atau merevisinya. Bentuk mencolok dari kebijakan sentralistik yang homogen adalah produk UU RI Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan dampak peleburan dan perubahan fungsi, status dan tanggung jawab unit pemerintahan kampung menjadi desa.

Memprioritaskan kekuasaan dan menafikan potensi lokal juga berdampak pada berbagai kerawanan, seperti kerawanan pangan. Kerawanan pangan yang sering terjadi di berbagai tempat di Indonesia, terutama di Yakuimo, Papua (*Suara Pembaruan*, 3 September 2009), bukan terjadi pertama kali. Tahun 2005 peristiwa yang sama terjadi dan ikut merenggut jiwa penduduk, dan pengalaman serupa terulang kembali tahun 2009. Pertanyaan yang perlu dikedepankan adalah “mungkinkah kelaparan atau kekurangan pangan acapkali terjadi di Indonesia?” Ketika pemerintahan Orde Baru sangat menekankan “homogenisasi pangan nasional” (beras) sebagai komoditas unggulan dan memarginalisasikan produk-produk nonberas, “keamanan pangan” (*food security*) di Indonesia mulai terancam.

Tiga daerah dapat diambil sebagai contoh sumber pangan lokal yang dapat mengurangi konsumsi beras, seperti Provinsi NTT dengan produksi jagung, Papua dan Maluku dengan sagu, dan

Lampung dengan singkong. Keamanan pangan yang dicanangkan pemerintah agar masyarakat dapat cukup pangan (beras) justru kini menjadi bumerang. Produksi beras nasional sejumlah 60% berasal dari Pulau Jawa, dan sisanya dari Sulawesi Selatan dan diimpor. Semakin tinggi tingkat produksi, semakin miskin kesuburan lahan persawahan, sehingga di kemudian hari akan menjadi tidak lagi produktif. Nuansa sentralisasi kebijakan beras yang pada masa Orde Baru dapat disebut “*berasnisasi*” semakin menjauhkan harapan “*food security*” dari kehidupan masyarakat, terutama di Papua dan NTT.

Pengutamaan beras sebagai makanan pokok nasional selama hampir tiga dekade dengan drastis mengubah pola pikir penduduk tentang produk pangan lokal, seperti jagung, sagu, dan singkong. Rendahnya perhatian dan kekuatan yuridis bagi pengembangan pangan lokal mendorong masyarakat yang terbiasa dengan makanan tradisional mereka, beralih ke beras sebagai makanan utama. Dengan meningkatnya kebutuhan akan beras dalam negeri dari tahun ke tahun, mengakibatkan impor beras rata-rata per tahun sebesar 1.043.140 ton (4,7%) dari pasokan nasional. Kini, Indonesia menjadi konsumen beras terbesar di dunia, dengan konsumsi 139 kg/tahun, dibandingkan dengan Malaysia 80 kg/tahun dan Jepang 50 kg/tahun. Mencermati kondisi lahan, luas wilayah Indonesia, dan jenis-jenis pangan, maka sulit dibayangkan kalau Yakuhimo, NTT, dan daerah lain mengalami kerawanan pangan.

5.7 Kebijakan Nasional

Berbagai kebijakan nasional untuk membantu masyarakat (miskin) melalui program seperti bantuan langsung tunai (BLT) belum mampu memberdayakan penduduk miskin untuk mandiri di sektor pangan. Standar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang orang miskin, dengan pendapatan antara 1--2 dolar per hari, patut dilihat sebagai faktor dominan penyebab kelaparan. Butir 1 “*Millenium Development Goals*” (MDGs) tentang “Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Kelaparan yang Parah” harus menjadi

prioritas utama pemerintah Indonesia dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan yang sudah menjadi *benchmark* masyarakat Indonesia.

Diperlukan reorientasi kebijakan dari “*food security*” ke “*food sovereignty*” (kedaulatan pangan) agar masyarakat tidak mengalami rawan pangan seperti kasus Yakuimo. Kedaulatan jenis pangan lokal merupakan salah satu kunci untuk mengurangi tekanan pada kebutuhan akan beras yang terus meningkat setiap tahunnya. Diversifikasi pangan patut dikembalikan pada kondisi awal, dengan kata lain keberagaman pangan lokal harus dikembangkan secara intensif dan ekstensif, sesuai dengan kondisi daerah, potensi lahan, penduduk, dan jenis tanaman yang dikenal oleh masyarakat.

Untuk mengatasi kerawanan pangan yang sering berulang, maka beberapa langkah dapat ditempuh. *Pertama*, dalam era otonomi daerah, kebijakan untuk konsisten mengembangkan potensi pangan lokal menjadi salah satu kebijakan pokok. Kebijakan homogenisasi pangan harus diubah menjadi kebijakan heterogenisasi pangan. Oleh sebab itu, penggalakan penanaman sagu, jagung, singkong, dan umbi-umbi lainnya akan mendorong peningkatan produksi nonberas. *Kedua*, seandainya ada gerakan nasional untuk tidak mengonsumsi beras per hari per minggu, maka diperkirakan terjadi penghematan sekitar 1 juta ton beras per minggu. *Ketiga*, kelaparan terjadi akibat faktor alam, kondisi geografi, curah hujan, dan perilaku manusia. Strategi untuk menghadapi kondisi ini perlu didekati, tidak semata dari kebijakan publik dan kekuasaan, tetapi juga menekankan kerangka berpikir kebudayaan lokal²² dan potensi lokal.

²² Kebudayaan lokal (*local culture*) berhubungan dengan ruang dan waktu. Ruang berkaitan dengan “*space*” atau wilayah, daerah atau batas-batas geografis di mana warga masyarakat tertentu tinggal. Waktu merujuk pada periode atau jangka waktu di mana sebuah kebudayaan ada dan memiliki pendukungnya.

5.8 Peranan Kebudayaan Lokal

Kebudayaan mencakup segala bentuk hasil karya, cipta, dan karsa manusia, dan dalam konsep antropologi disebutkan sebagai segala bentuk hasil karya manusia dari generasi ke generasi yang selanjutnya dinamakan kebudayaan material (*material culture*). Peninggalan manusia itu merupakan akumulasi dari pengembangan pengetahuan kelompok masyarakat di tempat tertentu, dan modifikasi budaya itu terus terjadi sejalan dengan tantangan dan kebutuhan manusia. Kebudayaan dipahami juga sebagai sebuah sistem simbol yang memiliki makna atau arti dari para pendukung kebudayaan. Para pendukung kebudayaan memberikan makna; dan makna dari setiap simbol bersifat spesifik dan lokal. Secara umum, makna atau arti simbolisme kebudayaan itu dapat bersifat umum, artinya dapat dipahami oleh orang di luar komunitas pendukung kebudayaan, tetapi juga secara spesifik hanya dipahami (melalui interpretasi simbolik) oleh masyarakat pembuat dan pendukung kebudayaan itu. Nilai, norma, dan simbol yang ada memberikan identitas (*self-identity*) bagi masyarakat yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pola pertanian atau bentuk-bentuk subsistensi lainnya.

Fenomena umum kebudayaan itu juga ditemukan di Provinsi NTT umumnya, dan di Kabupaten Alor khususnya. Kebudayaan daerah (Alor) atau juga lazim disebut kebudayaan lokal/setempat meliputi berbagai sektor kehidupan, antara lain di bidang kesenian, mata pencaharian, kepercayaan/religi, dan sistem pengetahuan. Di sektor pertanian atau mata pencarian, sumber subsistensi utama masyarakat di Kabupaten Alor berasal dari sektor pertanian dan usaha di sektor pertanian ini pada umumnya masih dilakukan secara tradisional (BPS Kabupaten Alor, 2008).

Perkembangan cepat mekanisasi pertanian di Provinsi NTT sejak 1970-an belum sanggup menyentuh seluruh petani dan kelompok yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Kendatipun demikian, sektor pertanian yang tradisional itu sanggup

memberikan sumbangan yang signifikan²³ terhadap kebutuhan hidup masyarakat (termasuk masyarakat perkotaan yang mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, padi, jagung, dan umbi-umbian) yang berasal dari daerah perdesaan di Kabupaten Alor.²⁴ Menghadapi kenyataan yang tidak mudah dan dapat diubah dengan cepat ini, maka perpaduan antara teknik pertanian tradisional dan teknik pertanian modern (pupuk, pengetahuan, dan jenis bibit unggulan) dibutuhkan untuk mengingatkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Alor.²⁵ Penerapan teknologi dan penguasaan sumber-sumber produksi oleh pemerintah dan agen-agen perubahan (organisasi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian) di Kabupaten Alor selama ini bersifat sentralistik, sebab *trickle down effect* dari pengetahuan, dana, dan pendampingan itu masih didominasi oleh aparat pemerintah.²⁶

²³ Anggapan umum (para pendukung konsep modernisasi) bahwa kemajuan sebuah bangsa termasuk komunitas hanya dapat dicapai oleh kontribusi teknologi (*technological assistance*). Kalau 'diuji' dengan realitas empirik masyarakat perdesaan di berbagai negara termasuk Indonesia, maka anggapan ini tidak selalu tepat. Konsumsi pangan masyarakat perkotaan banyak yang berasal dari daerah perdesaan yang mayoritas masih mempergunakan teknologi sederhana.

²⁴ Hasil wawancara dengan Robby Hilio, pengurus organisasi "Mandiri Pangan" Kabupaten Alor.

²⁵ Memberikan kepercayaan penuh tanpa rasa curiga serta membina pengetahuan dan manajemen masyarakat perdesaan menjadi tren mencolok seperti yang berhasil dikembangkan oleh Achmaed Yunus, penggagas *Gramen Bank* dari Bangladesh. Gagasan yang lebih memfokuskan perhatian pada kelompok mampu saja disanggah oleh Achmaed Yunus, bahwa kelompok tradisional (terbelakang pun) sanggup memproduksi sesuatu kalau mereka mendapat perhatian dan bantuan selayaknya.

²⁶ Hasil wawancara dengan Robby Hilio. Dengan tersendatnya *trickle down effect*, dimaksudkan agar pengetahuan, dana, pendampingan yang dikuasai oleh pemerintah di berbagai sektor termasuk Dinas Pertanian belum secara penuh dan berkelanjutan diteruskan kepada petani atau kelompok petani. Berbagai kendala struktural mengakibatkan terlambatnya transfer pengetahuan dan dana, yang menyebabkan

Masyarakat Kabupaten Alor yang mayoritas hidup dari sektor pertanian memiliki pengetahuan lokal tentang berbagai produk pertanian lokal yang dapat dilestarikan dan produksinya dapat ditingkatkan dengan intervensi pemerintah serta peningkatan pengetahuan petani di segala sektor pertanian. Salah satu aspek penting yang terus dan sementara dipertahankan di Kabupaten Alor adalah “menjaga agar budaya lokal masyarakat tidak terkikis oleh perkembangan zaman”.²⁷ Pentingnya kebudayaan lokal bagi masyarakat di Kabupaten Alor –menurut narasumber– sangat penting sebab selama bergenerasi, penduduk di kabupaten ini telah membuktikan diri dapat *survive* dan sanggup memenuhi kebutuhan dasar mereka.²⁸ Atau, penduduk memiliki modal sosial dan kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dikembangkan, terutama di sektor pertanian. Kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan hasil pertanian (paralel dengan ketahanan pangan lokal) antara lain dilakukan kerja sama dengan pihak Balai Penelitian Tehnologi Tepat Guna (TTG-LIPI, Subang) untuk memproduksi berbagai jenis makanan/minuman dari bahan-bahan lokal.

Upaya meningkatkan produksi pertanian dan hasil tenunan yang bernuansa lokal telah diintensifkan dalam masa jabatan mantan Bupati Ans Takalaptea (1999-2007), sehingga terjadi peningkatan signifikan khususnya di bidang pertenunan kain daerah. Kalau dua sektor ini dibandingkan, maka bidang pertanian sedikit mengalami

tersendatnya program akselerasi pengembangan sektor pertanian yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah kendatipun terbatasnya dana dibandingkan dengan kondisi topografi dan klimatologi yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Alor.

²⁷ Hasil wawancara dengan Pendeta Dina Takalapeta-Meller, istri mantan Bupati Alor di Kupang.

²⁸ Kebutuhan dasar seperti pangan dan kebutuhan sekunder lainnya yang diperoleh dari penjualan hasil-hasil pertanian. Menurut Pdt. Dina Takalapeta-Meller, varian-varian makanan lokal seperti jagung, kenari, dan umbi-umbian telah dikemas dalam bentuk yang lebih menarik agar bernilai ekonomis dan dapat menarik minat konsumen.

keterlambatan karena luasnya wilayah yang kering, tandus, dan terbatasnya dana serta tenaga untuk mengakselerasi sektor pertanian.²⁹ Kondisi topografi dan minimnya curah hujan ikut berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Pada sisi lain, kendatipun para pejabat di Kabupaten Alor mengakui bahwa masyarakat memiliki kearifan lokal dan produk lokal, tetapi komitmen institusional untuk mengembangkan sektor pertanian dengan mengedepankan aspek kebudayaan lokal masih minim.

Aspek kebudayaan lokal di sektor pertanian dimaksudkan bagaimana menguatkan kapasitas lokal dengan mengoptimalkan sistem organisasi lokal (organisasi adat atau organisasi desa) untuk mengintensifkan sektor pertanian. Informasi dari sejumlah narasumber tentang peranan yang cukup positif kalau organisasi adat dan organisasi desa diikutsertakan dari awal perencanaan program. Dua argumen dikemukakan untuk membuktikan bagaimana budaya lokal yang termanifestasikan dalam organisasi lokal memiliki daya kreasi dan daya dukung komunal untuk mencapai sebuah tujuan bersama. *Pertama*, pengembangan usaha apapun dengan mempergunakan pengetahuan dan organisasi untuk tujuan bersama di Kabupaten Alor, terutama di daerah perdesaan, akan memberikan nilai tambah (*value added*) secara ekonomis. Produk-produk lokal (pertanian dan tenunan) tidak saja memiliki nilai tambah karena hasil kerja sama kelompok adat atau desa, tetapi ikut mempererat rasa kebersamaan kelompok/kerabat. *Sense of belonging* ini terwujud dalam rasa solidaritas dan motivasinya kalau dibandingkan dengan institusi dan program yang diintroduksikan dari atas.³⁰

Kedua, penguatan budaya lokal dimulai tidak selalu dari konsep (deduktif) tetapi dimulai dari apa yang ada/yang dimiliki

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Pdt. Dina Takalapeta-Meller di Kupang.

³⁰ Puna, I Made. 2009. *Penguatan Budaya Lokal Melalui Industri Kreatif Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, NTT (Makalah tidak diterbitkan).

masyarakat (induktif), dengan mengikutsertakan masyarakat pada program yang mereka ketahui, miliki dan butuhkan. Atau, masyarakat perlu adanya sokongan atau pendampingan yang lebih intensif, baik dari kalangan swasta ataupun pemerintah dalam mencari segala peluang yang ada, terutama dalam budaya lokal yang di dalamnya telah ada aktivitas-aktivitas yang sudah berjalan terkait dengan pemenuhan kesejahteraan hidup (Muna, 2009).

5.9 Penutup

Kebijakan meningkatkan ketahanan pangan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat (Indonesia) agar kondisi kecukupan pangan bagi rumah tangga terjamin. Ketahanan pangan itu mulai dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kondisi pangan di Indonesia saat ini masih memprihatinkan, sehingga Indonesia masih terus mengimpor pangan (beras, gula, dan kedelai) dari luar negeri, kecuali pada tahun 2008 di mana Indonesia mengalami surplus pangan. Usaha meningkatkan ketahanan pangan terus dilakukan di Indonesia, terutama di setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Induk dari berbagai kebijakan di sektor pertanian terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru ketika terjadi homogenisasi kebijakan pangan atau program “*berasnisasi*”, di mana daerah-daerah seperti Papua dan Maluku dengan produksi sagu melimpah, Provinsi NTT dengan produksi jagung ‘dipaksa’ membuka sawah dan menelantarkan tanaman sagu dan jagung. Kebijakan yang homogen ini telah mendorong impor besar dalam skala besar, berkurangnya aktivitas pertanian yang memprioritaskan unggulan daerah, seperti sagu, jagung, sayur-sayuran, dan ubi kayu.

Ketahanan pangan berkaitan dengan beberapa aspek, seperti kebijakan pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, ketersediaan dana untuk membantu petani dan para pihak (*stakeholders*) dalam pemberdayaan petani, meningkatkan ketrampilan petani, dan salah satu unsur pokok yang selama ini kurang atau tidak diprioritaskan adalah aspek keberhakan

(*entitlements*). Hak-hak petani ini adalah aspek yang krusial dan harus dituntaskan sebab aksesibilitas petani ke sumber-sumber produksi menjadi terkendala. Penguasaan tanah dan lahan yang berlebihan oleh sekelompok orang menjadi hambatan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Hak-hak agraria setiap warga negara – terutama para petani – harus dijamin agar para petani dapat berproduksi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pemerintahan Kabupaten Alor melalui kebijakan di sektor pertanian juga memprioritaskan pembangunan pertanian dengan memberdayakan petani, bekerja sama dengan lembaga mitra luar negeri, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dan pihak swasta dalam meningkatkan kemampuan petani, untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. Sejumlah keluhan petani di Kabupaten Alor tidak saja berkaitan dengan keterbatasan bantuan dana dan fasilitas produksi (pupuk dan pendampingan), tetapi juga pasar untuk menyerap hasil produksi mereka. Ketika musim panen melimpah (pisang, mangga, kenari, dll), petani kesulitan memasarkan hasil panen tersebut dan pengalaman setiap tahun ini turut berpengaruh pada motivasi petani untuk meningkatkan produksi pertanian mereka selain untuk dikonsumsi.

Terbatasnya daya serap pasar lokal berdampak pada murahnya harga pertanian dan hasil yang diperoleh tidak seimbang dengan modal yang mereka keluarkan (disparitas antara biaya produksi dan nilai jual). Dengan perkataan lain, terdapat hubungan erat antara peningkatan ketahanan pangan, kebijakan di sektor pertanian, fasilitas, pasar, dan mekanisme harga sehingga petani dan semua pihak terkait memiliki komitmen bersama untuk mempertahankan kapasitas produksi pertanian. Apabila berbagai faktor penunjang yang disebutkan di atas dapat diatasi, maka persoalan pangan di Kabupaten Alor dapat diatasi dalam waktu mendatang.

Daftar Pustaka

- Aswatini, Romidiati, Haning, dkk. 2004. *Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Sosial Demografi Rumah Tangga*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI).
- BPS Alor. 2008. *Statistik Pertanian Kabupaten Alor*. Kalabahi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor.
- Bourdieu, P. 1986. "The Forms of Capital". Richardson, J.G (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood.
- Manu, Charisal, M.A. 2004. *Potret Ragaan Ekonomi Rumah Tangga Pertanian Kabupaten Alor*. Kalabahi: BPS Kabupaten Alor.
- Margana, Ignatius. 2009. *Ketahanan Pangan di NTT: Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Sumber Energi Tahun 2005--2008*. Jakarta: Pusat Pendidikan LIPI, Cibinong (Makalah tidak diterbitkan).
- Molly, Anderson dan John, T. Cook. 1999. "Community Food Security". *Agriculture and Human Values*, (XVI): 141—150. Netherlands: Klumer Academic Publishers.
- Harian Umum Suara Pembaruan*, 3 September 2009.
- Itta, Hans. 2008. *50 Tahun Kabupaten Alor: Dalam Bingkai Sejarah Pemerintahan dan Pembangunan*. Jakarta: Hanted Institute.
- Koran Sindo*, 27 Desember 2006.
- Sekretariat Terpadu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Alianzi LSM Nasional. 2009. *Model Pengembangan Terpadu Desa Mandiri Pangan*. Jakarta: Sekretariat Terpadu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Alianzi LSM Nasional.



